

# LAPORAN PEREKONOMIAN

## Provinsi Sumatera Selatan

AGUSTUS 2025





# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

"Sumatera Selatan,  
Pusat Konektivitas dan Energi Sumatera"

November 2025

## Nilai Strategis Bank Indonesia

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama dan religi.

---

### Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

### Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

### Visi KPwBI Dalam Negeri

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

### Misi KPwBI Dalam Negeri

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

## Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun "Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Edisi November 2025" ini tepat pada waktunya. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Sumatera Selatan.

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,20% (yoy), tetap kuat meski melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,42% (yoy). Kinerja perekonomian Sumatera Selatan tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,90% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04% (yoy). Tetapi tumbuhnya ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 disumbang utamanya oleh Konsumsi Pemerintah dan LU Pertanian, namun tertahan oleh kinerja Konsumsi RT dan Eksport yang mengalami perlambatan. Dari sisi inflasi, realisasi inflasi pada triwulan III 2025 tercatat 3,44% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi tersebut sejalan dengan tetap tingginya konsumsi masyarakat seiring dengan momentum perayaan HUT RI ke-80, HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW, dan berbagai hajatan/festival rakyat.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini melalui kontribusi data dan informasi, baik melalui forum diskusi maupun media lainnya, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik, perbankan, akademisi, asosiasi, serta pemangku kebijakan lainnya. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat di masa mendatang. Kami juga menyadari bahwa Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga masukan berupa saran, kritik, dan dukungan informasi maupun data dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas laporan ini ke depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya, serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya. Akhir kata, kami berharap Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Edisi November 2025 ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Palembang, November 2025

**KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Bambang Pramono**  
Direktur

# • Daftar Isi

Visi dan Misi Bank Indonesia	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Indikator Utama	xiv
Ringkasan Umum	xviii

01

## Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1	Perkembangan Ekonomi Secara Umum	2
1.2	Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	2
1.2.1	Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah	3
1.2.2	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)/Investasi	5
1.2.3	Ekspor Luar Negeri	6
1.2.4	Impor Luar Negeri	7
1.3	Perkembangan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	9
1.3.1	Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	9
1.3.2	Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11
1.3.3	Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11
1.3.4	Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12
1.3.5	Lapangan Usaha Konstruksi	12
Boks 1:	2 <sup>nd</sup> Sriwijaya Economic Forum 2025 Jadi Momentum Penguatan Iklim Investasi dan Pemutakhiran Arah Ekonomi Sumatera Selatan	14
Boks 2:	Temu Responden 2025: Percepatan Digitalisasi Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Sumatera Selatan yang Tangguh	15

02

## Perkembangan Keuangan Daerah

2.1	Gambaran Umum	20
2.2	APBD Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	20
2.2.1	Realisasi Pendapatan APBD Sumatera Selatan	20
2.2.2	Realisasi Belanja APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	21
2.3	APBN Provinsi Sumatera Selatan	22

# 03

## Perkembangan Inflasi Daerah

3.1	Inflasi Secara Umum	28
3.2	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	29
3.2.1	Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	29
3.2.2	Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	30
3.2.3	Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	31
3.2.4	Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	31
3.2.5	Kelompok Kesehatan	31
3.2.6	Kelompok Transportasi	32
3.2.7	Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	32
3.2.8	Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	32
3.2.9	Kelompok Pendidikan	33
3.2.10	Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	33
3.2.11	Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	33
3.3	Perkembangan Inflasi Bulanan dan Tracking Inflasi Triwulan IV 2025	34
3.4	Analisis Inflasi Spasial	36
3.4.1	Kota Palembang	36
3.4.2	Kota Lubuklinggau	37
3.4.3	Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	38
3.4.4	Kabupaten Muara Enim	39
3.5	Upaya & Tantangan Pengendalian Inflasi	40
Boks 3 :	Sinergi Pangan: Sumatera Selatan & Sumatera Barat, Kolaborasi Tanpa Batas	44

# 04

## Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

4.1	Kondisi Umum	48
4.2	Pembiayaan Daerah	49
4.2.1	Perkembangan Pembiayaan Korporasi	49
4.2.2	Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga	51
4.3	Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM	52
Boks 4 :	Seru Sriwijaya X Susur Sungai Musi	55

05

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah	60
5.2	Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai	60
5.2.1	Transaksi SKNBI dan BI-RTGS	60
5.2.2	Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	61
5.3	Perkembangan Transaksi Elektronifikasi dan E-Commerce	63
5.4	Kegiatan Penukaran Valuta Asing Bukan Bukan Bank (KUPVA BB)	66

06

## Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

6.1	Kondisi Ketenagakerjaan	70
6.1.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	70
6.1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70
6.1.3	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	70
6.1.4	Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	70
6.1.5	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	71
6.1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	71
6.1.7	Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	72
6.2	Kondisi Kesejahteraan	72
6.3	Kemiskinan	73
6.3.1	Perubahan Garis Kemiskinan	74
6.3.2	Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	75
6.3.3	Ketimpangan Pengeluaran Penduduk	75

07

## Prospek Perekonomian Daerah

7.1	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2025	80
7.2	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2026	82
7.3	Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2025	83
7.4	Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026	84
7.5	Rekomendasi	84

Lampiran	<b>90</b>
Daftar Istilah	<b>100</b>
Tim Penyusun	<b>104</b>



# ● Daftar Grafik

Grafik 1.1	PDRB dan Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010	2
Grafik 1.2	PDRB dan Laju Pertumbuhan Triwulan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010	2
Grafik 1.3	Indeks Konsumsi Saat Ini (IKE Survei Konsumen Bank Indonesia)	4
Grafik 1.4	Pertumbuhan Kredit Multiguna dan Ruko/Rukan Sumatera Selatan	4
Grafik 1.5	Realisasi Belanja APBD Sumatera Selatan	4
Grafik 1.6	Realisasi Belanja APBN di Sumatera Selatan	4
Grafik 1.7	Likert scale investasi	5
Grafik 1.8	Volume Penjualan Semen di Sumatera Selatan	5
Grafik 1.9	Nilai Impor Barang Modal Sumatera Selatan	5
Grafik 1.10	Nilai Impor Bahan Baku Sumatera Selatan	5
Grafik 1.11	Perkembangan PDRB Komponen Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan	6
Grafik 1.12	Perkembangan Harga Komoditas Internasional	6
Grafik 1.13	Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Sumatera Selatan	6
Grafik 1.14	Perkembangan Volume Ekspor Impor Sumatera Selatan	6
Grafik 1.15	Perkembangan Nilai Ekspor Batu Bara Sumatera Selatan	7
Grafik 1.16	Perkembangan Nilai Ekspor Pulp & Paper Sumatera Selatan	7
Grafik 1.17	Perkembangan Nilai Ekspor Pulp&Paper Sumatera Selatan	7
Grafik 1.18	Perkembangan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Selatan	7
Grafik 1.19	Pangsa Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan berdasarkan Nilai Ekspor	7
Grafik 1.20	Pangsa Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Nilai Ekspor	7
Grafik 1.21	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Sumatera Selatan	8
Grafik 1.22	Perkembangan Volume Impor Provinsi Sumatera Selatan	8
Grafik 1.23	Perkembangan Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal	8
Grafik 1.24	Pangsa Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal	8
Grafik 1.25	Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian Sumatera Selatan	11
Grafik 1.26	Kegiatan Usaha Pertambangan di Sumatera Selatan	11
Grafik 1.27	Penyaluran Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11
Grafik 1.28	Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan	12
Grafik 1.29	Kegiatan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Sumatera Selatan	12
Grafik 1.30	Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi Sumatera Selatan	13
Grafik 2.1	Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III 2025 (Rp Triliun)	20
Grafik 2.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025	21
Grafik 2.3	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025	21
Grafik 2.4	Realisasi Belanja TKDD Sumatera Selatan Triwulan III 2025 berdasarkan Wilayah	24
Grafik 2.5	Realisasi Belanja TKDD Sumatera Selatan Triwulan III 2025 berdasarkan Jenis	24

Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional	29
Grafik 3.2	Inflasi Provinsi di Regional Sumatera periode Triwulan III 2025	29
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Kota Sampel Perhitungan Inflasi	36
Grafik 4.1	Perkembangan Pertumbuhan DPK dan Aset Perbankan di Sumatera Selatan	48
Grafik 4.2	Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	48
Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Sumatera Selatan Berdasarkan Lokasi Bank	49
Grafik 4.4	Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan	49
Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan	50
Grafik 4.6	Likert Scale Perkiraan Penjualan dan Perkiraan Investasi	50
Grafik 4.7	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi	50
Grafik 4.8	NPL Kredit Korporasi Sumatera Selatan	50
Grafik 4.9	Indeks Keyakinan Konsumen dan Komponennya Sumatera Selatan	51
Grafik 4.10	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan	51
Grafik 4.11	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan menurut kelompok penggunaan	51
Grafik 4.12	Pertumbuhan Komposisi Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan	51
Grafik 4.13	NPL Kredit Rumah Tangga Sumatera Selatan	52
Grafik 4.14	Perkembangan Kredit UMKM di Sumatera Selatan (Rp TRILIUN)	52
Grafik 4.15	Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Skala Usaha: (a) Pangsa Kredit UMKM; dan (b) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy)	52
Grafik 4.16	Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Penggunaan : (a) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy); dan (b) Pangsa Kredit UMKM	53
Grafik 4.17	Pangsa Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan	53
Grafik 4.18	Pertumbuhan Sektoral Kredit UMKM dan Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Triwulan III 2025	53
Grafik 4.19	Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumatera Selatan	53
Grafik 4.20	Perkembangan NPL Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan	54
Grafik 5.1	Aliran Uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan	60
Grafik 5.2	Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Sumatera Selatan	60
Grafik 5.3	Perkembangan Jumlah Warkat Transaksi Kliring Sumatera Selatan	60
Grafik 5.4	Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Sumatera Selatan	61
Grafik 5.5	Perkembangan Volume Transaksi RTGS Sumatera Selatan	61
Grafik 5.6	Jumlah Nominal Kartu ATM/D	61
Grafik 5.7	Volume Transaksi Kartu ATM/D	61
Grafik 5.8	Pangsa Transaksi ATM/D	62
Grafik 5.9	Jumlah Kartu ATM/D	62
Grafik 5.10	Nominal Transaksi Kartu Kredit	62

Grafik 5.11	Volume Transaksi Kartu Kredit	62
Grafik 5.12	Pangsa Transaksi Kartu Kredit	62
Grafik 5.13	Jumlah Kartu Kredit	62
Grafik 5.14	Jumlah UE	64
Grafik 5.15	Jumlah UE Reader	64
Grafik 5.16	Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Nominal	64
Grafik 5.17	Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Volume	64
Grafik 5.18	Jumlah Merchant QRIS	64
Grafik 5.19	Persebaran Merchant QRIS	64
Grafik 5.20	Proporsi Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	65
Grafik 5.21	Proporsi Penyaluran Jumlah KPM Bantuan Sembako	65
Grafik 5.22	Proporsi Penyaluran Nominal Bantuan Sembako	65
Grafik 5.23	Nominal transaksi e-commerce	65
Grafik 5.24	Frekuensi transaksi e-commerce	65
Grafik 5.25	Perkembangan Transaksi KUPVA BB Sumatera Selatan	66
Grafik 5.26	Transfer Dana Domestik-incoming	66
Grafik 5.27	Transfer Dana Luar Negeri-incoming	66
Grafik 5.28	Transfer Dana Domestik-Outgoing	66
Grafik 5.29	Transfer Dana Luar Negeri-Outgoing	66
Grafik 6.1	Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Juta orang),2021-2025	70
Grafik 6.2	Perkembangan TPAK di Sumatera Selatan, 2023-2025 (dalam %),2023-2025	70
Grafik 6.3	Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Sumatera Selatan(%)	71
Grafik 6.4	Penduduk Bekerja di Sumatera Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)	71
Grafik 6.5	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama	71
Grafik 6.6	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan,2021-2025 (dalam %)	72
Grafik 6.7	Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)	72
Grafik 6.8	Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu	72
Grafik 6.9	Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang dibayar dan Nilai Tukar Petani	73
Grafik 6.10	Nilai Tukar Petani Per Subsektor	73
Grafik 6.11	Perkembangan NTP dan Inflasi Pedesaan Sumatera Selatan	73
Grafik 6.12	Perkembangan Penduduk Miskin	74
Grafik 6.13	Perkembangan Gini Ratio Sumatera Selatan dan Nasional	76
Grafik 6.14	Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk	76
Grafik 6.15	Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perkotaan	76
Grafik 6.16	Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perdesaa	76

## ● Daftar Gambar

Gambar 3.1	Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan	<b>34</b>
Gambar 3.2	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Juli 2025	<b>34</b>
Gambar 3.3	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Ags 2025	<b>34</b>
Gambar 3.4	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Sep 2025	<b>35</b>
Gambar 3.5	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Okt 2025	<b>35</b>

# Daftar Tabel

Tabel1.1	Andil Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2022-2025 (%yoy)	3
Tabel1.2	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%yoy)	3
Tabel1.3	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%qtq)	3
Tabel1.4	Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan(Juta US\$)	8
Tabel1.5	Pertumbuhan Tahunan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera SelatanADHK 2010 (%yoy)	9
Tabel1.6	Laju Pertumbuhan Triwulanan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%qtq)	10
Tabel2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025(Rp miliar)	20
Tabel2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025(Rp Miliar)	22
Tabel2.3	Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Sumatera Selatan 2024-2025	23
Tabel2.4	Uraian Belanja Modal K/L Sumatera Selatan	23
Tabel2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025	23
Tabel3.1	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan	28
Tabel3.2	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025	28
Tabel3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	29
Tabel3.4	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	30
Tabel3.5	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	31
Tabel3.6	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	31
Tabel3.7	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan	31
Tabel3.8	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi	32
Tabel3.9	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	32
Tabel3.10	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	33
Tabel3.11	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan	33
Tabel3.12	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	33
Tabel3.13	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	33

Tabel 3.14	Inflasi Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	<b>36</b>
Tabel 3.15	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025 Kota Palembang	<b>37</b>
Tabel 3.16	Inflasi Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	<b>37</b>
Tabel 3.17	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025 Kota Lubuklinggau	<b>38</b>
Tabel 3.18	Inflasi Kab.OKI Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	<b>38</b>
Tabel 3.19	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025 Kab.OKI	<b>39</b>
Tabel 3.20	Inflasi Kab.Muara Enim Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	<b>39</b>
Tabel 3.21	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025 Kab.Muara Enim	<b>40</b>
Tabel 5.1	Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Selatan	<b>61</b>
Tabel 5.2	Perkembangan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan	<b>63</b>
Tabel 6.1	Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu Triwulan III 2025	<b>73</b>
Tabel 6.2	Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan 6 Bulan Yang Akan Datang Triwulan III 2025	<b>73</b>
Tabel 6.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	<b>74</b>
Tabel 6.4	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan	<b>75</b>
Tabel 6.5	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) di Sumatera Selatan	<b>75</b>
Tabel 7.1	<i>Global Economic Outlook</i>	<b>80</b>
Tabel 7.2	Volume Perdagangan Internasional	<b>81</b>

# Indikator Utama

## A. PDRB & INFLASI

INDIKATOR	2023		2024				2025			
	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
<b>MAKRO</b>										
Indeks Harga Konsumen										
Sumatera Selatan	116,48	116,48	105,93	106,42	105,78	107,01	107,01	107,81	109,02	109,42
Palembang	116,53	116,53	105,71	106,15	105,39	106,33	106,33	107,11	108,42	108,85
Lubuk Linggau	115,97	115,97	104,81	105,23	104,59	105,49	105,49	106,15	107,41	108,00
Ogan Komering Ilir	Penambahan Sampel Kota IHK dengan dasar Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 dirilis mulai Januari 2024				107,00	107,77	106,98	108,80	108,80	110,11
Muara Enim					106,24	106,77	106,93	109,08	109,08	110,30
Laju Inflasi Tahunan (yoy)										
Sumatera Selatan	3,17	3,17	3,24	2,48	1,40	1,20	1,20	1,77	2,44	3,44
Palembang	3,22	3,22	2,90	2,64	1,41	1,24	1,24	1,32	2,14	3,28
Lubuk Linggau	2,61	2,61	2,36	2,16	1,11	1,02	1,02	1,28	2,07	3,26
Ogan Komering Ilir	Penambahan Sampel Kota IHK dengan dasar Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 dirilis mulai Januari 2024				4,56	2,27	1,72	1,48	1,48	2,91
Muara Enim					3,76	2,17	1,08	0,74	0,74	3,31

INDIKATOR	2023		2024				2025			
	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
<b>Pertumbuhan Tahunan PDRB Sektoral (yoy)</b>										
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,92	2,15	2,06	3,25	2,66	2,39	2,59	11,39	2,17	7,79
Pertambangan dan Penggalian	5,20	7,89	4,12	0,90	3,51	4,71	3,33	10,84	5,93	0,61
Industri Pengolahan	5,04	3,69	4,66	5,03	4,04	3,91	4,39	8,85	5,58	5,13
Pengadaan Listrik dan Gas	7,66	4,40	8,07	8,89	9,01	7,94	8,48	8,71	4,68	6,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,06	0,33	2,52	1,85	2,16	3,27	2,66	8,32	1,27	1,98
Konstruksi	6,82	3,55	7,01	7,28	5,49	4,04	5,89	7,90	8,11	8,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,17	7,60	6,81	7,69	7,33	7,88	7,42	7,31	8,78	8,58
Transportasi dan Pergudangan	4,36	7,48	2,72	3,74	3,85	3,27	3,44	6,65	4,85	6,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,56	13,14	9,65	9,57	9,34	9,05	9,39	5,66	10,29	11,58
Informasi dan Komunikasi	4,11	6,35	6,12	9,88	10,20	9,17	8,84	5,17	4,97	5,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,41	4,60	10,17	8,08	10,23	0,12	7,09	4,96	2,74	1,94
Real Estate	5,05	4,28	6,51	8,41	8,81	8,91	8,17	4,07	7,74	7,98
Jasa Perusahaan	3,92	2,03	3,96	5,07	5,41	6,23	5,18	3,90	6,50	6,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,02	3,73	9,97	9,95	8,62	8,83	9,35	3,49	-0,75	-0,02
Jasa Pendidikan	3,64	2,23	4,94	5,98	6,41	9,43	6,76	2,92	-0,02	4,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,26	-0,02	3,67	7,65	4,29	13,62	7,34	2,26	5,96	5,74
Jasa lainnya	2,62	1,95	4,92	6,49	5,49	-0,05	4,12	-0,06	4,11	4,72
<b>Pertumbuhan Tahunan PDRB Penggunaan (yoy)</b>										
Konsumsi Rumah Tangga	4,84	5,27	4,15	4,79	4,77	4,95	4,68	4,91	4,93	4,89
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	7,70	6,78	20,41	17,99	16,32	7,42	15,53	1,21	4,99	5,13
Konsumsi Pemerintah	1,57	5,10	13,32	8,29	10,64	3,37	8,38	3,90	-3,98	3,65
Investasi	4,18	2,47	4,82	3,97	4,63	4,20	4,41	2,21	5,65	3,05
Ekspor Luar Negeri	-9,52	-4,54	-18,72	-9,59	16,10	2,54	0,15	25,02	1,25	-2,49
Impor Luar Negeri	113,20	26,45	183,00	91,28	42,30	1,42	46,90	-49,97	-2,15	-7,65

## B.Ekspor-Impor

EKSPOR IMPOR	2023 IV	TOTAL	2024				TOTAL	2025		
			I	II	III	IV		I	II	III
Nilai ekspor nonmigas (USD Juta)	1.500,36	6.121,93	1.259,75	1.446,66	1.707,35	1.848,55	6.262,31	1.665,19	1.343,19	1.529,60
Nilai impor nonmigas (USD Juta)	467,08	1.110,18	637,19	461,83	586,10	383,60	2.068,72	258,42	253,04	259,82
Volume ekspor nonmigas (juta kg)	11.542,89	45.687,89	10.436,09	12.509,68	14.891,72	17.022,05	37.837,49	14.646,53	11.362,63	14.356,43
Volume impor nonmigas (juta kg)	395,29	1.297,52	332,78	331,80	829,76	510,25	2.004,60	553,14	452,89	448,14

## C.PERBANKAN

INDIKATOR	2023		2024			2025		
	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Perbankan</b>								
<b>Total Aset (Rp Triliun)</b>	141,42	139,00	147,13	156,39	156,50	156,50	155,83	157,09
<b>DPK (Rp Triliun)</b>	103,32	102,42	106,55	109,65	108,65	108,65	109,49	110,85
- Giro	15,8	19,4	19,4	21,6	17,3	17,3	19,2	19,3
- Tabungan	15,8	53,2	55,1	56,5	60,3	60,3	58,9	58,9
- Deposito	33,0	29,8	32,1	31,5	31,1	31,1	31,4	32,6
<b>Jumlah Rekening DPK (Ribu)</b>	38.117	12.979	13.256	13.289	13.508	13.508	13.556	13.546
- Giro	359	120	121	124	121	121	121	121
- Tabungan	37.499	12.773	13.049	13.080	13.301	13.301	13.350	13.340
- Deposito	258	86	86	86	85	85	85	85
<b>Kredit Berdasarkan Penggunaan (Rp Triliun)</b>	162,48	163,55	167,37	170,57	174,25	174,25	175,50	177,79
- Modal Kerja	68,13	66,09	67,11	69,05	72,27	68,85	69,84	71,36
- Investasi	45,37	46,99	48,31	47,87	48,70	50,09	50,16	50,42
- Konsumsi	48,98	50,47	51,95	53,65	54,95	55,31	55,49	56,00
<b>Total Kredit (Rp Triliun)</b>	162,48	163,55	167,37	170,57	175,92	174,25	175,50	177,79
<b>Kredit Lapangan Usaha/Korporasi (Rp Triliun)</b>	113,50	113,08	115,42	116,93	118,94	118,94	120,01	121,78
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	28,72	28,39	29,22	28,34	28,36	28,36	28,33	28,34
Pertambangan dan Penggalian	10,82	11,09	11,04	13,18	12,76	12,76	12,73	12,93
Industri Pengolahan	33,25	32,68	34,04	34,41	35,78	35,78	36,95	38,44
Listrik, Gas dan Air Bersih	2,90	3,26	33,50	3,03	3,33	3,33	3,34	3,39
Konstruksi	0,60	5,99	58,24	5,57	5,50	5,50	5,39	5,37
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	22,20	22,14	21,98	21,94	21,99	21,99	22,07	21,98
Transportasi dan Pergudangan dan Komunikasi	2,14	2,12	2,21	2,21	2,33	2,33	2,38	2,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	1,99	2,09	2,13	2,14	2,14	2,12	2,47
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,75	2,85	2,92	2,80	2,98	2,98	2,95	0,56
Jasa-jasa	2,63	2,56	2,74	2,86	2,90	2,90	2,89	3,00
<b>Kredit Bukan Lapangan Usaha/Kredit Konsumsi (Rp Triliun)</b>	48,98	50,47	51,95	53,65	55,31	55,31	55,49	56,00
Rumah Tinggal	14,81	14,69	16,06	16,36	16,61	16,61	16,79	16,98
Flat dan Apartemen	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	0,38	1,26	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45
Kendaraan Bermotor	3,51	3,72	3,81	4,04	4,13	4,13	4,14	4,20
Multiguna	18,16	18,30	18,58	18,94	19,38	19,38	19,35	19,47
Lainnya	30,16	30,68	31,50	31,74	34,61	34,61	34,64	34,77
<b>LDR</b>	157,3%	158,4%	157,8%	156,7%	153,5%	158,1%	156,9%	154,2%
<b>NPL Gross</b>	2,54%	2,66%	2,59%	1,86%	1,86%	1,87%	1,89%	1,89%

(sumber: Bank Indonesia)

## D. SISTEM PEMBAYARAN

KETERANGAN	2023		2024				2025		
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Jumlah hari	62	64	58	52	65	63	58	60	64
<b>1. Perputaran Kliring</b>									
a.Nominal (Rp Miliar)	9.257	9.418	8.021	7.825	8.442	9.265	6.979	6.890	7,828
b.Warkat (lembar)	183.628	191.954	148.544	145.396	162.078	164.598	131.082	126.327	148,910
<b>2. Rata-rata Harian Kliring</b>									
a.Nominal (Rp Miliar)	149,3	147,2	138,3	150,5	129,8	147,1	120,3	114,8	122,3
b.Jumlah Warkat (lembar)	2.962	2.999	2.561	2.796	2.494	2.613	2.260	2.105	2,327
<b>3. Rata-rata Harian RTGS</b>									
a.Nominal/Hari (Rp Miliar)	794,7	797,9	589,7	901,0	759,2	1.019,6	877	780	652
b.Jumlah Warkat (lembar)	290	303	266	299	264	307	264	13.982	16,726
<b>4. Penolakan Cek/BG</b>									
a.Nominal (Rp Miliar)	57,8	52,9	55,2	49,0	50,5	55,1	46,9	51,6	50,6
b.Warkat (lembar)	1.185	1.016	997	943	926	876	802	977	908
<b>5. Penolakan Cek/BG</b>									
a.Nominal (%)	0,62%	0,56%	0,69%	0,63%	0,60%	0,59%	0,67%	0,75%	0,65%
b.Warkat (%)	0,65%	0,53%	0,67%	0,65%	0,57%	0,53%	0,61%	0,77%	0,61%
<b>6. Mutasi kas (Rp Miliar)</b>									
Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)	1.669,8	948,4	975,8	445,2	99,6	57,8	61,8	198,5	1,667,3
a.Aliran uang masuk/inflow	3.617,5	2.315,0	3.901,4	4.374,2	2.368,1	1.729,2	2.901,3	4.200,8	2,157,8
b.Aliran uang keluar (outflow)	3.732,3	5.568,5	4.996,8	6.189,2	4.284,1	6.398,2	5.756,4	3.057,8	4,843,2
c.Net Inflow (outflow)	(114,8)	(3.253,5)	(1.095,4)	(1.815,0)	(1.916,0)	(4.669,0)	(2.855,1)	1.143,0	(2,685,4)

(sumber: Bank Indonesia)

# Ringkasan Umum



## Perkembangan Ekonomi Daerah

**Ekonomi Sumatera Selatan tetap tumbuh kuat pada triwulan III 2025 sebesar 5,20% (yoy) yang didorong oleh percepatan realisasi belanja pemerintah serta terjaganya daya beli masyarakat.** Kinerja perekonomian Sumatera Selatan tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,90% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III 2025 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan kinerja PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal aktivitas investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 bersumber dari komponen LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan yang memiliki andil tertinggi. Sementara LU dengan pertumbuhan tertinggi yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, LU Administrasi Pemerintah menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 yang sejalan dengan belum optimalnya realisasi belanja pemerintah.

## Perkembangan Keuangan Daerah

**Kinerja keuangan pemerintah pada triwulan III 2025 menunjukkan kinerja realisasi pendapatan dan belanja yang relatif tinggi, meski untuk belanja termoderasi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan transfer ke daerah (TKD).** Adapun realisasi pendapatan pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp42,95 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp42,95 triliun. Selain itu, realisasi pendapatan tersebut secara persentase meningkat dari 60,13% pada triwulan III 2024 menjadi 64,87% pada triwulan III 2025, yang terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan pajak pemerintah pusat seiring peningkatan setoran masa PPN dan PPh Badan dari komoditas unggulan. Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III 2025 mencapai Rp59,56 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp64,35 triliun. Secara persentase, realisasi belanja tersebut turut menunjukkan penurunan dari 61,24% pada tahun 2024 menjadi 59,27% pada triwulan III 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan eksekusi belanja belum dapat dilaksanakan dan/atau mengalami penundaan. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) triwulan III 2025 sebesar 74,16% dari pagu, naik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 71,47% dari pagu. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pagu yang mengakibatkan kenaikan realisasi pada DBH.

## Perkembangan Inflasi Daerah

**Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat meningkat pada triwulan III 2025 sejalan dengan dorongan konsumsi masyarakat pada momentum HUT RI ke-80 dan HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW, serta normalisasi realisasi anggaran pemerintah. Inflasi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 3,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang sebesar 2,44% (yoy) dan di atas inflasi nasional 2,65% (yoy), menempatkan Sumsel pada urutan ke-6 tertinggi di regional Sumatera. Peningkatan tekanan inflasi terutama berasumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 1,85% (yoy), didorong oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah, beras, dan tomat akibat gangguan cuaca di daerah sentra. Selain itu, inflasi diperkuat oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren global dan tingginya permintaan domestik yang dipengaruhi faktor budaya. Tekanan inflasi juga didorong oleh penyesuaian biaya pendidikan pada tahun ajaran baru dan kenaikan harga restoran di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Meski demikian, inflasi tertahan oleh deflasi bawang putih akibat masuknya pasokan impor, penurunan harga BBM non-subsidi, serta perbaikan pasokan hortikultura. Prospek inflasi IHK tahun 2025 diperkirakan tetap dalam sasaran nasional 2,5±1% dengan penguatan sinergi BI-TPID, digitalisasi, ketahanan pangan, dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi konsumen di tengah dorongan konsumsi yang tetap kuat.**

## Pembentukan Daerah dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

**Kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian yang mendorong sikap *wait and see* oleh masyarakat dan pelaku usaha. Hal direfleksikan melalui pertumbuhan penyaluran kredit serta aset perbankan. Di lain sisi, pertumbuhan kinerja intermediasi turut disertai dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.** Kinerja pertumbuhan aset perbankan pada triwulan III 2025 tumbuh positif sebesar 1,79% (yoy), meskipun relatif melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,13% (yoy). Kinerja aset perbankan disumbang oleh pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 3,00% (yoy), lebih lambat dibandingkan 8,79% (yoy). Berdasarkan golongan debitur, penyaluran kredit rumah tangga tumbuh 10,94% (yoy) dan penyaluran kredit korporasi tumbuh 10,52% (yoy). Dinamika ketidakpastian global yang berpengaruh terhadap daya beli dan pergerakan harga komoditas acuan global turut mempengaruhi penyaluran kredit keseluruhan di Sumatera Selatan. Di lain sisi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 7,03% (yoy) yang tetap positif namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 8,13% (yoy). Pada periode laporan, kinerja DPK disumbang oleh pertumbuhan pada instrumen Giro

(11,89% (yoy)) dan Tabungan (9,05% (yoy)) namun ditahan oleh instrumen deposito yang mengalami kontraksi (-1,62% (yoy)). Kinerja DPK tetap tumbuh positif di tengah pembelian aset-aset yang mempunyai imbal hasil, baik aset keuangan maupun riil. Sejalan dengan penyaluran kredit secara umum, Kredit UMKM triwulan III 2025 mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh 2,80%, yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM skala kecil pada periode ini merupakan penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 18,41% (yoy). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar terkontraksi sebesar -5,93% (yoy) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

**Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal baik melalui metode tunai maupun nontunai memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025.** Sesuai dengan pola historis tahunan, aliran transaksi uang kartal mengalami *net outflow* pada triwulan III 2025. Penyelenggaraan transaksi melalui sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) maupun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terus menunjukkan perbaikan meskipun masih terkontraksi pada triwulan berjalan, seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan alternatif pembayaran BI-FAST. Pertumbuhan positif nominal transaksi Uang Elektronik (UE) dan *e-commerce*, didukung oleh pesatnya perkembangan QRIS mencerminkan tingginya minat masyarakat Sumatera Selatan terhadap opsi pembayaran secara digital.

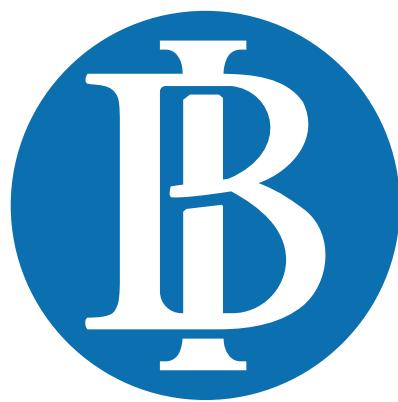
## Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

**Pada triwulan III 2025, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi membaik.** Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Sumatera Selatan pada Agustus 2025 tercatat sebesar 6,67 juta orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,58 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,69%, mengalami penurunan sebesar 0,17% (yoy). Tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama petani, juga mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III yang

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 122,38 menjadi 127,77. Selain itu, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau penghasilan saat ini lebih baik dibandingkan enam bulan yang lalu, dan masyarakat masih optimis bahwa penghasilan mereka ke depan akan relatif lebih baik.

## Prospek Perekonomian Daerah

**Di tengah dinamika kondisi geopolitik dan perekonomian global, ekonomi Sumatera Selatan diprakirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2025, didukung oleh inflasi yang terjaga pada rentang sasaran.** Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,8-5,6% (yo), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan. Ke depan, inflasi pada tahun 2025 diprakirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar  $2,5\pm1\%$  setelah pada tahun sebelumnya berada di bawah rentang target. Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.



01

---

# Perkembangan Ekonomi Daerah



**Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh tetap kuat pada triwulan III 2025 dengan realisasi sebesar 5,20% (yoY), didukung oleh percepatan realisasi belanja pemerintah serta terjaganya daya beli masyarakat.**

- Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III 2025 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Sementara secara pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal dari konsumsi pemerintah. Kinerja positif tersebut didorong oleh percepatan realisasi dan peningkatan pagu TKD serta percepatan belanja pemerintah daerah pasca dibukanya sebagian blokir anggaran pada triwulan II 2025.
- Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan II 2025 bersumber dari komponen LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan yang memiliki andil tertinggi. Sementara LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta LU Industri Pengolahan merupakan LU dengan andil pertumbuhan tertinggi sehingga menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

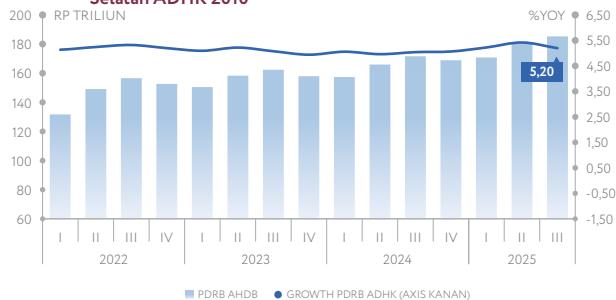
## 1.1 Perkembangan Ekonomi Secara Umum

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,20% (yooy), menurun dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,42% (yooy) (Grafik 1-1). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan antar triwulan pada triwulan III 2025 juga tercatat lebih lambat sebesar 2,25% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,65% (qtq) (Grafik 1-2). Jika dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,90% (yooy) dan Nasional yang tercatat sebesar 5,04% (yooy). Sementara itu, pangsa ekonomi Sumatera Selatan di ekonomi Sumatera pada triwulan laporan tercatat 13,85%.

**Tetap kuatnya kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 utamanya didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi pemerintah dan stabilnya konsumsi rumah tangga.** Kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 3,65% (yooy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi sebesar 5,91% (yooy). Akselerasi pertumbuhan secara tahunan dari konsumsi pemerintah pada triwulan laporan didorong oleh percepatan penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada triwulan III 2025 di Sumatera Selatan dan pembukaan blokir sebagian anggaran yang baru dimulai pada akhir triwulan II 2025. Hal tersebut berimplikasi kepada adanya realisasi yang sangat masif pada triwulan III 2025.

Selanjutnya, konsumsi rumah tangga di Sumatera Selatan tercatat tumbuh sebesar 4,89% (yooy), cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,93% (yooy). Kinerja konsumsi rumah tangga yang terjaga stabil pada triwulan laporan utamanya didorong oleh berlanjutnya penyaluran bantuan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dijadwalkan disalurkan secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2025. Penyaluran berbagai subsidi tersebut menjadi *social shock absorbers* yang disalurkan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kinerja rumah tangga juga ditopang oleh harga komoditas unggulan CPO yang tumbuh positif guna mendorong daya beli masyarakat Sumsel tetap kuat pada triwulan III 2025.

**Grafik 1.1 PDRB dan Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

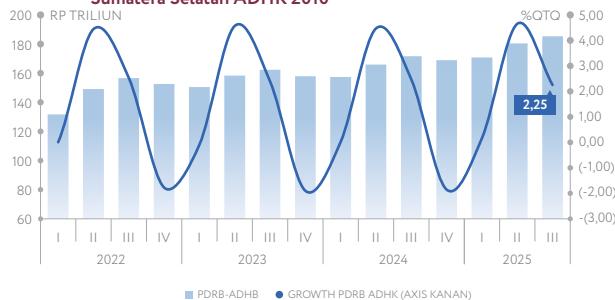
Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan didorong oleh kuatnya pertumbuhan LU Pertanian dan stabilnya LU konstruksi. Pada triwulan III 2025, LU Pertanian tercatat tumbuh sebesar 7,79% (yooy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,17% (yooy). Akselerasi kinerja LU pertanian di Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 terutama didorong oleh adanya peningkatan signifikan pada luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Capaian kinerja tersebut sejalan semakin insetifnya pelaksanaan berbagai program swasembada pangan dilakukan di Sumatera Selatan, diantaranya OPLA, Cetak Sawah, padi gogo, serta dibarengi dengan dukungan perluasan irigasi.

Selanjutnya, pada LU konstruksi, terjadi pertumbuhan sebesar 8,09% (yooy) pada triwulan laporan, cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,11% (yooy). Tetapi terjadinya laju pertumbuhan LU konstruksi pada triwulan III 2025 terkonfirmasi dari tingkat kredit yang disalurkan pada sektor konstruksi dan **peningkatan realisasi penjualan semen di Sumatera Selatan**.

## 1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, struktur perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 didominasi oleh **konsumsi rumah tangga**. Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pangsa sebesar 59,55% terhadap total PDRB. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 2,79% (yooy) (Tabel 1-1). Perkembangan ini tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan andil pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,79% (yooy). Selanjutnya, PMTB atau investasi pada triwulan III 2025 memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 29,04% terhadap PDRB Sumatera Selatan dan memiliki andil pertumbuhan sebesar 0,91% (yooy). Sementara, kinerja ekspor luar negeri memberikan kontribusi sebesar 20,68% dan memberikan andil pertumbuhan sebesar -1,71% (yooy).

**Grafik 1.2 PDRB dan Laju Pertumbuhan Triwulan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 1.1 Andil Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2022-2025 (%yoy)

KOMPONEN PENGELOUARAN	2023			TOTAL	2024				TOTAL	2025		
	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,15	2,86	2,87	3,10	2,52	2,83	2,73	2,93	2,75	2,92	2,91	2,79
Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,94	0,65	1,35	0,78	1,50	1,20	1,38	1,34	1,35	0,69	1,68	0,91
Ekspor Luar Negeri	0,11	(10,79)	(3,05)	(1,39)	(5,48)	(2,75)	4,11	3,92	0,04	5,86	(0,82)	(1,71)
Lainnya	1,02	12,36	3,77	0,76	6,52	3,68	(3,18)	(3,12)	0,89	(4,25)	1,65	3,21
<b>PDRB</b>	<b>5,22</b>	<b>5,08</b>	<b>4,94</b>	<b>5,08</b>	<b>5,06</b>	<b>4,96</b>	<b>5,04</b>	<b>5,07</b>	<b>5,03</b>	<b>5,22</b>	<b>5,42</b>	<b>5,20</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

## 1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah

Pada triwulan III 2025, konsumsi rumah tangga tercatat tetap tumbuh stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan III 2025 tercatat sebesar 4,89% (yoy), atau tumbuh stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,93% (yoy) (Tabel 1-2). Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga secara triwulan tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% (qtq) pada triwulan laporan. Kondisi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,44% (qtq). (Tabel 1-3). Kinerja konsumsi rumah tangga yang terjaga stabil pada triwulan laporan utamanya didorong oleh berlanjutnya penyaluran bantuan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) dijadwalkan disalurkan secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2025. Penyaluran berbagai subsidi tersebut menjadi *social shock absorbers* yang disalurkan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kinerja rumah tangga juga ditopang oleh harga komoditas unggulan CPO yang tumbuh

mencapai 8,16% (yoy) mampu mendorong daya beli masyarakat Sumsel tetap kuat pada triwulan III 2025.

**Kinerja konsumsi rumah tangga yang tetap kuat terkonfirmasi dari hasil survei konsumen** yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut tercermin pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang terjaga berada di atas level optimis (>100) sebesar 112,39. Kondisi tersebut juga tercermin pada 2 (dua) indikator penyusun IKE, yakni indeks penghasilan saat ini dan indeks ketersediaan lapangan kerja yang masing-masing tercatat sebesar 113,17 dan 105,33 (Grafik 1-3).

**Dukungan pada kinerja konsumsi rumah tangga juga bersumber dari membaiknya penyaluran kredit multiguna dan rumah tinggal.** Adapun penyaluran kredit multiguna yang disalurkan perbankan di Wilayah Sumatera Selatan tercatat tumbuh sebesar 8,18% (yoy) atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,31% (yoy). Kredit multiguna adalah kredit dengan pangsa terbesar pada kredit konsumsi di Sumatera Selatan dengan pangsa sekitar 34%. Perbaikan kinerja kredit multiguna tersebut

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%yoy)

KOMPONEN PENGELOUARAN	2023			TOTAL	2024				TOTAL	2025		
	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,34	4,99	4,84	5,27	4,19	4,79	4,77	4,95	4,68	4,91	4,93	4,89
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,48	0,49	7,70	6,78	20,41	17,99	16,32	7,42	15,53	1,21	4,99	5,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,23	0,14	1,57	5,10	13,32	8,29	10,64	3,37	8,38	3,90	(3,98)	3,65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,05	2,12	4,18	2,47	4,82	3,97	4,63	4,20	4,41	2,21	5,65	3,05
Ekspor Luar Negeri	0,37	(28,72)	(9,52)	(4,54)	(18,72)	(9,59)	0,84	2,54	0,15	25,02	(3,31)	(2,49)
Impor Luar Negeri	(11,50)	31,82	113,20	26,45	183,00	91,28	42,83	1,42	46,90	(49,97)	(42,38)	(7,65)
<b>PDRB</b>	<b>5,22</b>	<b>5,08</b>	<b>4,94</b>	<b>5,08</b>	<b>5,06</b>	<b>4,96</b>	<b>5,04</b>	<b>5,07</b>	<b>5,03</b>	<b>5,22</b>	<b>5,42</b>	<b>5,20</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%qtq)

KOMPONEN PENGELOUARAN	2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,26	2,84	(0,91)	1,60	0,63	3,42	(0,92)	1,77	0,59	3,44	(0,96)
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(0,27)	4,76	(6,13)	9,82	11,50	2,78	(7,46)	2,03	4,92	5,97	(7,34)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(45,64)	38,89	(9,12)	48,01	(39,35)	32,73	(8,56)	42,62	(38,93)	19,41	0,74
Pembentukan Modal Tetap Bruto	(3,26)	0,94	1,52	5,10	(2,67)	0,12	2,17	4,66	(4,54)	3,50	(0,36)
Ekspor Luar Negeri	(6,17)	(0,52)	(8,93)	6,44	(15,72)	9,95	7,25	9,58	(5,44)	(8,91)	3,44
Impor Luar Negeri	(13,48)	19,80	70,80	20,42	14,85	(18,70)	(2,76)	36,90	(17,07)	(11,53)	(7,67)
<b>PDRB</b>	<b>(0,09)</b>	<b>4,57</b>	<b>2,39</b>	<b>(1,90)</b>	<b>0,02</b>	<b>4,47</b>	<b>2,47</b>	<b>(1,85)</b>	<b>0,16</b>	<b>4,65</b>	<b>2,25</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pada berbagai sektor ekonomi. Di samping itu, penyaluran kredit rumah tinggal yang disalurkan oleh perbankan juga turut mengalami perbaikan pertumbuhan pada triwulan III 2025. Kredit rumah tinggal tercatat tumbuh sebesar 10,36% (yo), lebih baik dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 9,43% (yo). Perbaikan kinerja penyaluran kredit rumah tinggal didorong oleh faktor akselerasi program 3 juta rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman semakin masif untuk diperluas sejak triwulan III 2025.

Sementara itu, kinerja rumah tangga pada triwulan III 2025 sedikit tertahan oleh pelemahan permintaan pada konsumsi kendaraan bermotor. Hal tersebut tercermin pada kredit kendaraan bermotor yang tercatat tumbuh terbatas sebesar 4,01% (yo) pada triwulan III 2025, atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 12,96% (yo). Selanjutnya, pelemahan kinerja juga tercermin pada tingkat penjualan kendaraan bermotor roda 2, roda 3, dan roda 4 pada triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 7,89% (yo) atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,35% (yo) (Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, 2025). Selain itu, terbatasnya hari libur atau *long weekend* pada triwulan III 2025 menjadi faktor penahan terbatasnya aktivitas masyarakat untuk melakukan aktivitas liburan/leisure dan tambahan konsumsi barang-barang tersier.

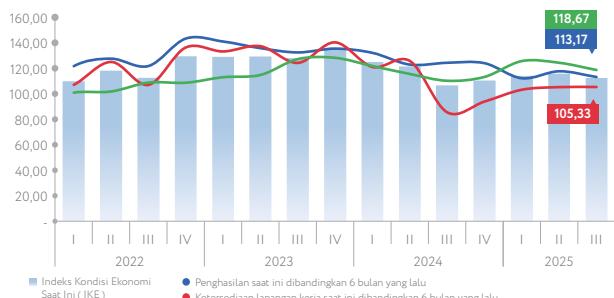
**Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh akseleratif dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya.** Pada triwulan III 2025, kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 3,65% (yo), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi sebesar

5,91% (yo). Di sisi lain, secara triwulanan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,74% (qtq), lebih lambat dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh akseleratif sebesar 18,82% (qtq). Perkembangan ini sejalan dengan pola historisnya dimana pertumbuhan pada triwulan III secara triwulanan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan secara tahunan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan didorong oleh percepatan penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada triwulan III 2025 di Sumatera Selatan. Adapun realisasi TKD pada triwulan III 2025 mencapai Rp25,29 triliun (74,16% dari pagu), mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang hanya terealisasi sebesar Rp14,54 triliun (43,23% dari pagu).

Akselerasi penyaluran TKD pada triwulan III 2025 didorong oleh peningkatan penyaluran 2 (dua) komponen utama penyusun TKD. Pertama, penyaluran DBH yang mencapai Rp9,16 triliun pada triwulan III 2025 atau meningkat sebesar 32,94% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6,89 triliun. Peningkatan realisasi DBH juga sejalan dengan adanya peningkatan pagu DBH pada tahun 2025. Selanjutnya, komponen kedua adalah DAK Non Fisik. Realisasi komponen tersebut tercatat sebesar Rp3,45 triliun pada triwulan III 2025 atau meningkat sebesar 9,17% dibandingkan dengan triwulan III 2024.

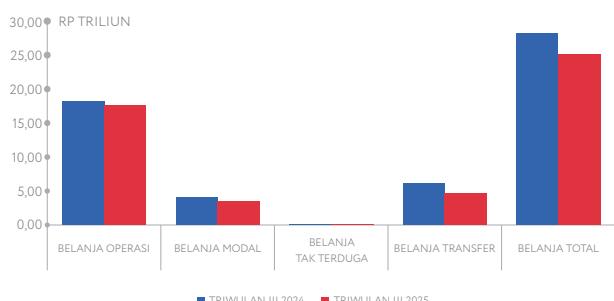
Selanjutnya, lonjakan realisasi pada triwulan III 2025 juga didorong oleh pembukaan blokir sebagian anggaran yang baru dimulai pada akhir triwulan II 2025 yang berimplikasi adanya realisasi yang sangat masif pada triwulan III 2025. Hal tersebut tercermin pada realisasi APBD triwulan III 2025 yang mencapai Rp25,30 triliun atau meningkat 83,53% dibandingkan dengan triwulan

**Grafik 1.3 Indeks Konsumsi Saat Ini (IKE) Survei Konsumen Bank Indonesia)**



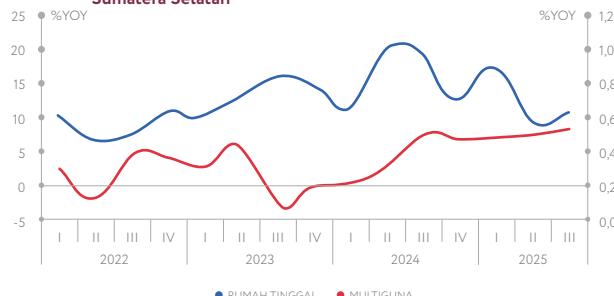
Sumber : Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.5 Realisasi Belanja APBD Sumatera Selatan**



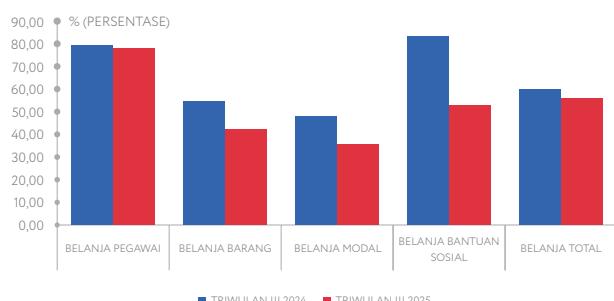
Sumber: BPKAD Sumsel, diolah

**Grafik 1.4 Pertumbuhan Kredit Multiguna dan Ruko/Rukan Sumatera Selatan**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.6 Realisasi Belanja APBN di Sumatera Selatan**



Sumber: Kamwil DPPb Sumsel, diolah

sebelumnya yang hanya sebesar Rp13,79 triliun (Grafik 1-6). Hal yang sama juga terjadi pada APBN dimana realisasi APBN pada triwulan III 2025 mencapai 55,86% terhadap pagu atau meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat realisasi sebesar 34,08% terhadap pagu (Grafik 1-7).

Percepatan realisasi belanja pemerintah di Sumatera Selatan juga didukung oleh belanja berbagai program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Selatan. Program tersebut diantaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, sekolah rakyat, dan program strategis lainnya (Kanwil DJPb Sumatera Selatan, 2025). Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus turut serta dalam mendukung percepatan realisasi belanja pemerintah melalui digitalisasi ekonomi keuangan di daerah pada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta perluasan *merchant QRIS* terutama UMKM.

## 1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)/Investasi

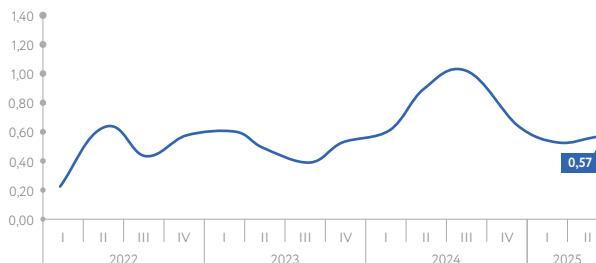
**Kinerja investasi pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Kinerja investasi pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 3,05% (yo), atau lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,66% (yo). Faktor yang menyebabkan adanya perlambatan kinerja investasi pada triwulan III 2025 adalah terbatasnya aktivitas investasi berupa pembelian mesin, peralatan, kendaraan bermotor, dan hal-lain yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta pada triwulan III 2025. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan pertumbuhan triwulan, kinerja investasi mengalami pertumbuhan terkontraksi sebesar 0,36% (qtq) sepanjang triwulan

III 2025 atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,50% (qtq). Jika ditinjau berdasarkan tren triwulan, terdapat perbedaan tren pertumbuhan PMTB pada tahun 2025 dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan aktivitas investasi pada triwulan III dan terus berlanjut hingga triwulan IV setiap tahunnya.

Jika ditinjau berdasarkan sub komponennya, faktor penahan kinerja investasi pada triwulan III 2025 utamanya berasal dari subkomponen investasi non bangunan. Sub komponen investasi tersebut tercatat tumbuh terkontraksi sebesar 10,19% (yo), atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh terkontraksi sebesar 0,10% (yo). Hal tersebut tercermin dari realisasi impor barang modal dan impor bahan baku yang terkontraksi semakin dalam pada triwulan III 2025. Realisasi impor barang modal pada triwulan III 2025 tercatat terkontraksi sebesar 60,72% (yo), atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang terkontraksi sebesar 47,17% (yo). Hal yang sama juga terjadi pada impor bahan baku yang terkontraksi sebesar 45,91% (yo) pada triwulan III 2025. Kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat terkontraksi sebesar 34,71% (yo).

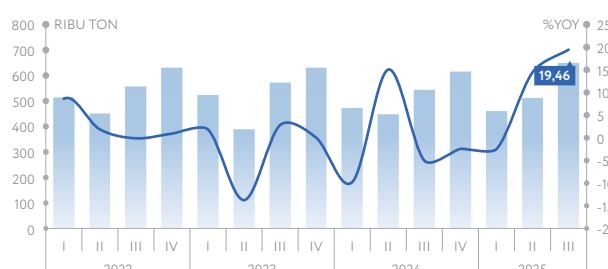
Selanjutnya, subsektor investasi bangunan tercatat tumbuh positif meskipun tidak lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Subkomponen investasi tersebut tercatat tumbuh sebesar 5,26% (yo) pada triwulan III 2025 atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,62% (yo). Perlambatan kinerja investasi juga sejalan dengan hasil *liaison* KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dimana *likert scale* investasi juga mencatatkan perlambatan pada triwulan laporan

Grafik 1.7 Likert scale investasi



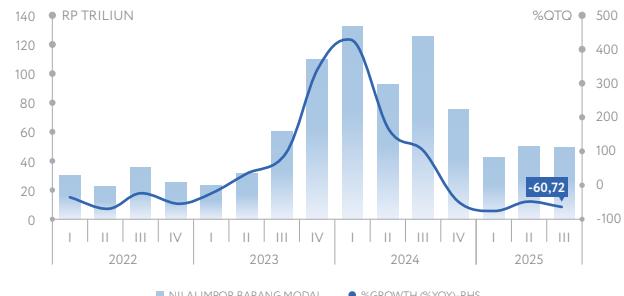
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.8 Volume Penjualan Semen di Sumatera Selatan



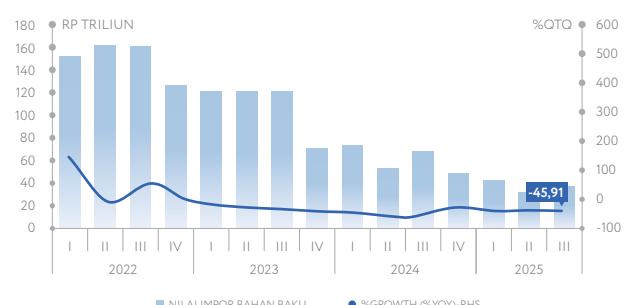
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.9 Nilai Impor Barang Modal Sumatera Selatan



Sumber: DIBK Kemenkeu, diolah

Grafik 1.10 Nilai Impor Bahan Baku Sumatera Selatan



Sumber: DIBK Kemenkeu, diolah

menjadi 0,50 dari 0,57 pada triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan tendensi pelaku usaha di Sumatera Selatan yang melakukan realisasi investasi lebih rendah pada triwulan III 2025 (Grafik 1-7).

Selain itu, tetap tumbuhnya kinerja investasi bangunan juga tercermin pada tingkat **penjualan semen di Sumatera Selatan juga tercatat tumbuh lebih baik**. Tingkat penjualan semen pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 19,46% (yoY), atau tumbuh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,46% (yoY) (Grafik 1-8).

### 1.2.3 Ekspor Luar Negeri

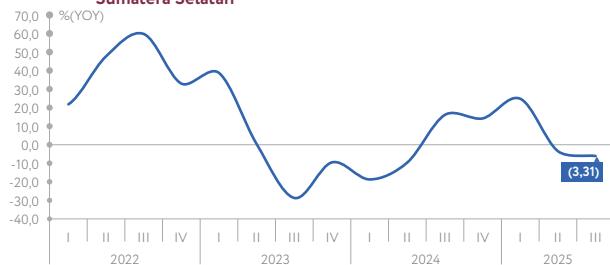
**Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya.** Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat terkontraksi sebesar 6,07% (yoY), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,49% (yoY). Kinerja ekspor yang terkontraksi pada triwulan III 2025 disebabkan oleh harga komoditas unggulan Sumatera Selatan yang berada pada tren penurunan, khususnya karet dan batubara. Harga karet pada triwulan III 2025 tercatat terkontraksi sebesar USD2,16/kg atau terkontraksi sebesar 8,59% (yoY). Adapun harga karet pada triwulan III 2024 mencapai sebesar USD2,37/kg. Selanjutnya, pada komoditas batubara, harga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 21,57% (yoY) pada triwulan III 2025 atau mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 24,27% (yoY). Adapun harga pada periode pelaporan tercatat sebesar USD10,46/mt atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2024 yang

tercatat sebesar USD140,84/mt (Grafik 1-10). Kondisi yang terjadi pada ekspor Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 juga tercermin pada kinerja nilai dan volume ekspor yang juga turut mengalami kontraksi yang dapat dilihat pada Grafik 1-11.

**Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar USD1,52 miliar** atau tercatat mengalami kontraksi sebesar 10,41% (yoY). Kondisi tersebut mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,15% (yoY). Kontribusi ekspor terbesar pada triwulan III 2025 adalah komoditas batu bara yang mencapai USD592,58 juta (pangsa 38,74%), diikuti oleh komoditas *pulp and paper* yang mencapai USD349,85 juta (pangsa 22,87%), kemudian komoditas karet yang mencapai USD344,44 juta (pangsa 22,52%), dan komoditas kelapa sawit dengan nilai sebesar USD62,19 juta (pangsa 4,07%) (Grafik 1-17).

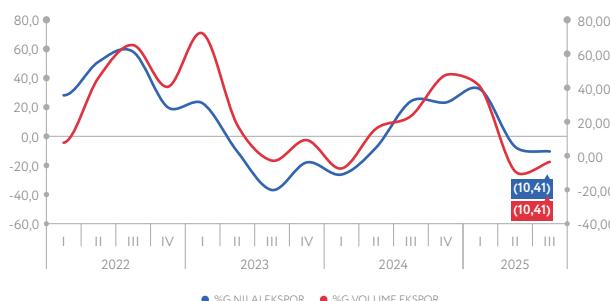
**Seperti triwulan sebelumnya, pangsa ekspor komoditas terbesar pada triwulan III 2025 adalah komoditas batu bara.** Pada triwulan laporan, kinerja ekspor batu bara tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan (Grafik 1-13). Ekspor batu bara pada triwulan laporan tercatat USD592,58 juta atau tumbuh terkontraksi sebesar 22,99% (yoY), sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 23,86% (yoY). Perlambatan kinerja ekspor yang masih berlanjut tersebut disebabkan oleh pelemahan permintaan India dan Tiongkok yang gencar meningkatkan produksi domestik. Selain itu, perlambatan kinerja ekspor juga terjadi di tengah tertekannya tingkat harga batu bara global yang melemah akibat *oversupply* di negara mitra. Pelaku usaha juga menghadapi tantangan peningkatan biaya operasional, termasuk kenaikan tarif royalti.

**Grafik 1.11 Perkembangan PDRB Komponen Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan**



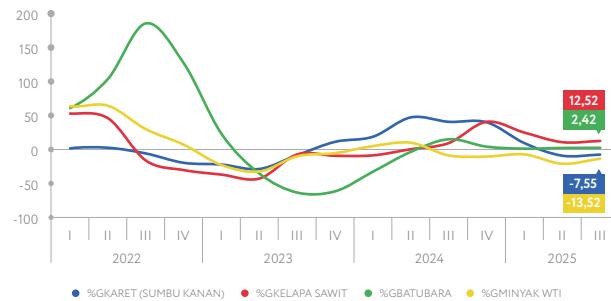
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan diolah

**Grafik 1.13 Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Sumatera Selatan**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.12 Perkembangan Harga Komoditas Internasional**



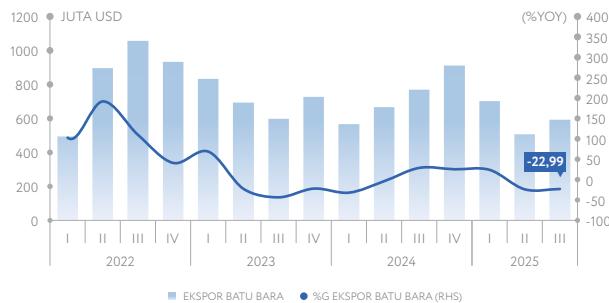
Sumber : Bloomberg, diolah

**Grafik 1.14 Perkembangan Volume Ekspor Impor Sumatera Selatan**



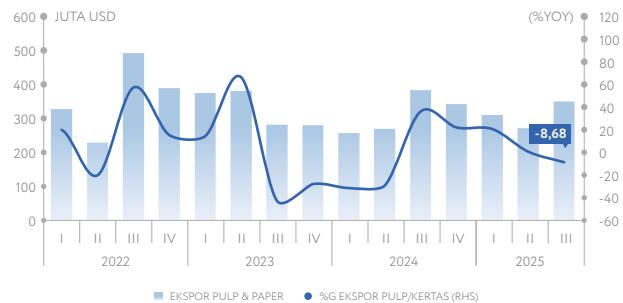
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Ekspor Batu Bara Sumatera Selatan



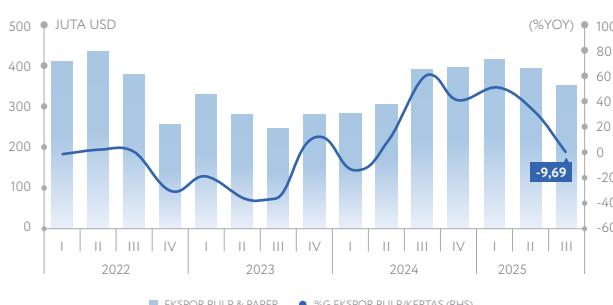
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.17 Perkembangan Nilai Ekspor Pulp&amp;Paper Sumatera Selatan



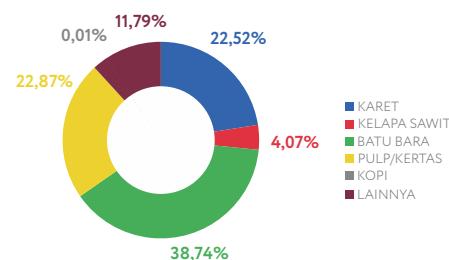
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan Nilai Ekspor Pulp &amp; Paper Sumatera Selatan



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.19 Pangsa Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan berdasarkan Nilai Ekspor

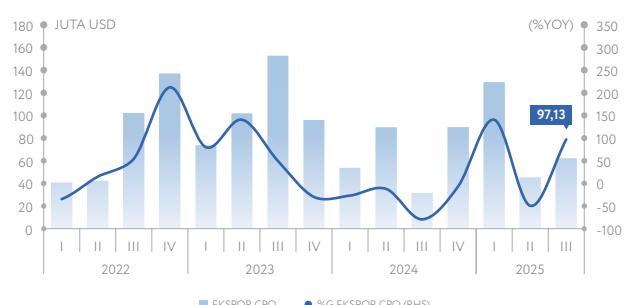


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Nilai ekspor karet** pada triwulan III 2025 juga tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dari 29,34% (yo) menjadi terkontraksi sebesar 9,69% (yo) (Grafik 1-14). Perlambatan kinerja ekspor karet pada triwulan laporannya disebabkan oleh terbatasnya peningkatan produksi pada karet dengan jenis *crumb rubber*, sir 10, dan sir 20 pada triwulan III 2025 dibandingkan dengan triwulan II 2025.

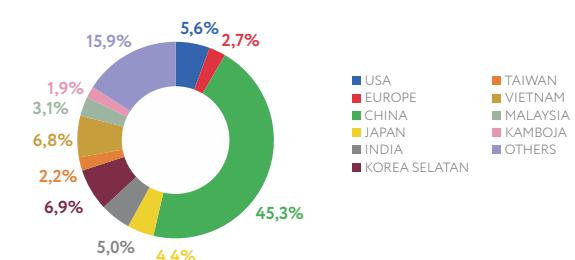
Selanjutnya, kinerja ekspor *pulp & paper* juga tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2025. Kinerja ekspor *pulp & paper* pada triwulan III 2025 tercatat terkontraksi sebesar 8,68% (yo). Kondisi tersebut berbalik arah dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 0,67% (yo). Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh berlanjutnya pelemahan harga komoditas dan permintaan negara mitra dagang utama yang mengalami penurunan akibat kebijakan tarif resiprokal AS.

Grafik 1.18 Perkembangan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Selatan



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.20 Pangsa Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Nilai Ekspor



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Di sisi lain, kinerja ekspor kelapa sawit Sumatera Selatan tercatat mengalami perbaikan pada triwulan III 2025. Kinerja ekspor kelapa sawit pada triwulan laporannya tercatat tumbuh sebesar 97,13% (yo) atau sebesar USD62,19 juta, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi sebesar 97,13% (yo) (Grafik 1-16). Catatan perbaikan kinerja ekspor kelapa sawit tersebut didorong oleh adanya peningkatan harga CPO global. Harga CPO pada triwulan III 2025 tercatat sebesar USD1.013,62/MT, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat sebesar USD945,78/MT.

## 1.2.4 Impor Luar Negeri

Impor luar negeri Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam. Komponen impor luar negeri pada periode laporannya tercatat terkontraksi sebesar 54,33% (yo), lebih lambat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 42,38% (yoY). Penurunan permintaan akan komponen impor utamanya berasal dari peralatan khusus industri (pangsa 29,89%), peralatan industri (pangsa 14,99%), dan peralatan elektronik (pangsa 0,62%).

Secara khusus, penurunan peralatan khusus industri disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan program strategis pemerintah baru di Sumatera Selatan dan terbatasnya penambahan proyek swasta baru pada triwulan III 2025. Jika ditinjau berdasarkan negara asalnya, impor di triwulan III 2025 didominasi berasal dari Tiongkok dengan pangsa sebesar 54,19%, selanjutnya disusul oleh ASEAN (27,39%), India (1,37%), Uni Eropa (7,48%), Amerika Serikat (0,96%), Jepang (0,67%), dan negara lainnya (7,93%) (Grafik 1.22).

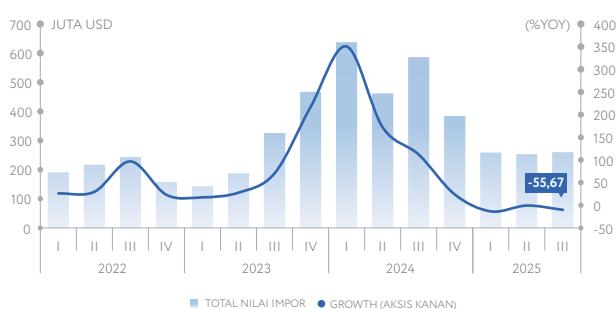
Pertumbuhan impor barang modal pada triwulan III 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 60,72% (yoY), atau mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 47,17% (yoY). Selanjutnya, impor bahan baku juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Pada triwulan III 2025, impor bahan baku tercatat terkontraksi sebesar 45,91% (yoY), atau mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 34,71% (yoY). Sementara itu, pada kelompok impor barang konsumsi mengalami perbaikan pertumbuhan. Kelompok tersebut tercatat terkontraksi sebesar 58,10% (yoY) pada triwulan III 2025, atau mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 88,40% (yoY).

**Tabel 1.4 Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta US\$)**

NILAI	2023			2024			2025			PANGSA (%)
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
<b>Total Nilai Impor</b>	187,2	325,7	467,1	637,2	461,8	586,1	383,6	258,4	253,0	<b>259,8</b>
Peralatan Elektrik	6,9	1,1	8,1	16,5	23,6	34,5	11,5	14,3	4,8	1,6
Besi dan Baja	6,2	11,0	6,7	24,5	7,6	14,2	8,8	2,3	7,4	3,1
Peralatan Industri	37,5	72,9	120,4	157,6	110,1	118,7	74,9	48,9	27,6	39,0
Gandum	11,6	13,5	16,6	24,9	23,1	5,7	7,8	2,7	0,0	9,3
Peralatan Khusus Industri	17,7	51,7	123,5	122,7	108,8	210,0	122,6	74,0	80,3	77,7
										29,89

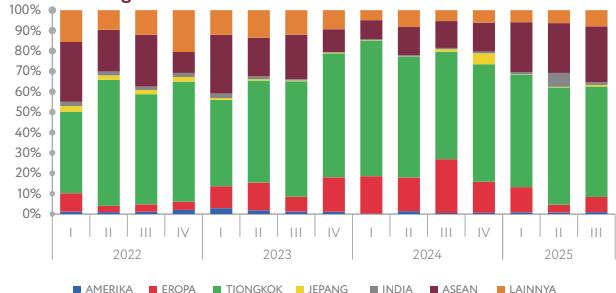
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.21 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Sumatera Selatan**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.22 Perkembangan Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal**



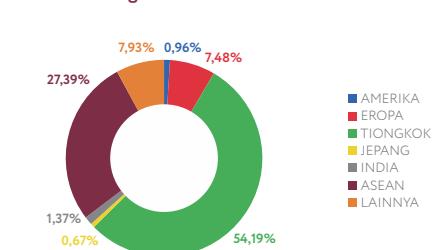
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.22 Perkembangan Volume Impor Provinsi Sumatera Selatan**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.24 Pangsa Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

## 1.3 Perkembangan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

**Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan III 2025** bersumber dari empat lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian (pangsa 24,28%), LU Industri Pengolahan (pangsa 17,81%), LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (pangsa 14,89%), serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 14,13%). Kinerja LU utama tersebut tercatat tetap tumbuh positif, sehingga menjadi penopang perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan laporan (Tabel 1-5). Secara kumulatif keempat LU memberikan kontribusi sebesar 71,11% terhadap struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan utamanya berasal dari peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Adapun yang menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan adalah LU Pertambangan dan Penggalian dan Industri Pengolahan.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan laporan didorong oleh adanya peningkatan signifikan pada luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang semakin kuat turut ditopang oleh kondisi iklim yang lebih stabil pasca-El Niño serta dukungan program pemerintah daerah

Sementara itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tertahannya kinerja LU Pertambangan dan

Penggalian sejalan terbatasnya produksi batu bara akibat adanya gangguan logistik di Kabupaten Lahat. Selain itu, perlambatan pertumbuhan juga terjadi seiring dengan masih berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia di tengah *over supply* minyak dari negara non-OPEC.

Selanjutnya, perlambatan juga terjadi pada LU Industri Pengolahan. Perlambatan pada LU tersebut utama disebabkan adanya hambatan pada produksi batu bara. Selain itu, perlambatan kinerja juga disebabkan oleh terbatasnya peningkatan produksi pada karet dengan jenis *crumb rubber*, sir 10, dan sir 20 pada triwulan III 2025 dibandingkan dengan triwulan II 2025.

### 1.3.1 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

**Pertumbuhan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh terbatas.** Pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 0,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 2025 sebesar 5,93% (yoy).

Deselerasi kinerja pada triwulan III 2025 terjadi terutama pada subsektor pertambangan batu bara dan lignit yang tercatat mengalami penurunan dari 12,92% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi 0,81% (yoy) pada triwulan II 2025. Perlambatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian terjadi sejalan dengan adanya tragedi jembatan ambruk di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat pada akhir Juni 2025. Hal tersebut berimplikasi pada

**Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Tahunan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%yoy)**

SEKTOR	2023		TOTAL	2024				TOTAL	2025		
	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,63	1,92	2,15	2,05	3,38	2,66	2,39	2,59	5,15	2,17	7,79
Pertambangan dan Penggalian	9,86	5,20	7,89	4,19	0,94	3,51	4,71	3,33	3,98	5,93	0,61
Industri Pengolahan	4,27	5,04	3,69	4,64	4,84	4,04	3,91	4,39	3,58	5,58	5,13
Pengadaan Listrik, Gas	3,07	7,66	4,40	8,07	8,89	9,01	7,94	8,48	11,39	4,68	6,06
Pengadaan Air	2,09	3,06	0,33	2,52	2,67	2,16	3,27	2,66	-0,06	1,27	1,98
Konstruksi	3,76	6,82	3,55	6,89	7,28	5,49	4,04	5,89	2,92	8,11	8,09
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,70	7,17	7,60	6,81	7,72	7,33	7,88	7,42	8,36	8,78	8,58
Transportasi dan Pergudangan	5,87	4,36	7,48	2,72	3,74	3,85	3,27	3,44	6,65	4,85	6,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,93	13,56	13,14	9,65	9,57	9,34	9,05	9,39	8,71	10,29	11,58
Informasi dan Komunikasi	3,62	4,11	6,35	6,12	9,88	10,20	9,17	8,84	8,85	4,97	5,39
Jasa Keuangan	3,87	8,41	4,60	10,17	8,08	10,23	0,12	7,09	2,26	2,74	1,94
Real Estate	3,97	5,05	4,28	6,51	8,41	8,81	8,91	8,17	7,31	7,74	7,98
Jasa Perusahaan	3,09	3,92	2,03	3,96	5,07	5,41	6,23	5,18	4,96	6,50	6,36
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,34	-0,02	3,73	10,02	9,95	8,62	8,83	9,35	10,84	-0,75	-0,02
Jasa Pendidikan	-1,07	3,64	2,23	4,94	5,98	6,41	9,43	6,76	7,90	-0,02	4,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,31	-0,26	-0,02	3,67	7,65	4,29	13,62	7,34	5,66	5,96	5,74
Jasa lainnya	-0,09	2,62	1,95	4,92	6,49	5,49	-0,05	4,12	3,90	4,11	4,72
<b>P D R B</b>	<b>5,08</b>	<b>4,94</b>	<b>5,08</b>	<b>5,06</b>	<b>4,96</b>	<b>5,04</b>	<b>5,07</b>	<b>5,03</b>	<b>5,22</b>	<b>5,42</b>	<b>5,20</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

terganggunya jalur logistik batu bara, khususnya pada perusahaan-perusahaan batu bara yang berada di wilayah Lahat. Selain itu, perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh terkontraksi pada triwulan III 2025 sebesar 2,46% (yoY). Adapun pertumbuhan pada triwulan sebelumnya tercatat terkontraksi sebesar 0,06%. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan masih berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia di tengah over supply minyak dari negara non-OPEC. Selain itu, permintaan minyak dan gas bumi domestik juga mengalami deselerasi di tengah lemahnya aktivitas ekonomi di tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.

**Disisi lain, pertambangan dan penggalian lainnya menjadi subsektor tunggal yang mencatatkan penguatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Pertumbuhan kinerja subsektor pertambangan dan penggalian lainnya di triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,91% (yoY), atau berbalik arah dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang terkontraksi sebesar 0,14%.

**Tertahannya kinerja LU Pertambangan pada triwulan III 2025 juga disebabkan oleh harga batu bara dan minyak mentah yang tumbuh lebih lemah.** Harga batu bara internasional pada triwulan laporan tercatat sebesar USD110,46/MT atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar USD140,84/MT. Kondisi pada periode pelaporan mengalami penurunan sebesar 21,57% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, penurunan juga terjadi pada harga minyak mentah (WTI) yang tercatat sebesar \$65,05/bbl pada triwulan III 2025. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebesar 13,52% (yoY), dimana pada triwulan III 2024 tercatat sebesar \$75,21/bbl.

**Di tengah terbatasnya kinerja LU pertambangan dan penggalian, ekspor batu bara tercatat terkontraksi pada triwulan III 2025.** Pertumbuhan nilai ekspor batu bara Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat terkontraksi sebesar 22,99% (yoY), atau tetap berada pada zona kontraksi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 23,86% (yoY). Masih terjadinya perlambatan kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh pelemahan permintaan India dan Tiongkok yang gencar meningkatkan produksi domestik. Selain itu, perlambatan kinerja ekspor juga terjadi di tengah tertekannya tingkat harga batu bara global yang melemah akibat oversupply di negara mitra. Pelaku usaha juga menghadapi tantangan peningkatan biaya operasional, termasuk kenaikan tarif royalti.

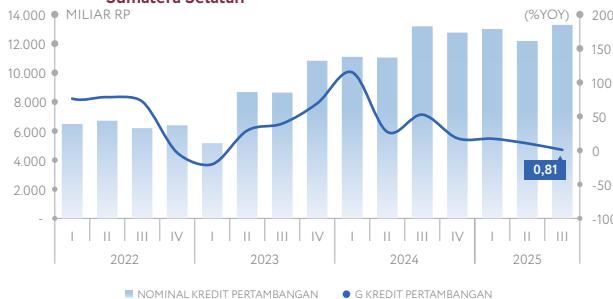
**Selain itu, perlambatan kinerja LU Pertambangan juga tertahan oleh tingkat penyaluran kredit yang mengalami perlambatan pada triwulan laporan.** Kredit pertambangan pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp13,28 triliun atau tumbuh 0,81% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 10,33% (yoY). Meskipun demikian, tetap tumbuhnya kredit pertambangan pada triwulan III 2025 menandakan pelaku usaha cukup optimis dalam melakukan ekspansi usaha dalam jangka pendek.

Selain itu, meningkatnya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian terkonfirmasi pula dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada kinerja LU Pertambangan dan Penggalian. Realisasi Saldo Bersih Tertimbangan (SBT) kegiatan usaha pertambangan tercatat sebesar 0,00% pada triwulan laporan, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sama yakni 0,00%.

**Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Triwulan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%qtq)**

SEKTOR	2023			2024			2025			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,43	2,91	-12,38	9,43	4,58	2,20	-12,54	12,36	1,73	7,82
Pertambangan dan Penggalian	11,48	5,61	-6,28	-5,64	8,01	8,30	-5,15	-6,26	10,04	2,83
Industri Pengolahan	1,11	1,28	1,53	0,67	1,48	0,51	1,36	0,35	3,27	0,13
Pengadaan Listrik, Gas	6,11	3,16	1,64	-2,87	6,91	3,28	0,64	0,23	0,48	4,64
Pengadaan Air	-0,22	1,51	1,76	-0,53	-0,88	1,01	2,86	-3,73	1,24	1,72
Konstruksi	-0,01	2,35	4,40	0,16	0,35	0,64	2,97	-1,03	5,41	0,63
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,13	2,91	1,66	-0,04	2,97	2,54	2,18	0,40	3,40	2,29
Transportasi dan Pergudangan	4,70	-1,17	2,42	-3,08	5,75	-1,07	1,85	0,09	3,97	0,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,01	0,26	5,83	-4,32	7,93	0,05	5,54	-4,61	9,49	1,22
Informasi dan Komunikasi	-0,19	-0,14	3,95	2,43	3,34	0,15	2,98	2,13	-0,34	0,55
Jasa Keuangan	1,74	2,75	1,72	3,60	-0,18	4,78	-7,61	5,84	0,27	3,96
Real Estate	0,13	0,92	3,22	2,11	1,92	1,29	3,32	0,61	2,32	1,52
Jasa Perusahaan	0,12	1,96	2,89	-1,02	1,19	2,29	3,69	-2,20	2,67	2,16
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,86	-8,78	2,15	-3,94	22,78	-9,88	2,34	-2,11	9,94	-9,22
Jasa Pendidikan	5,81	-0,35	6,94	-6,93	6,86	0,05	9,98	-8,23	-0,98	4,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,07	3,39	0,52	-0,17	3,76	0,16	9,52	-7,17	4,06	-0,05
Jasa lainnya	-0,23	2,22	6,96	-3,82	1,26	1,26	1,35	-0,02	1,46	1,86
<b>PDRB</b>	<b>4,57</b>	<b>2,39</b>	<b>-1,90</b>	<b>0,02</b>	<b>4,47</b>	<b>2,47</b>	<b>-1,85</b>	<b>0,16</b>	<b>4,65</b>	<b>2,25</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 1.25 Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Pengalian Sumatera Selatan**

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

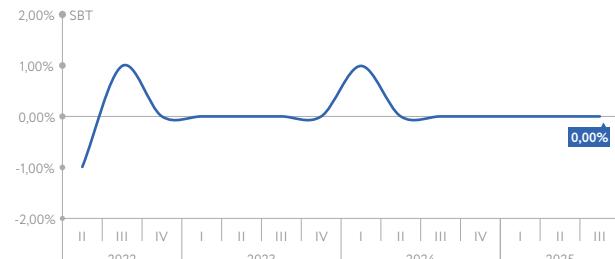
### 1.3.2 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan III 2025, pertumbuhan LU Industri Pengolahan tercatat mengalami perlambatan. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 5,13% (yo), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,54% (yo).

Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan terutama bersumber dari terbatasnya kinerja subsektor industri batu bara dan pengilangan migas. Adapun subsektor industri batu bara dan pengilangan migas mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,02% (yo) pada triwulan III 2025. Kinerja subsektor tersebut berbalik arah dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,02% (yo). Perlambatan kinerja subsektor tersebut sejalan dengan hambatan pada produksi batu bara seiring dengan adanya hambatan logistik batu bara. Selain itu, perlambatan kinerja juga terjadi pada salah satu industri non-migas yaitu subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik. Subsektor tersebut mengalami kontraksi sebesar 0,02% (yo) pada triwulan III 2025 atau mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang mampu tumbuh positif sebesar 2,67% (yo). Perlambatan kinerja industri tersebut disebabkan oleh terbatasnya peningkatan produksi pada karet dengan jenis *crumb rubber*, sir 10, dan sir 20 pada triwulan III 2025 dibandingkan dengan triwulan II 2025.

Adapun pendorong pertumbuhan LU Industri Pengolahan adalah dari kinerja subsektor non-migas, khususnya industri makanan dan minuman. Kinerja industri tersebut pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 9,59% (yo) atau lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,43% (yo). Perbaikan kinerja industri makanan dan minuman didorong oleh perbaikan harga CPO yang tercatat tumbuh sebesar 8,16% (yo) atau sebesar USD1.013,62/MT pada triwulan III 2025. Selain itu, tetap tumbuhnya industri makanan dan minuman pada triwulan III 2025 didorong oleh adanya peningkatan kapasitas produksi sebesar 36,45% (yo) pada triwulan pelaporan (BPS Sumatera Selatan, 2025).

Jika ditinjau berdasarkan komoditasnya, terdapat kecenderungan bahwa peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan untuk aktivitas domestik. Hal tersebut sejalan dengan aktivitas komoditas ekspor unggulan di Sumatera Selatan cenderung mengalami perlambatan.

**Grafik 1.26 Kegiatan Usaha Pertambangan di Sumatera Selatan**

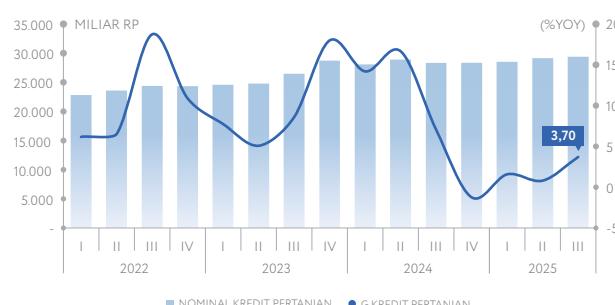
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, diolah

### 1.3.3 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

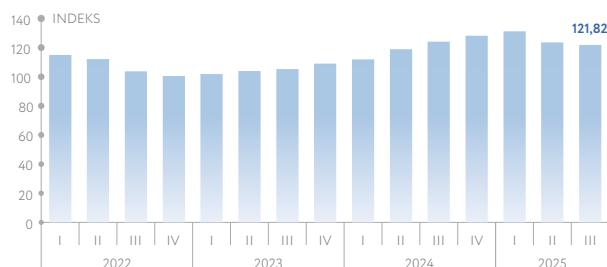
Pada triwulan III 2025, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencatatkan akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat tumbuh sebesar 7,79% (yo), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,17% (yo). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan triwulan tercatat tumbuh sebesar 7,82% (qtq), mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 1,73% (qtq).

Akselerasi kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 terutama didorong oleh adanya peningkatan signifikan pada luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Luas lahan padi Sumatera Selatan tumbuh akseleratif sebesar 19,75% (yo) pada triwulan III 2025 atau meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 7,72% (yo). Hal tersebut juga sejalan dengan tingkat produksi yang tumbuh hingga 26,62% (yo) pada triwulan III 2025. Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,19% (yo). Capaian kinerja tersebut sejalan semakin insentifnya pelaksanaan berbagai program swasembada pangan dilakukan di Sumatera Selatan, diantaranya OPLA, Cetak Sawah, padi gogo, serta dibarengi dengan dukungan perluasan irigasi.

Selanjutnya, pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang semakin kuat turut ditopang oleh kondisi iklim yang lebih stabil pasca-El Niño serta dukungan program pemerintah

**Grafik 1.27 Penyaluran Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.28 Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan**

Sumber: BPS, diolah

daerah, khususnya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang secara keseluruhan mendorong peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

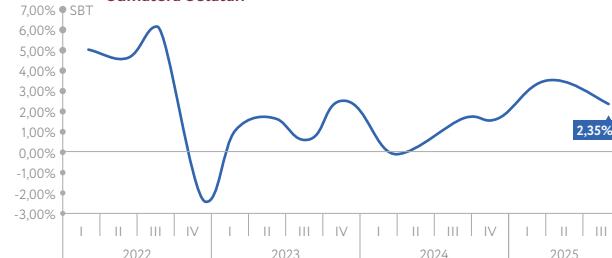
**Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang membaik sejalan dengan kinerja penyaluran kredit yang mengalami perbaikan.** Kredit pertanian pada triwulan III 2025 tercatat bertumbuh sebesar 3,70% (yoy), mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,80% (yoy). Selain itu, risiko kredit pertanian yang dilihat dari NPL telah berada dalam batas aman atau senilai 2,16%, berada di batas bawah (*threshold*) yang ditetapkan sebesar 5,00%.

Namun demikian, membaiknya kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode pelaporan masih belum diikuti dengan perbaikan daya beli petani yang tercermin pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 121,82, menurun dibandingkan indeks pada triwulan sebelumnya sebesar 123,62. Perlambatan NTP tersebut utamanya bersumber dari adanya pelemahan penerimaan pendapatan yang diterima oleh para petani tanaman perkebunan rakyat. Kondisi tersebut tercermin pada indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) yang mengalami penurunan dari 133,48 pada triwulan II 2025 menjadi 132,66 pada triwulan III 2025.

### 1.3.4 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada Triwulan III 2025, kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Secara tahunan, lapangan usaha ini tumbuh sebesar 8,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,85% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan secara triwulanan juga mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 2,29% (qtq), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh lebih baik sebesar 3,47% (qtq).

**Perlambatan pertumbuhan pada LU tersebut terutama disebabkan oleh tertahannya kinerja subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta perdagangan besar dan eceran.** Adapun subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar -0,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,35% (yoy). Subsektor ini memberikan kontribusi dominan

**Grafik 1.29 Kegiatan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Sumatera Selatan**

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, diolah

terhadap keseluruhan kinerja lapangan usaha seiring dengan tingkat penjualan mobil yang juga turut mengalami perlambatan pada triwulan III 2025. Hal tersebut tercermin pada tingkat penjualan kendaraan bermotor pada triwulan III 2025 tercatat terkontraksi sebesar 7,89% (yoy) atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,35% (yoy). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran menurun dari 3,53% pada triwulan II 2025 menjadi sebesar 2,35% pada triwulan III 2025. Hal tersebut mengindikasikan adanya perlambatan kinerja pelaku usaha di subsektor perdagangan besar dan eceran.

Selanjutnya, subsektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan pertumbuhan yang juga mengalami penurunan sebesar 10,29% (yoy) pada triwulan III 2025, dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 10,32% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang stabil dengan kecenderungan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

### 1.3.5 Lapangan Usaha Konstruksi

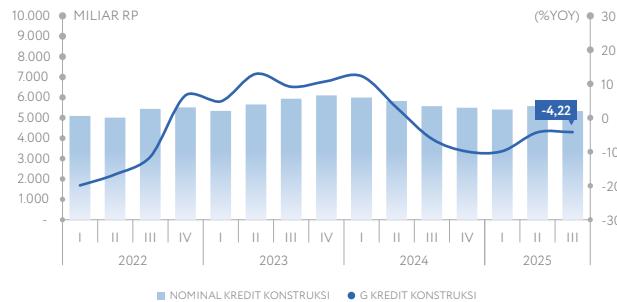
**Pada triwulan III 2025, LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang stabil.** Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 8,09% (yoy), cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,11% (yoy). Secara triwulanan, LU Konstruksi tercatat mengalami perlambatan sebesar 0,63% (qtq), setelah pada triwulan sebelumnya masih mencatatkan pertumbuhan akseleratif sebesar 5,41% (qtq).

**Tetap terjaganya laju pertumbuhan LU Konstruksi pada triwulan III 2025 terkonfirmasi dari tingkat kredit yang disalurkan pada sektor konstruksi di Sumatera Selatan.** Pada triwulan III 2025, kredit yang disalurkan oleh perbankan pada LU Konstruksi tercatat terkontraksi sebesar 4,22% (yoy). Kontraksi tersebut tercatat tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,28% (yoy).

**Kinerja LU Konstruksi yang tumbuh membaik seiring dengan peningkatan realisasi penjualan semen di Sumatera Selatan pada triwulan III 2025.** Tingkat penjualan semen pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 19,46% (yoy), atau mengalami penguatan dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,46% (yoy) (Grafik 1-8).

Di sisi lain, kinerja sektor konstruksi tertahan oleh mundurnya target penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan menjadi tahun 2025 dan 2026. Sejumlah pengerjaan PSN yang mendukung sektor pertanian dan penyelesaiannya mundur diantaranya yakni Bendungan Tiga Dihaji, Jaringan Irigasi Lematang, dan Jaringan Irigasi Lempuing.

**Grafik 1.30 Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi Sumatera Selatan**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

## BOKS 1:

## 2<sup>nd</sup> Sriwijaya Economic Forum 2025 Jadi Momentum Penguatan Iklim Investasi dan Pemutakhiran Arah Ekonomi Sumatera Selatan



Gambar Boks A.1. Foto Bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bappeda Prov. Sumsel, dan Narasumber

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan 2<sup>nd</sup> Sriwijaya Economic Forum 2025 pada 21 Oktober 2025 di Palembang. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong investasi daerah serta memberikan update kondisi makroekonomi Sumatera Selatan dan prospek pertumbuhan ke depan.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bp. Edward Candra, yang menegaskan bahwa penguatan investasi daerah memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan agar realisasi investasi dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Forum ini menghadirkan sesi diskusi talkshow yang melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Apindo Sumatera Selatan, dengan jurnalis nasional sebagai moderator. Diskusi interaktif tersebut membahas peluang dan tantangan investasi di Sumsel, termasuk upaya memperkuat daya saing daerah melalui kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pengembangan proyek *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sebagai instrumen promosi investasi konkret.

Secara khusus, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumsel menyoroti perlunya kepastian regulasi, percepatan perizinan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan investor. Sementara BKPM menekankan pentingnya pemetaan proyek prioritas dan kolaborasi lintas level pemerintahan guna mempercepat masuknya modal baru ke Sumatera Selatan.

Diskusi dipertajam melalui sesi tanggapan dari Ketua ISEI Sumatera Selatan, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, serta Sekretaris Dinas DPMPTSP Sumatera Selatan, yang menyoroti perlunya sinkronisasi antara kebijakan investasi, perencanaan pembangunan, dan kesiapan proyek daerah agar dapat menarik minat investor secara berkelanjutan. Selain itu, Bea Cukai Sumatera Selatan turut menambahkan bahwa berbagai fasilitas dan insentif fiskal—termasuk kemudahan impor bahan baku, pembebasan bea masuk untuk proyek strategis, dan program kawasan berikat—dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menggenjot investasi dan ekspor di Sumsel.

Melalui forum ini, Sumatera Selatan tidak hanya memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi yang kompetitif, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Sriwijaya Economic Forum diharapkan menjadi agenda tahunan yang berfungsi sebagai wadah komunikasi kebijakan, promosi investasi, dan pembentukan sinergi multipihak dalam memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi daerah.



Gambar Boks A.2. Sesi Diskusi Bersama Ketua APINDO Sumsel dan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

## BOKS 2 :

## Temu Responden 2025: Percepatan Digitalisasi Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Sumatera Selatan yang Tangguh



Gambar Boks B.1. Foto Bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bersama Para Penyedia Data Terbaik Tahun 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan acara **Temu Responden 2025** yang berlangsung pada 14 Oktober 2025 di kota Palembang. Kegiatan tahunan ini merupakan wujud apresiasi Bank Indonesia kepada para responden survei Bank Indonesia atas kontribusi aktif dalam penyediaan data dan informasi ekonomi yang menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bp. Bambang Pramono, menyampaikan bahwa dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia senantiasa memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada kantor pusat. Secara khusus, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh responden atas kontribusi mereka dalam penyediaan data dan informasi yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa **dukungan responden menjadi komponen penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia**.

Sebagai bentuk apresiasi, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan kepada para penyedia data terbaik dalam delapan kategori:

- A. Responden Terbaik Kategori Penyedia Data Liaison: PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang
- B. Responden Terbaik Kategori Penyedia Data Survei Kegiatan Dunia Usaha: PTPN IV Regional 7
- C. Responden Terbaik Kategori Penyedia Data Perkembangan Properti Komersial: Opi Mall
- D. Responden Terbaik Kategori Penyedia Data Survei Penjualan Eceran: Toko Sepatu Samudera

- E. Responden Terbaik Kategori Penyedia Data Survei Harga Properti Residensial: PT Sekawan Kontrindo
- F. Responden Terbaik Kategori Penyedia Data Survei Pemantauan Harga: Pak Hermansyah
- G. Mitra Strategis Terbaik dalam Penyediaan Data Ekonomi Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
- H. Surveyor Terbaik: Yulia Putri (PT Sigma Research)

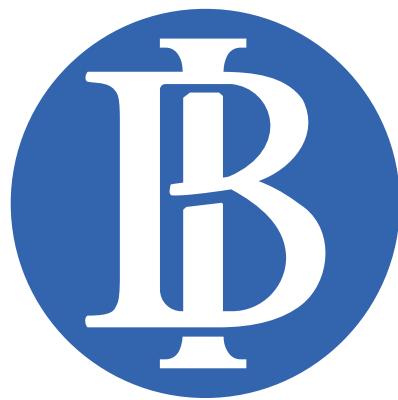
Acara ini turut dimeriahkan dengan seminar motivasi oleh *motivational speaker* nasional Andrie Wongso, yang membawakan materi bertema “Semangat Usaha di Era Digital.” Selain itu, digelar pula *talkshow* inspiratif yang menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Aviliani (Ekonom Senior INDEF), Marpaleni (Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan), dan Rafael Tan (*Entrepreneur*). Dalam sesi tersebut, para narasumber berbagi pandangan mengenai pentingnya kolaborasi, inovasi, dan adaptasi digital dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan regional. Rafael Tan menuturkan bahwa di era digital, pelaku usaha perlu terus berinovasi dan berkreasi dalam memasarkan produk, khususnya melalui media sosial. Sementara itu, Aviliani menekankan bahwa digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS memberikan banyak manfaat, baik bagi pelaku usaha maupun perbankan. “Dengan QRIS, transaksi menjadi lebih mudah dan transparan. Data transaksi yang terekam juga membantu perbankan dalam melakukan *credit scoring* bagi para *merchant*, sehingga memperluas akses pembiayaan,” jelas Aviliani. Rafael turut menambahkan bahwa penggunaan QRIS juga sangat membantu pelaku UMKM, karena transaksi menjadi lebih praktis tanpa perlu menyediakan uang kembalian.



Gambar Boks B.2. Foto Bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bersama Narasumber Temu Responden



Melalui kegiatan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan mendorong sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh responden dapat terus diperkuat guna mendukung percepatan digitalisasi dan mewujudkan perekonomian Sumatera Selatan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Bank Indonesia turut memaparkan data dan analisis ekonomi yang telah diolah dan dapat diakses oleh masyarakat melalui publikasi resmi, seperti Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) dan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Selatan.



02

---

## Perkembangan Keuangan Daerah



**Kinerja keuangan pemerintah pada triwulan III 2025 menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang relatif tinggi, meski untuk belanja termoderasi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan transfer ke daerah (TKD).**

- Realisasi pendapatan pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp42,95 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp42,77 triliun. Selain itu, realisasi pendapatan tersebut secara persentase meningkat dari 60,13% pada triwulan III 2024 menjadi 64,87% pada triwulan III 2025, yang terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan pajak pemerintah pusat seiring peningkatan setoran masa PPN dan PPh Badan dari komoditas unggulan.
- Selain itu, realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III 2025 mencapai Rp59,56 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp64,35 triliun. Secara persentase, realisasi belanja tersebut turut menunjukkan penurunan dari 61,24% pada tahun 2024 menjadi 59,27% pada triwulan III 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan eksekusi belanja belum dapat dilaksanakan dan/atau mengalami penundaan.
- Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) triwulan III 2025 sebesar 74,16% dari pagu, naik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 71,47% dari pagu. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pagu yang mengakibatkan kenaikan realisasi pada DBH.

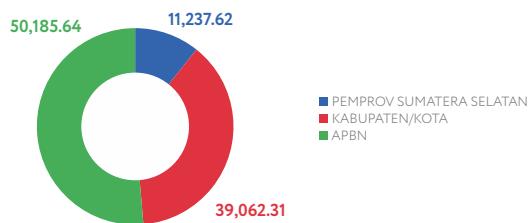
## 2.1 Gambaran Umum

Pada tahun 2025, pendapatan daerah pada APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan sebesar Rp66,2 triliun, menurun 6,94% (yoY) dibandingkan tahun 2024. Target pendapatan tersebut terdiri dari target APBD Pemerintah Provinsi sebesar Rp11,13 triliun (pangsa 16,81%), target APBD gabungan Kabupaten/Kota sebesar Rp37,45 triliun (pangsa 56,58%), dan target APBN Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp17,62 triliun (pangsa 26,61%).

Hingga akhir triwulan III 2025, realisasi pendapatan pemerintah<sup>1</sup> di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp42,95 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan secara persentase turut meningkat dari 60,13% pada triwulan III 2024 menjadi 64,87% di triwulan III 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan pajak pemerintah pusat seiring peningkatan setoran masa PPN dan PPh Badan dari komoditas unggulan serta lebih rendahnya target penerimaan negara di Sumatera Selatan dan provinsi pada tahun ini. Berdasarkan tingkat, realisasi tersebut terdiri dari pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp6,54 triliun atau 58,8% dari target, pendapatan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp25,73 triliun atau 68,69% dari target, serta pendapatan APBN K/L sebesar Rp10,68 triliun atau 60,59% dari target.

Sementara itu, pagu anggaran belanja pemerintah di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp100,49 triliun, menurun sebesar 4,38% (yoY) dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pagu anggaran belanja APBN. Alokasi anggaran belanja terdiri dari tiga komponen yaitu APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp11,24 triliun (pangsa 11,18%), APBD gabungan kabupaten/kota senilai Rp39,06 triliun (pangsa 38,87%), dan APBN yang dialokasikan untuk wilayah Sumatera Selatan

Grafik 2.1 Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III 2025 (Rp Triliun)



Sumber: BPKAD dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Rp miliar)

URAIAN	Tw III 2024			Tw III 2025		
	Target Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Target Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi
<b>Pendapatan</b>	<b>48.682,42</b>	<b>32.768,83</b>	<b>67,31%</b>	<b>48.583,43</b>	<b>32.271,32</b>	<b>66,42%</b>
Pendapatan Asli Daerah	9.505,58	6.418,46	67,52%	10.268,11	6.682,52	65,08%
Pendapatan Transfer	38.725,29	26.113,18	67,43%	38.156,51	25.479,31	66,78%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	451,55	237,19	52,53%	158,81	109,49	68,95%

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

1. Merupakan konsolidasi pendapatan APBN dan APBD di Provinsi Sumatera Selatan

senilai Rp50,19 triliun (pangsa 49,94%) (Grafik 2-1). Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III 2025 mencapai Rp59,56 triliun atau 59,27% dari pagu, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 61,24% dari pagu.

## 2.2 APBD Wilayah Provinsi Sumatera Selatan<sup>2</sup>

### 2.2.1 Realisasi Pendapatan APBD Sumatera Selatan

Komponen Pendapatan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 65,08%, Pendapatan Transfer terealisasi 66,78%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar 68,95%. Secara keseluruhan realisasi pendapatan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 mencapai Rp32,27 triliun atau 66,42% dari target Rp48,58 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan III 2024 yang mencapai 67,31% (Tabel 2-1).

Secara spasial, persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Muara Enim (81,59% dari target Rp3,47 triliun), diikuti Kota Palembang (78,05% dari target Rp4,64 triliun). Sementara, realisasi terendah berasal dari Kota Lubuk Linggau dengan realisasi sebesar 57% dari target Rp1,15 triliun dan Kabupaten Empat Lawang dengan realisasi sebesar 58,78% dari target Rp1,48 triliun (Grafik 2-2).

#### 2.2.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

##### Secara nominal, realisasi PAD pada triwulan III 2025 meningkat.

Realisasi PAD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 secara keseluruhan sebesar Rp6,68 triliun, meningkat sebesar 4,11% (yoY) dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,42 triliun. Secara persentase, realisasi PAD pada triwulan III 2025 termoderasi menjadi 66,42% dari target anggaran dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 67,31%. Adapun penurunan persentase realisasi PAD disebabkan oleh lebih tingginya target pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun ini yang masing-masing sebesar Rp7,17 triliun dan Rp640,85 miliar. Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Selatan tahun 2025 dilakukan melalui berbagai inovasi, antara lain penguatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota melalui perjanjian kerja sama pertukaran data perpajakan, pengawasan kepatuhan, dan peningkatan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemprov Sumsel juga memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak kendaraan bermotor dengan skema

2. Merupakan APBD konsolidasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

berbeda sesuai kategori, untuk menjaga minat wajib pajak sekaligus memperhatikan aspek sosial ekonomi. Selain itu, dilakukan digitalisasi retribusi dan pengembangan transaksi non-konvensional melalui integrasi dengan e-commerce, optimalisasi BLUD melalui investasi teknologi dan penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan kapabilitas manajerial dan transparansi keuangan BUMD agar mampu menghasilkan laba yang berkelanjutan. Selain itu, berkat berbagai inovasi digitalisasi, Provinsi Sumsel meraih penghargaan Rookie of The Year 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Republik Indonesia (RI) sebagai provinsi paling mendukung kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

### 2.2.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

**Target Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar** dengan pangsa mencapai 78,53% atau sebesar Rp38,16 triliun dari keseluruhan target pendapatan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang secara total sebesar Rp48,58 triliun. Target Pendapatan Transfer ini bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp34,84 triliun (pangsa 91,31%), Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp2,69 triliun (pangsa 7,04%), dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp631,22 miliar (pangsa 1,65%). Hingga triwulan III 2025, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp25,48 triliun (66,78% dari target), lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 67,43%.

### 2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

**Pos lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercatat menurun.** Pada triwulan III 2025, realisasi pos

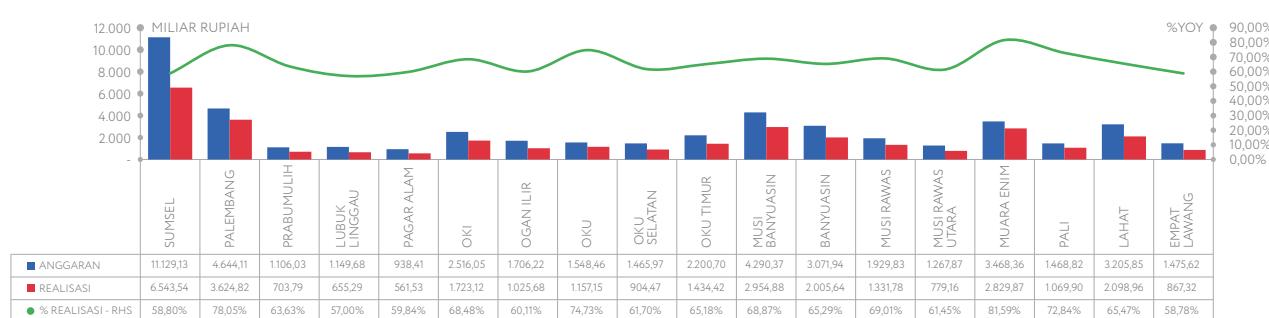
lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp109,49 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp237,19 miliar. Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditargetkan memberikan kontribusi sebesar Rp158,81 miliar atau 0,33% terhadap target total pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar Rp48,58 triliun.

## 2.2.2 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

**Pada triwulan III 2025, pagu anggaran belanja dan transfer APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.** Pagu anggaran Belanja dan Transfer APBD menurun sebesar 0,19% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2024, dari Rp50,37 triliun menjadi Rp50,27 triliun. Pagu belanja terdiri atas belanja operasi sebesar Rp32,28 triliun atau dengan pangsa 64,21%, belanja modal sebesar Rp9,36 triliun dengan pangsa 18,62%, belanja transfer sebesar Rp8,39 triliun dengan pangsa 16,69%, dan belanja tidak terduga sebesar Rp241,15 miliar dengan pangsa 0,48%.

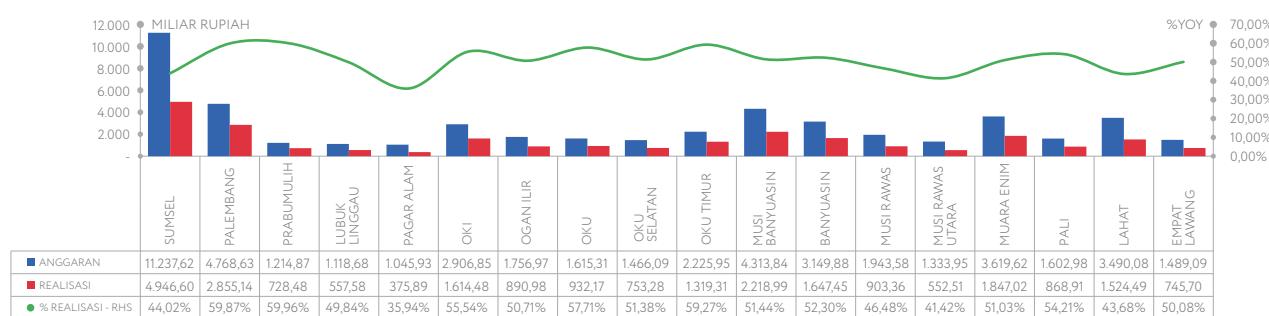
**Realisasi belanja APBD triwulan III 2025 secara keseluruhan menurun dibanding triwulan III 2024.** Realisasi belanja dan transfer APBD di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp25,28 triliun atau 50,29%, lebih rendah dari realisasi belanja tahun 2024. Realisasi belanja terdiri dari belanja operasi dengan pangsa sebesar 69,78%, belanja modal dengan pangsa sebesar 11,91%, belanja transfer dengan pangsa sebesar 18,29%, dan belanja tidak terduga dengan pangsa sebesar 0,02%. Adapun belanja operasi pada triwulan III 2025 terealisasi sebesar Rp17,64 triliun (54,66% dari pagu Rp32,28 triliun).

Grafik 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025(Rp Miliar)

URAIAN	Tw III 2024			Tw III 2025		
	Target Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Target Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi
<b>BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>50.370,39</b>	<b>28.008,49</b>	<b>55,61%</b>	<b>50.272,78</b>	<b>25.282,13</b>	<b>50,29%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>30.781,10</b>	<b>18.272,53</b>	<b>59,36%</b>	<b>32.277,70</b>	<b>17.641,65</b>	<b>54,66%</b>
Belanja Pegawai	15.648,43	10.344,02	66,10%	17.833,33	10.728,04	60,16%
Belanja Barang dan Jasa	12.966,48	6.405,48	49,40%	12.844,84	6.262,01	48,75%
Belanja Bunga	33,79	22,98	68,01%	21,63	12,27	56,74%
Belanja Subsidi	19,46	11,50	59,07%	35,85	14,94	41,68%
Belanja Hibah	2.046,00	1.457,84	71,25%	1.410,05	573,15	40,65%
Belanja Bantuan Sosial	66,94	30,72	45,89%	132,00	51,25	38,82%
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.599,77</b>	<b>3.879,96</b>	<b>36,60%</b>	<b>9.361,93</b>	<b>3.011,90</b>	<b>32,17%</b>
Belanja Tanah	165,29	40,57	24,55%	174,34	7,67	4,40%
Belanja Peralatan dan Mesin	1.617,34	591,58	36,58%	1.769,08	745,23	42,13%
Belanja Gedung dan Bangunan	2.621,98	762,53	29,08%	2.061,52	564,32	27,37%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.964,14	2.383,31	39,96%	5.097,37	1.557,19	30,55%
Belanja Aset Tetap Lainnya	201,13	95,75	47,61%	235,42	131,09	55,69%
Belanja Aset Lainnya	29,89	6,21	20,80%	24,20	6,40	26,46%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>525,91</b>	<b>11,07</b>	<b>2,10%</b>	<b>241,15</b>	<b>3,35</b>	<b>1,39%</b>
Belanja Tidak Terduga	525,91	11,07	2,10%	241,15	3,35	1,39%
<b>TRANSFER</b>	<b>8.463,60</b>	<b>5.844,92</b>	<b>69,06%</b>	<b>8.392,00</b>	<b>4.625,24</b>	<b>55,11%</b>

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Sementara itu, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga masing-masing terealisasi sebesar Rp3,01 triliun (32,17% dari pagu Rp9,36 triliun), Rp4,63 triliun (55,11% dari pagu Rp8,39 triliun), dan Rp3,35 miliar (1,39% dari pagu Rp241,15 miliar (Tabel 2-2).

Dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi dan peningkatan akuntabilitas transaksi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota untuk mendorong perluasan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Hal ini terkonfirmasi dari hasil penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang menunjukkan seluruh Pemerintah Daerah telah berada pada Tahap Digital sejak 2023. Selain itu, untuk mempermudah belanja pemerintah daerah, 7 dari 18 pemerintah daerah di Sumatera Selatan telah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel.

**Secara spasial, realisasi belanja tertinggi** berada pada Kota Prabumulih (59,96% dari pagu Rp1,21 triliun) dan diikuti oleh Kota Palembang (59,87% dari pagu Rp4,77 triliun). Adapun realisasi belanja terendah berada pada Kota Pagar Alam (35,94% dari pagu Rp1,05 triliun) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (41,42% dari pagu Rp1,33 triliun (Grafik 2-3).

## 2.3 APBN Provinsi Sumatera Selatan

Secara umum, realisasi pendapatan Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 secara persentase meningkat jika dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 mencapai 60,59% dari target Rp17,62 triliun atau secara nominal Rp10,68 triliun (Tabel 2-3). Adapun penerimaan pajak dan kepabeanan & cukai triwulan III 2025 masing-masing meningkat sebesar 10,99% dan 73,28% (yoy). Meningkatnya persentase realisasi pendapatan Pemerintah Pusat ini disebabkan oleh peningkatan setoran masa PPN dan PPh Badan dari komoditas unggulan, serta ditopang dari penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi kenaikan harga patokan ekspor (HPE) dan meningkatnya volume ekspor produk CPO & turunannya.

Sementara itu, kinerja penerimaan bea cukai pada triwulan III tahun 2025 mencapai Rp350,12 miliar, mengalami kenaikan yang signifikan dipengaruhi oleh peningkatan realisasi bea keluar. Terdorongnya realisasi bea keluar disebabkan oleh meningkatnya volume ekspor komoditas, khususnya CPO dan produk turunannya, serta didukung oleh kenaikan HPE dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan bea masuk hingga triwulan III 2025 sebesar Rp65,71 miliar atau 39,87% dari target karena terdapat restitusi dan penurunan impor,

**Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Sumatera Selatan 2024-2025**

URAIAN	Tw III 2024			Tw III 2025		
	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi
Pendapatan	22.455,30	10.005,89	44,56%	17.617,61	10.675,25	60,59%

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Tabel 2.4 Uraian Belanja Modal K/L Sumatera Selatan**

URAIAN BELANJA MODAL	2024	2025	Perubahan (Rp Miliar)	% Perubahan	2024		2025	
	Pagu Anggaran (Rp Miliar)	Pagu Anggaran (Rp Miliar)			Realisasi s/d 30 SEP (Rp Miliar)	%	Realisasi s/d 30 SEP (Rp Miliar)	%
Tanah	19.640.844.000	2.662.604.089	-16.978.239.911	-86,44%	17.321.075.500	88,19%	65.734.000	2,47%
Peralatan dan Mesin	295.215.945.000	161.334.837.547	-133.881.107.453	-45,35%	140.282.331.181	47,52%	62.709.628.879	38,87%
Gedung dan Bangunan	527.172.694.000	528.674.100.322	1.501.406.322	0,28%	332.071.926.380	62,99%	131.465.298.006	24,87%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.203.461.045.000	644.267.795.068	-4.559.193.249.932	-87,62%	2.477.755.429.203	47,62%	288.496.766.359	44,78%
Fisik Lainnya	6.901.248.000	66.833.602.393	59.932.354.393	868,43%	5.438.704.562	78,81%	9.159.836.225	13,71%
Badan Layanan Umum (BLU)	254.054.525.000	261.035.409.582	6.980.884.582	2,75%	44.278.030.927	17,43%	84.811.556.316	32,49%
<b>Total</b>	<b>6.306.446.301.000</b>	<b>1.664.808.349.001</b>	<b>-4.641.637.951.999</b>	<b>-73,60%</b>	<b>3.017.147.497.753</b>	<b>47,84%</b>	<b>576.708.819.785</b>	<b>34,64%</b>

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

sementara penerimaan bea keluar sebesar Rp282,63 miliar atau 302,98% dari target. Sedangkan kinerja PNBP wilayah Sumsel hingga triwulan III 2025 menunjukkan pencapaian yang tinggi dengan total penerimaan sebesar Rp2,08 triliun atau 84,86% dari target, meski sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya akibat perubahan status Universitas Sriwijaya sebagai PTN BH. Pendapatan dari BLU mencapai Rp1,27 triliun atau 65,95% dari target, sebagian besar berasal dari layanan dari BLU Rumah Sakit, utamanya dari RSMH Palembang. Sementara itu, pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp820,85 miliar atau telah mencapai 155,3% dari pagu yang berasal dari meningkatnya pendapatan jasa kepelabuhanan.

**Pagu belanja Pemerintah Pusat atas beban APBN di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mengalami penurunan terutama disebabkan kebijakan efisiensi anggaran.** Pagu belanja APBN Kementerian/Lembaga di Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebesar Rp15,67 triliun, menurun 30% dibandingkan pagu tahun 2024 yang sebesar Rp21,16 triliun. Berdasarkan strukturnya, komposisi pagu belanja K/L terdiri atas belanja barang dengan pangsa sebesar 48,64% atau secara nominal sebesar Rp7,56 triliun, diikuti oleh belanja pegawai dengan pangsa sebesar 40,46% setara Rp6,29 triliun, belanja modal dengan pangsa sebesar 10,71% atau Rp1,66 triliun, dan sisanya belanja bantuan sosial dengan pangsa 0,17% atau sebesar Rp27,67 miliar. Penurunan pagu terbesar terjadi pada pagu belanja modal dan barang sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang mulai berjalan di tahun ini.

**Realisasi penyerapan belanja Pemerintah Pusat atas beban APBN di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp8,68 triliun atau 55,39% dari pagu.** Realisasi serapan ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 58,62% dari pagu. Persentase realisasi belanja terbesar terdapat pada belanja pegawai dengan realisasi sebesar 78,1% atau senilai Rp4,91 triliun dan belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar 53,27% atau Rp14,74 miliar. Sementara itu, belanja barang dan modal masing-masing terealisasi sebesar 42,05% dan 34,64% atau secara nominal sebesar Rp3,18 triliun dan Rp576,71 miliar (Tabel 2-5).

**Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024.** Pagu TKDD dari seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp34,51 triliun, meningkat sebesar 6,9% dari pagu TKDD tahun 2024 yang sebesar Rp33,49 triliun. Pada triwulan III 2025, realisasi TKDD Pemerintah Daerah Sumatera Selatan sebesar 74,16% dari total pagu atau senilai Rp25,59 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 71,47% dari pagu atau senilai Rp23,94 triliun. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pagu yang mengakibatkan kenaikan realisasi pada DBH. Realisasi TKDD tertinggi dilakukan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 80,4% dari pagu Rp1,72 triliun, sedangkan realisasi terendah adalah Kota Prabumulih sebesar 63,62% dari pagu Rp901,18 miliar (Grafik 2-4).

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025**

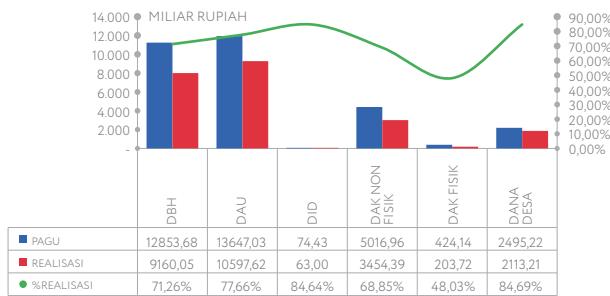
URAIAN BELANJA	Tw III 2024			Tw III 2025			Growth
	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	
Pegawai	5.971,41	4.546,27	76,13%	6.288,57	4.911,50	78,10%	8,03%
Barang	8.851,75	4.815,66	54,40%	7.559,52	3.178,75	42,05%	-33,99%
Modal	6.306,45	3.017,15	47,84%	1.664,81	576,71	34,64%	-80,89%
Bantuan Sosial	28,73	23,91	83,22%	27,67	14,74	53,27%	-38,35%
<b>Berdasarkan Jenis Belanja</b>	<b>21.158,34</b>	<b>12.402,99</b>	<b>58,62%</b>	<b>15.540,57</b>	<b>8.681,70</b>	<b>55,86%</b>	<b>-30,00%</b>

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

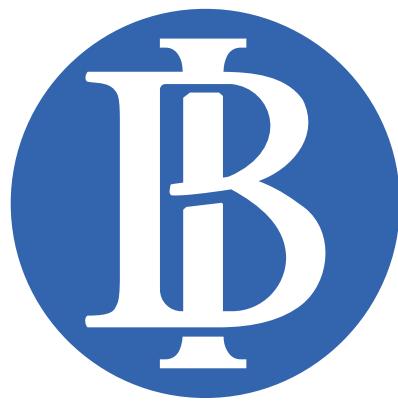
**Grafik 2.4 Realisasi Belanja TKDD Sumatera Selatan Triwulan III 2025 berdasarkan Wilayah**

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Jika ditinjau dari jenis TKDD, sampai dengan akhir triwulan II 2025 Dana Desa memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 84,69% atau sebesar Rp2,11 triliun, kemudian disusul oleh Dana Insentif Daerah (DID) dengan realisasi sebesar 84,64% atau sebesar Rp63 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi sebesar 77,66% atau setara Rp10,6 triliun, Dana Bagi Hasil dengan realisasi sebesar 71,26% atau senilai Rp9,16 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan realisasi sebesar 68,85% atau setara Rp3,45 triliun, dan DAK Fisik dengan realisasi 48,03% atau setara Rp203,72 miliar (Grafik 2-5).

**Grafik 2.5 Realisasi Belanja TKDD Sumatera Selatan Triwulan III 2025 berdasarkan Jenis**

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah



03

---

## Perkembangan Inflasi Daerah





**Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat meningkat pada triwulan III 2025 dipengaruhi oleh tekanan harga emas dan berbagai produk hortikultura.**

- Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 3,44% (oy), meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang sebesar 2,44% (oy). Peningkatan tekanan inflasi tersebut didorong utamanya oleh tekanan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global. Selain itu, tekanan inflasi juga didorong oleh berbagai produk hortikultura (cabai merah, bawang merah, dan beras) akibat permintaan masyarakat yang kuat di tengah gangguan cuaca yang mengganggu pasokan di daerah sentra.
- Perkembangan inflasi di triwulan laporan juga dipengaruhi oleh deflasi berkepanjangan sejak Mei sampai dengan Oktober 2024 yang membuat level IHK rendah di sepanjang periode tersebut sehingga mempengaruhi tingkat inflasi tahunan yang tinggi di September 2025.
- Tekanan inflasi pada triwulan IV 2025 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan normalisasi efek deflasi berkepanjangan di tahun lalu di tengah terjaganya prognosis neraca pangan hingga akhir tahun.
- Prospek inflasi IHK di tahun 2025 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5\pm1\%$  dengan sinergi BI-TPID, digitalisasi, ketahanan pangan, dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi konsumen di tengah dorongan konsumsi yang tetap kuat.

### 3.1 Inflasi Secara Umum

**Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 3,44% (yoy)**, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 2,44% (yoy). Inflasi Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,65% (yoy). Secara spasial, realisasi inflasi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 berada pada urutan tertinggi ke-enam di regional Sumatera. Terdapat 5 dari 10 provinsi di regional Sumatera mencatatkan inflasi yang di bawah sasaran inflasi nasional, yakni 2,5±1% (yoy). Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi terbesar pada triwulan laporan adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 1,85% (yoy) (Tabel 3-1).

Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tetap kuat, terutama pada momentum perayaan **HUT RI ke-80** dan **HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW**. Dorongan konsumsi ini tidak hanya berasal dari sektor rumah tangga, tetapi juga dari sektor pemerintahan seiring normalisasi realisasi anggaran yang sebelumnya tertahan pada semester I 2025. Kondisi tersebut diperkuat oleh distribusi gaji ke-13 ASN yang meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga mendorong permintaan barang dan jasa secara signifikan. Meski demikian, tingkat inflasi pada triwulan laporan tercatat lebih moderat dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 3,46% (yoy) didukung suplai khususnya komoditas pangan bergejolak yang memadai.

**Inflasi pada triwulan laporan didorong utamanya oleh kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau**, terkonfirmasi dari sumbangan inflasi kelompok ini yang tercatat paling tinggi di antara kelompok lainnya, sejalan dengan permintaan masyarakat yang meningkat di tengah kendala produksi akibat gangguan cuaca di daerah sentra. Selain itu, tekanan inflasi diperkuat oleh kenaikan harga pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, didukung oleh konsumsi masyarakat yang tinggi pada momen long weekend periode Maulid Nabi Muhammad serta tambahan konsumsi wisatawan mancanegara sejalan dengan dibukanya rute penerbangan internasional.

Di sisi lain, tren kenaikan harga emas perhiasan yang diimbangi oleh tingginya permintaan masyarakat turut memperkuat tekanan inflasi. Permintaan emas perhiasan tetap kuat di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu budaya masyarakat yang memandang emas perhiasan sebagai instrumen investasi, simbol status sosial, dan bagian dari tradisi pada momen penting seperti pernikahan dan hajatan adat. Faktor ini menunjukkan bahwa selain dorongan musiman, preferensi budaya dan psikologis juga berperan dalam dinamika inflasi inti di wilayah tersebut.

**Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi pada triwulan III 2025**, antara lain emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan tomat (Tabel 3-2). Peningkatan harga emas perhiasan

**Tabel 3.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan**

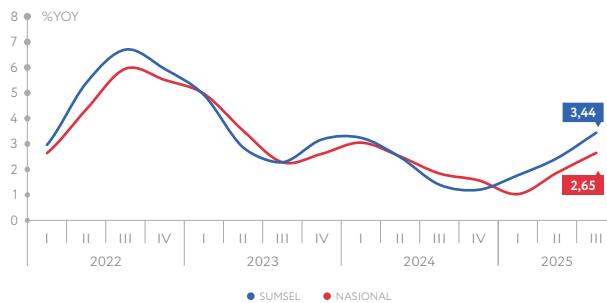
KELOMPOK PENGELOUARAN	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	II 2025	JUL	AGS	SEP	II 2025	JUL	AGS	SEP
<b>UMUM</b>	<b>2,44</b>	<b>2,88</b>	<b>3,04</b>	<b>3,44</b>	<b>2,44</b>	<b>2,88</b>	<b>3,04</b>	<b>3,44</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,21	4,27	5,13	6,11	0,68	1,30	1,54	1,85
Pakaian dan Alas Kaki	0,75	0,25	0,10	-0,07	0,04	0,01	0,01	0,00
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,99	1,11	1,19	1,10	0,14	0,16	0,17	0,15
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,45	0,43	0,43	0,22	0,03	0,03	0,03	0,01
Kesehatan	1,90	1,32	1,09	1,11	0,05	0,03	0,03	0,03
Transportasi	1,32	0,87	0,32	0,46	0,17	0,11	0,04	0,06
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,37	-0,41	-0,47	-0,41	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,28	1,47	1,41	1,32	0,04	0,03	0,02	0,02
Pendidikan	1,86	0,80	0,84	0,87	0,10	0,04	0,05	0,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,21	1,26	1,30	1,28	0,10	0,11	0,11	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,02	14,55	14,10	15,67	1,11	1,08	1,06	1,18

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025**

KOMODITAS INFLASI	Andil (% ,yoy)	KOMODITAS DEFLASI	Andil (% ,yoy)
Emas Perhiasan	1,06	Bawang Putih	0,04
Cabai Merah	0,39	Bensin	0,04
Bawang Merah	0,29	Kacang Panjang	0,04
Beras	0,19	Kangkung	0,03
Tomat	0,18	Bayam	0,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

**Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

sesuai dengan tren kenaikan harga emas global di tengah permintaan yang terindikasi kuat. Adapun peningkatan harga cabai merah dan bawang merah dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari daerah sentra yang mengalami penurunan produksi akibat gangguan cuaca. Selanjutnya, kenaikan harga beras disebabkan oleh peningkatan permintaan beras premium di tengah stok yang menurun memasuki musim tanam. Adapun kenaikan harga tomat disebabkan oleh menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat gangguan cuaca.

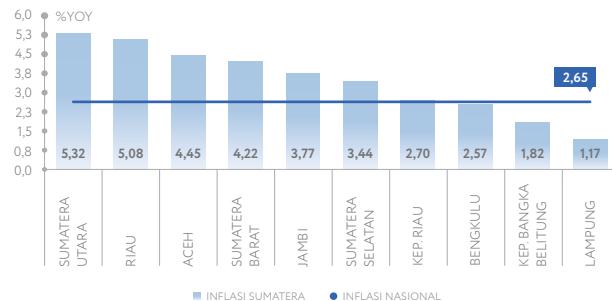
**Inflasi lebih lanjut ditahan oleh deflasi beberapa komoditas, diantaranya bawang putih, bensin, kacang panjang, kangkung, dan bayam (Tabel 3-2).** Deflasi bawang putih didukung oleh peningkatan impor yang mencapai 48,9 ribu ton pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga realisasi kumulatif mencapai 58,1% dari total kuota impor. Masuknya pasokan impor dari Tiongkok yang stabil membantu menekan harga bawang putih di pasar domestik, termasuk Sumatera Selatan. Penurunan harga bensin terjadi pada jenis BBM non-subsidi seiring kebijakan penyesuaian harga yang mengikuti tren penurunan harga minyak global dan penguatan nilai tukar rupiah. Sementara itu, deflasi pada komoditas hortikultura seperti kacang panjang, kangkung, dan bayam terjadi seiring perbaikan pasokan dari daerah sentra dan kelancaran distribusi ke Sumatera Selatan, yang menormalkan harga di tingkat petani setelah sempat naik akibat gangguan cuaca.

## 3.2 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran inflasi, tekanan pada triwulan laporan bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 15,67% (yoy), disusul oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,11% (yoy), dan kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,10% (yoy) (Tabel 3-1). Adapun andil masing-masing kelompok tersebut terhadap inflasi sebesar 1,18% (yoy); 1,85% (yoy); dan 0,15% (yoy).

### 3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

**Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 6,11% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,85% (yoy),** meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,21% (yoy) dengan andil 0,68% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan

**Grafik 3.2 Inflasi Provinsi di Regional Sumatera periode Triwulan III 2025**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

permintaan masyarakat yang meningkat pada momen perayaan HUT RI ke-80 dan HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW. Permintaan yang tinggi tersebut terjadi di tengah kendala produksi akibat gangguan cuaca di daerah sentra yang menekan pasokan sejumlah komoditas pangan sehingga menyebabkan kenaikan harga.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan (%yoy) tertinggi, diantaranya cabai merah sebesar 0,39%; bawang merah sebesar 0,29%; beras sebesar 0,19%; tomat sebesar 0,18%; serta daging ayam ras dan minyak goreng masing-masing sebesar 0,12%. Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi ditahan oleh deflasi (andil %yoy) pada komoditas bawang putih dan kacang panjang masing-masing sebesar 0,04%; kangkung dan bayam masing-masing sebesar 0,03%; udang basah, susu bubuk untuk balita, cabai rawit, dan daun katuk masing-masing sebesar 0,02%; serta ketimun sebesar 0,01%.

**Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah pada Triwulan III 2025 di Sumatera Selatan terutama disebabkan oleh terbatasnya pasokan akibat cuaca yang kurang kondusif dan serangan hama di daerah sentra produksi Sumatera.** Kondisi cuaca basah pada periode laporan mengganggu proses budidaya dan panen, sementara kelembapan tinggi memicu serangan penyakit tanaman seperti antraknosa pada cabai dan busuk umbi pada bawang. Selain itu, banjir yang terjadi di beberapa wilayah sentra, termasuk Musi Rawas, merendam lahan cabai siap panen sehingga mengakibatkan gagal panen dan memperburuk penurunan pasokan. Gangguan distribusi akibat kondisi cuaca turut menambah tekanan harga. Di sisi lain, permintaan kedua komoditas ini tetap tinggi karena merupakan bahan pokok rumah tangga, sehingga ketidakseimbangan antara pasokan yang turun dan permintaan yang stabil mendorong lonjakan harga. Kombinasi faktor tersebut menjadikan cabai merah dan bawang merah sebagai penyumbang utama inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025.

**Tabel 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau**

KOMODITAS	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	2,21	4,27	5,13	6,11	0,68	1,30	1,54	1,85

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

**Tekanan inflasi komoditas beras pada Triwulan III 2025 dipengaruhi oleh kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang mulai berlaku pada Agustus 2025 serta peningkatan permintaan beras premium di tengah terbatasnya ketersediaan beras medium.** Keterbatasan pasokan beras medium terjadi akibat tertundanya penyaluran beras SPHP, yang hingga akhir September 2025 di Sumatera Selatan baru terealisasi sebesar 8.455 ton atau sekitar 26,9% dari target. Penyaluran SPHP memang meningkat signifikan pada September (5.317 ton, naik 69,5% dibanding Agustus), namun belum cukup untuk menahan tekanan harga di pasar. Selain itu, kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang mulai berlaku pada Agustus 2025, dari Rp12.500/kg menjadi Rp13.500/kg di Zona I termasuk Sumatera Selatan, serta kenaikan harga gabah di tingkat petani turut memperkuat tekanan harga. Kondisi ini mendorong masyarakat beralih ke beras premium dengan harga lebih tinggi, diperkuat oleh permintaan dari daerah sekitar Sumatera dan Jawa. Kombinasi faktor tersebut membuat beras kembali menjadi salah satu penyumbang utama inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025.

**Harga tomat pada Triwulan III 2025 kembali menjadi salah satu penyumbang utama inflasi bahan makanan di Sumatera Selatan, meskipun terdapat efek base year dari tahun sebelumnya yang mencatatkan harga sangat terjangkau seiring pasokan yang melimpah.** Tekanan inflasi pada tomat menguat sejalan dengan terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Fenomena ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi di daerah sentra sepanjang triwulan laporan yang berdampak pada menurunnya hasil panen tomat sehingga ketersediaan di pasar lokal menjadi terbatas. Selain itu, infrastruktur distribusi yang kurang optimal memperlambat aliran pasokan dari sentra produksi ke kota-kota besar, sehingga harga tomat di tingkat konsumen meningkat signifikan.

**Selanjutnya, kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tetap tinggi di tengah peningkatan program bauran biodiesel dari B35 ke B40.** Implementasi program B40 di tahun ini turut meningkatkan permintaan domestik terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku biodiesel, yang berpotensi mengurangi pasokan CPO untuk kebutuhan pangan, termasuk produksi minyak goreng. Di samping itu, peningkatan pungutan ekspor CPO dari 7,5% menjadi 10% untuk mendukung program B40 juga berkontribusi pada kenaikan biaya produksi minyak goreng. Kenaikan biaya ini kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen, sehingga harga minyak goreng di pasar domestik dapat meningkat. Di sisi lain, penyaluran MinyaKita di Sumatera Selatan juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti pengepakan MinyaKita yang di bawah ketentuan takaran dan penggunaan minyak goreng non-domestic market obligation (non-DMO) atau minyak goreng komersial untuk dikemas menjadi MinyaKita.

Tekanan inflasi daging ayam ras pada Triwulan III 2025 di Sumatera Selatan terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya input produksi, yaitu harga *Day Old Chick* (DOC) broiler dan pakan ternak berbasis jagung. Harga DOC broiler secara nasional pada September 2025 mencapai sekitar Rp7.500 per ekor, naik dari Rp6.000 per ekor pada bulan sebelumnya, sementara harga jagung pakan ternak berada di level Rp6.599/kg, lebih tinggi dibandingkan HAP Rp5.800/kg dan naik dari bulan sebelumnya Rp6.459/kg. Kondisi ini meningkatkan

biaya produksi ayam ras di tingkat peternak, yang kemudian mendorong kenaikan harga jual di pasar.

**Tekanan inflasi pada kelompok ini ditahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas, diantaranya bawang putih dan kacang panjang masing-masing sebesar 0,04% (yoy); kangkung dan bayam masing-masing sebesar 0,03% (yoy); udang basah, susu bubuk untuk balita, cabai rawit, dan daun katuk masing-masing sebesar 0,02 % (yoy).** Deflasi bawang putih didukung oleh peningkatan impor yang mencapai 48,9 ribu ton pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga realisasi kumulatif mencapai 58,1% dari total kuota impor. Masuknya pasokan impor dari Tiongkok yang stabil membantu menekan harga bawang putih di pasar domestik, termasuk Sumatera Selatan. Sementara itu, deflasi pada komoditas hortikultura seperti kacang panjang, kangkung, dan bayam terjadi seiring perbaikan pasokan dari daerah sentra dan kelancaran distribusi ke Sumatera Selatan, yang menormalkan harga di tingkat petani setelah sempat naik akibat gangguan cuaca. Untuk komoditas udang basah, penurunan harga didorong oleh meningkatnya hasil tangkapan nelayan seiring cuaca yang lebih bersahabat di wilayah pesisir, sementara deflasi susu bubuk untuk balita terjadi karena pasokan impor yang lancar dan promosi harga oleh ritel modern. Adapun cabai rawit dan daun katuk mengalami koreksi harga setelah pasokan dari sentra produksi kembali normal. Kombinasi faktor tersebut membantu meredam tekanan inflasi kelompok ini pada periode laporan.

### 3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

**Pada triwulan III 2025, kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami deflasi sebesar 0,07% (yoy) dengan andil sebesar 0,00% (yoy).** Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,75% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,04% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan berlanjutnya tren penurunan konsumsi masyarakat terhadap produk tekstil dan turunannya pasca Ramadhan dan HBKN Idulfitr.

Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi secara tahunan pada kelompok ini adalah sepatu pria dan baju muslim wanita masing-masing sebesar 0,01%. Hal tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan struktural terhadap produk fesyen di Sumatera Selatan, sejalan dengan pergeseran pola konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan primer dan pengalaman (travel, kuliner) dibandingkan sandang. Fenomena ini diperkuat oleh tren “slow fashion” dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, membuat pembelian pakaian baru pasca Lebaran semakin terbatas. Di sisi industri, tekanan juga datang dari persaingan harga yang ketat akibat banjir produk impor murah dan promosi agresif e-commerce, memaksa pelaku usaha lokal melakukan diskon besar untuk menghabiskan stok.

**Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki**

KOMODITAS	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	0,75	0,25	0,10	-0,07	0,04	0,01	0,01	0,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga

**Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga mencatatkan inflasi pada triwulan III 2025.** Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 1,10% (yoY) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,15% (yoY), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,99% (yoY) dengan andil inflasi sebesar 0,14% (yoY). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada triwulan laporan, yaitu bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13% (yoY).

**Inflasi pada komoditas bahan bakar rumah tangga pada triwulan III 2025 dipengaruhi kebijakan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG ukuran 3 kg di Provinsi Sumatera Selatan.** Kebijakan tersebut efektif per 9 Januari 2025 yang juga diiringi dengan pengetatan distribusi berdasarkan aturan baru dari Ditjen Migas, di mana penjualan LPG 3 kg hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi kepada pengguna akhir, yaitu rumah tangga dan usaha mikro. Pembatasan tersebut menyebabkan perubahan pola distribusi di lapangan. Sebelum aturan berlaku, banyak pengecer melakukan aksi borong (*panic buying*) untuk mengamankan stok, sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat pengecer. Setelah aturan resmi berjalan, akses masyarakat terhadap LPG 3 kg menjadi lebih terbatas karena tidak lagi bisa membeli di warung atau pengecer yang sebelumnya lebih dekat dan mudah dijangkau. Hal ini memperpanjang antrean di pangkalan resmi, menimbulkan persepsi kelangkaan, serta mendorong harga jual di atas HET pada beberapa titik distribusi.

Kondisi inilah yang membuat inflasi gas masih berlanjut hingga triwulan III 2025. Meskipun secara formal HET sudah ditetapkan, mekanisme distribusi yang lebih ketat dan tidak meratanya akses ke pangkalan resmi menyebabkan harga riil di lapangan tetap tinggi. Di Sumatera Selatan, dampak ini terasa lebih kuat karena ketergantungan rumah tangga dan usaha mikro pada LPG 3 kg sangat besar, sehingga tekanan harga gas berkontribusi signifikan terhadap inflasi daerah hingga pertengahan tahun.

**Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga**

KOMODITAS	Inflasi (yoY, %)				Andil (yoY, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	0,99	1,11	1,19	1,10	0,14	0,16	0,17	0,15

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

**Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada triwulan III 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,22% (yoY) dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoY).** Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang cenderung mengalami inflasi sebesar 0,45% (yoY) dengan andil inflasi sebesar 0,03% (yoY). Penurunan ini terutama dipicu oleh normalisasi konsumsi pasca periode Ramadhan, Idulfitri, dan banyaknya hari libur pada triwulan sebelumnya yang mendorong kebutuhan perlengkapan rumah tangga.

**Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga**

KOMODITAS	Inflasi (yoY, %)				Andil (yoY, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	0,45	0,43	0,43	0,22	0,03	0,03	0,03	0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Komoditas yang memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi tahunan (% yoY) adalah upah asisten rumah tangga sebesar 0,01%. Tekanan ini tidak hanya mencerminkan penyesuaian biaya hidup, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan jasa ART seiring bertambahnya partisipasi tenaga kerja wanita. Di Sumatera Selatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada Februari 2025 mencapai 55,79%, naik 1,98 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan semakin banyak perempuan yang bekerja di sektor formal maupun informal, sehingga kebutuhan dukungan domestik untuk menjaga keseimbangan pekerjaan dan rumah tangga meningkat.

Peningkatan TPAK perempuan di pasar tenaga kerja mendorong permintaan jasa ART, terutama di perkotaan, karena keluarga dengan kedua orang tua bekerja cenderung mengandalkan tenaga kerja domestik untuk pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Selain itu, urbanisasi juga turut memperkuat tren ini di mana Sumatera Selatan memiliki populasi perkotaan yang terus meningkat, dengan Palembang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan gaya hidup modern.

### 3.2.5 Kelompok Kesehatan

**Inflasi kelompok kesehatan pada triwulan III 2024 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Tekanan inflasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,11% (yoY) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,03% (yoY), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,90% (yoY) dengan andil 0,05% (yoY). Namun demikian, tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan secara signifikan terhadap inflasi.

Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini antara lain normalisasi permintaan layanan kesehatan setelah periode puncak aktivitas pada triwulan sebelumnya, serta stabilisasi harga obat-obatan dan jasa medis. Selain itu, persaingan antarpenyedia layanan kesehatan dan mulai meningkatnya pemanfaatan telemedicine turut menahan kenaikan biaya layanan tatap muka. Namun demikian, inflasi tetap terjadi karena kelompok ini memiliki karakteristik harga yang relatif rigid, terutama pada jasa medis yang dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja dan bahan medis.

**Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan**

KOMODITAS	Inflasi (yoY, %)				Andil (yoY, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	1,90	1,32	1,09	1,11	0,05	0,03	0,03	0,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 3.2.6 Kelompok Transportasi

Pada periode triwulan III 2025, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,46% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,06% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,32% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,17% (yoy). Penurunan tekanan inflasi pada kelompok ini dipengaruhi oleh penurunan harga bensin yang mencatatkan deflasi sebesar 0,04% (yoy). Di sisi lain, komoditas utama yang dominan memberikan andil inflasi tahunan (% yoy) tertinggi pada kelompok ini, diantaranya tarif kendaraan roda empat online, pelumas/oli mesin, dan pemeliharaan/service masing-masing sebesar 0,02% (yoy).

Harga bensin non-subsidi di Sumsel pada September 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan September 2024 sehingga mendorong deflasi tahunan pada komoditas bensin. Secara rinci, harga bensin jenis Pertamax tarcatat turun dari Rp13.250 pada tahun sebelumnya menjadi Rp12.500 pada September 2025, sementara Pertamax Turbo turun dari Rp14.800 menjadi Rp13.400. Penyesuaian harga ini sejalan dengan kebijakan Pertamina yang mengikuti referensi harga internasional untuk BBM, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS), serta dinamika pasar (termasuk kurs) dan kondisi harga minyak global yang melemah di awal September 2025 sebelum stabil kembali menyusul keputusan produksi OPEC+.

Inflasi kelompok transportasi pada triwulan III 2025 tetap berlanjut meskipun harga BBM non-subsidi mengalami penurunan didorong oleh tekanan harga dari jasa transportasi online dan perawatan kendaraan. Tiga komoditas utama yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini, antara lain tarif kendaraan roda empat online, pelumas/oli mesin, dan pemeliharaan/service kendaraan. Kenaikan tarif transportasi online dipicu oleh penyesuaian tarif dasar platform untuk mengimbangi biaya operasional dan fluktuasi permintaan, sementara inflasi pelumas terjadi karena meningkatnya kebutuhan penggantian oli seiring intensitas penggunaan kendaraan dan kampanye perawatan berkala oleh bengkel resmi. Di sisi lain, pemeliharaan kendaraan mengalami kenaikan akibat penyesuaian upah mekanik dan harga suku cadang, terutama menjelang akhir triwulan ketika permintaan servis meningkat. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun penurunan harga BBM meredam tekanan inflasi, faktor struktural seperti biaya jasa dan pola konsumsi perawatan kendaraan tetap menjadi pendorong utama inflasi kelompok transportasi.

**Tabel 3.8 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi**

KOMODITAS	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	1,32	0,87	0,32	0,46	0,17	0,11	0,04	0,06

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 mencatatkan deflasi sebesar 0,41% (yoy) dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,02% (yoy), lebih dalam dari deflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,37% (yoy) dengan andil sebesar 0,02% (yoy). Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami deflasi y-on-y,

1 subkelompok mengalami inflasi y-on-y dan 2 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami deflasi y-on-y, yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,67 persen.

**Deflasi pada kelompok ini tercatat semakin dalam dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi tren penurunan harga peralatan komunikasi yang masih berlanjut.** Kondisi ini mencerminkan berlanjutnya koreksi harga perangkat komunikasi seiring penurunan harga semikonduktor global yang menjadi komponen utama, di tengah dinamika industri teknologi yang sangat cepat (*fast moving product*). Persaingan ketat antarprodusen, khususnya melalui kanal *e-commerce* yang memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan toko fisik, semakin menekan harga jual. Selain itu, inovasi teknologi yang masif mendorong peluncuran produk baru dengan spesifikasi lebih tinggi namun harga lebih kompetitif, sehingga mempercepat depresiasi nilai produk lama.

Efisiensi rantai pasok dan skala produksi massal juga berperan dalam menurunkan biaya produksi, yang pada akhirnya menekan harga di tingkat konsumen. Di sisi lain, meskipun subkelompok jasa keuangan mencatat inflasi tipis akibat kenaikan biaya layanan tertentu, kontribusinya tidak cukup untuk mengimbangi deflasi pada peralatan komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga di kelompok ini lebih bersifat struktural, sejalan dengan transformasi digital dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi berbiaya rendah.

**Tabel 3.9 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan**

KOMODITAS	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	-0,37	-0,41	-0,47	-0,41	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

**Inflasi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 1,32% (yoy),** menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy) dengan andil yang juga turun menjadi sebesar 0,02% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi yang terjadi pada kelompok ini sejalan dengan penurunan mobilitas masyarakat yang tidak setinggi triwulan sebelumnya sejalan dengan periode HBKN maupun libur panjang yang lebih sedikit. Aktivitas rekreasi dan olahraga yang biasanya meningkat saat libur panjang menjadi lebih terbatas di triwulan laporan, sehingga permintaan terhadap jasa hiburan, tiket masuk objek wisata, dan kegiatan budaya relatif menurun.

**Tidak terdapat komoditas di kelompok ini yang menyumbang inflasi lebih dari 0,01%.** Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga bersifat temporer dan tidak terpusat pada komoditas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi pada kelompok rekreasi lebih dipengaruhi oleh pola musiman dan mobilitas masyarakat, bukan oleh faktor struktural atau kenaikan harga yang signifikan. Dengan demikian, kelompok ini memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap inflasi keseluruhan pada triwulan laporan, sejalan dengan tren normalisasi aktivitas pasca berbagai libur panjang di triwulan sebelumnya.

**Tabel 3.10 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya**

KOMODITAS	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	2,28	1,47	1,41	1,32	0,04	0,03	0,02	0,02

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 3.2.9 Kelompok Pendidikan

Pada triwulan III 2025, tekanan inflasi pada kelompok pendidikan tercatat sebesar 0,84% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,86% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,05% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh efek musiman setelah periode tahun ajaran baru, di mana sebagian besar penyesuaian tarif pendidikan, termasuk biaya pendaftaran, seragam, dan buku, telah terjadi pada awal triwulan III sekitar bulan Juli–Agustus. Setelah fase pembayaran besar tersebut selesai, aktivitas pengeluaran pendidikan menurun sehingga permintaan terhadap barang dan jasa pendidikan relatif stabil pada bulan September. Untuk pendidikan tinggi, Kemendikbudristek menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dan mendorong revisi tarif UKT serta penghapusan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di sejumlah PTN.

Tekanan inflasi (andil %yoy) bersumber dari komoditas sekolah menengah atas (SMA) sebesar 0,02% dan sekolah dasar (SD) sebesar 0,01%. Inflasi pada biaya pendidikan SMA dipengaruhi oleh struktur biaya yang lebih tinggi serta beberapa tambahan program untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Sementara itu, biaya pendidikan SD merupakan fondasi pendidikan awal yang wajib diikuti oleh seluruh anak, sehingga permintaan terhadap layanan dan perlengkapan sekolah tetap tinggi.

**Tabel 3.11 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan**

KOMODITAS	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	1,86	0,80	0,84	0,87	0,10	0,04	0,05	0,05

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 1,28% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,21% (yoy) dengan andil yang relatif stabil sebesar 0,11% (yoy). Peningkatan ini bersumber dari tingginya aktivitas konsumsi masyarakat sejalan dengan momen long weekend periode HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW.

Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi tahunan (% yoy) pada kelompok ini, yaitu ayam goreng sebesar 0,03%. Ayam goreng sebagai salah satu menu favorit cepat saji, tidak hanya diminati oleh

konsumen individu tetapi juga menjadi pilihan utama dalam bisnis catering untuk memenuhi kebutuhan acara keluarga maupun wisata, terlebih saat periode HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW. Tren gaya hidup yang semakin mengedepankan makanan praktis dan makan di luar rumah, baik untuk keperluan harian maupun rekreasi, turut memperkuat tekanan harga. Selain faktor permintaan, penyesuaian harga bahan baku seperti ayam ras dan tepung terigu juga mendorong kenaikan harga jual di restoran, kafe, dan layanan catering, sehingga mempertegas pengaruh kombinasi konsumsi domestik dan wisata terhadap inflasi kelompok ini.

### 3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan III 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 15,67% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,18% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya sebesar 15,02% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,11% (yoy). Tekanan inflasi yang masih tinggi bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang menyumbang andil sebesar 1,06% (yoy), lalu disusul oleh pasta gigi dan sikat gigi dengan andil masing-masing sebesar 0,02% (yoy).

Peningkatan tekanan harga pada emas perhiasan sejalan dengan prospek eksternal yang masih dibayangi dengan berbagai sentimen negatif yang mendorong permintaan akan safe haven assets. Harga emas global pada triwulan laporan tercatat naik sebesar 9,40% (qtq) menjadi USD3667.68/oz dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD3352.66/oz. Selain itu, emas perhiasan memiliki peran penting dalam upacara adat, pernikahan, dan pemberian hadiah sebagai simbol status sosial dan keberuntungan. Tradisi ini membuat masyarakat cenderung membeli emas dengan kadar tinggi dan desain tradisional, yang harganya relatif lebih mahal. Emas juga merupakan alternatif diversifikasi penempatan dana, sehingga dapat menjadi pilihan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian pasar. Selain itu, terdapat tren kenaikan literasi keuangan di masyarakat, yang semakin mendorong pemahaman akan pentingnya diversifikasi investasi termasuk emas.

**Di sisi lain, tekanan harga pasta gigi dan sikat tercatat meningkat disebabkan oleh beberapa faktor.** Pertama, fluktuasi harga bahan baku seperti fluoride, sorbitol, dan bahan kimia aktif lainnya di pasar global memicu produsen untuk menyesuaikan harga jual demi menjaga margin keuntungan. Kedua, biaya distribusi dan logistik meningkat, terutama akibat penyesuaian tarif transportasi dan energi, yang berdampak langsung pada harga akhir produk di tingkat konsumen. Ketiga, produsen juga menyesuaikan harga seiring peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk perawatan pribadi, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan kebersihan gigi dan kesehatan mulut. Terakhir, terdapat tren peralihan ke merek lokal atau membeli dalam jumlah besar untuk menghemat biaya sehingga menunjukkan adanya perubahan perilaku belanja akibat tekanan harga ini.

**Tabel 3.12 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**

KOMODITAS	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	1,21	1,26	1,30	1,28	0,10	0,11	0,11	0,11

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 3.13 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**

KOMODITAS	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	JUN	JUL	AGS	SEP	JUN	JUL	AGS	SEP
Inflasi Kelompok	15,02	14,55	14,10	15,67	1,11	1,08	1,06	1,18

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 3.3 Perkembangan Inflasi Bulanan dan Tracking Inflasi Triwulan IV 2025

Gambar 1. Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

#### Inflasi pada bulan Juli 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli mencatatkan inflasi sebesar 0,14% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,08% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat sebesar 0,30% (mtm) dengan andil sebesar 0,10% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK Juli 2025 mencatatkan inflasi sebesar 2,88% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,44% (yoy). Dengan perkembangan ini, laju inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,02% (ytd) dan berada pada kisaran target inflasi 2,5±1% (yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang meningkat dan tercatat mengalami inflasi sebesar 2,37% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,87% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) a.l bawang merah (0,10%); tomat (0,06%); cabai rawit (0,05%); daging ayam ras (0,04%); dan bensin (andil tidak disebutkan dalam BRS). Kenaikan harga bawang merah, tomat, dan cabai rawit didorong oleh menipisnya stok akibat penurunan produksi dan gangguan cuaca di daerah sentra. Sementara itu, harga daging ayam ras meningkat akibat kenaikan HPP jagung di tengah permintaan yang tinggi pada periode libur sekolah. Di sisi lain, peningkatan harga bensin dipicu oleh penyesuaian harga bensin non subsidi per 1 Juli 2025 mulai 3,23% s/d 4,53% (mtm).

Gambar 3.2 Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Juli 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

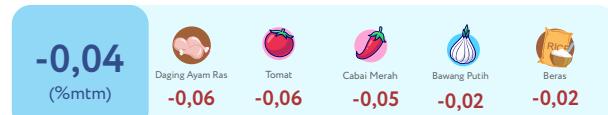
Inflasi yang lebih dalam pada bulan laporan ditahan oleh deflasi kelompok Transportasi. Kelompok ini mencatatkan deflasi bulanan sebesar 0,15% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,02% (mtm). Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan pemberian stimulus transportasi untuk mendukung mobilitas pada periode libur sekolah, diantaranya insetif PPN sebesar 6% untuk tiket pesawat ekonomi kepada 6 juta penumpang dan potongan tarif 20% pada beberapa ruas tol Trans Sumatra.

#### Deflasi pada Agustus 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2025 mencatatkan deflasi sebesar 0,04% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,14% (mtm). Tekanan deflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat sebesar 0,24% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,08% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK Agustus 2025 mencatatkan inflasi sebesar 3,04% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,88% (yoy). Sementara itu, laju inflasi Sumatera Selatan selama 2025 tercatat sebesar 1,98% (ytd) dan berada pada kisaran target inflasi 2,5±1% (yoy). Perkembangan tersebut berbanding terbalik dengan inflasi nasional yang tercatat menurun menjadi sebesar 2,31% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,37% (yoy).

Komoditas utama penyumbang deflasi (andil mtm) a.l daging ayam ras (0,04%); tomat (0,06%); cabai rawit (0,05%); angkutan udara (andil tidak disebutkan dalam BRS); dan beras. Penurunan harga daging ayam ras disebabkan oleh kelebihan pasokan di pasaran yang kurang terserap optimal oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, pasokan tomat dan cabai rawit juga tercatat cukup tinggi seiring inflow panen dari daerah sentra. Selanjutnya, dimulainya periode panen gadu padi dan penyaluran beras SPHP Bulog juga turut mendorong harga beras menurun pada bulan laporan. Di sisi lain, tarif angkutan udara mengalami penurunan karena beragam promo dari maskapai dalam rangka memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) RI Ke-80.

Gambar 3.3 Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Ags 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Deflasi yang lebih dalam pada bulan Agustus 2025 ditahan oleh inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,44% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,04% (mtm). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi bulanan, yaitu emas perhiasan sebesar 0,01% (mtm). Secara tahunan, kelompok ini mencatatkan inflasi cukup tinggi sebesar 14,1% (yoy) dengan andil sebesar 1,06% (yoy) disumbang oleh komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar 0,91% (yoy).

#### Inflasi pada bulan September 2025

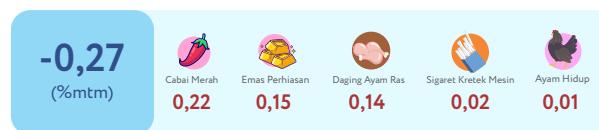
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September mencatatkan inflasi sebesar 0,27% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami

deflasi sebesar 0,04% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat sebesar 0,41% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,14% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK September 2025 mencatatkan inflasi sebesar 3,44% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,04% (yoy). Sementara itu, laju inflasi Sumatera Selatan selama 2025 tercatat sebesar 2,25% (ytd) dan berada pada kisaran target inflasi 2,5±1% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat meningkat menjadi sebesar 2,65% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,31% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) a.l cabai merah (0,22%), emas perhiasan (0,15%), daging ayam ras (0,14%), sigaret keretek mesin (SKM) (0,02%), dan ayam hidup (0,01%). Peningkatan harga cabai merah sejalan dengan terbatasnya pasokan dari daerah sentra yang mengalami penurunan produksi akibat gangguan cuaca. Selanjutnya, harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan didorong oleh ketidakpastian geopolitik. Kemudian, peningkatan harga daging ayam ras disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat di tengah peningkatan HPP live bird (ayam hidup) menjadi Rp18.000/kg dari Rp17.500/kg per Juni 2025. Di sisi lain, tekanan inflasi SKM dipengaruhi oleh penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) yang mulai berlaku sejak Januari 2025, meski dampaknya baru terasa di triwulan laporan seiring dengan mulai habisnya stok dengan HJE lama di pasaran dan penyesuaian harga yang dilakukan secara bertahap oleh produsen untuk menjaga level permintaan.

Inflasi yang lebih dalam pada bulan September 2025 ditahan oleh deflasi kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,19% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,01% (mtm). Bulan September sering menjadi masa transisi antara musim kemarau dan musim hujan sehingga banyak gerai pakaian dan alas kaki menawarkan diskon untuk menghabiskan stok lama. Selanjutnya, kelompok Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga juga mencatatkan deflasi sebesar 0,09% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,01% (mtm).

**Gambar 3.4 Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Sep 2025**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

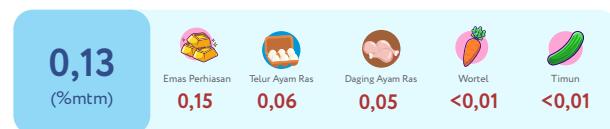
## Inflasi Berlanjut pada Oktober 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Oktober mencatatkan inflasi sebesar 0,13% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,27% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 2,95% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,25% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK Oktober 2025 mencatatkan inflasi sebesar 3,49% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,44% (yoy). Sementara itu, laju inflasi Sumatera Selatan selama 2025 tercatat sebesar 2,38% (ytd) dan berada pada batas tengah kisaran target inflasi 2,5±1% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat meningkat menjadi sebesar

2,86% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,65% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) a.l emas perhiasan (0,15%), telur ayam ras (0,06%), daging ayam ras (0,05%), wortel (<0,01%), dan ketimun (<0,01%). Harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan didorong oleh ketidakpastian ekonomi global di tengah permintaan yang tetap kuat dari masyarakat, untuk mahar dan *safe haven asset*. Selanjutnya, peningkatan harga daging ayam ras dan telur ayam ras disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat. Selain itu, tekanan inflasi pada komoditas wortel dan ketimun dipengaruhi oleh kendala sisi *supply* akibat tingginya curah hujan di sepanjang bulan laporan.

**Gambar 3.2 Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Okt 2025**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Tekanan inflasi lebih lanjut pada bulan laporan ditahan oleh deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,30% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,10% (mtm). Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang deflasi bulanan, antara lain tomat, cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Komoditas dimaksud tercatat menjadi penyumbang inflasi di bulan sebelumnya. Telah dilakukan berbagai langkah pengendalian harga oleh TPID Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga tekanan inflasi komoditas pangan bergejolak. Meski demikian, tingginya permintaan masyarakat untuk komoditas telur dan daging ayam ras di tengah terbatasnya bibit ayam dan peningkatan harga pakan jagung mendorong tekanan harga komoditas dimaksud pada bulan laporan dengan andil masing-masing sebesar 0,06% (mtm) dan 0,05% (mtm). Diperlukan diversifikasi sumber protein di masyarakat agar mengutamakan sumber pangan lokal yang melimpah, terutama aneka ikan.

## Inflasi Triwulan IV 2025 Diperkirakan Menurun

Dengan perkembangan inflasi di bulan Oktober 2025 dan perkembangan harga komoditas sampai dengan November 2025, tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 diperkirakan akan melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh normalisasi base effect dari deflasi berkepanjangan tahun lalu, terjaganya pasokan pangan strategis hingga akhir tahun, serta keberlanjutan langkah ekstra pengendalian inflasi oleh TPID.

Normalisasi efek base year menjadi faktor teknis yang turut mempengaruhi penurunan tekanan inflasi pada triwulan IV. Inflasi tahunan (yoy) pada triwulan III 2025 tercatat tinggi mendekati batas atas sasaran inflasi dipengaruhi oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun lalu yang berada pada level rendah akibat deflasi (% mtm) berkepanjangan selama Mei–Oktober 2024. Deflasi tersebut terjadi karena pasokan pangan yang melimpah sejalan dengan panen komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang optimal dan didukung kondisi cuaca yang kondusif. Dengan berakhirnya efek base year tersebut, inflasi tahunan pada triwulan IV

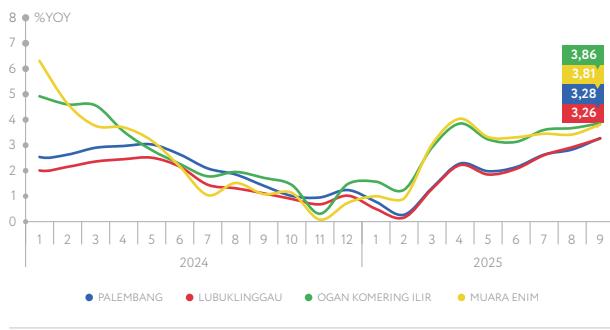
diperkirakan kembali mencerminkan kondisi harga yang lebih wajar.

Selain faktor teknis, stabilitas pasokan pangan strategis menjadi penopang utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Prognosis neraca pangan menunjukkan ketersediaan beras, cabai, dan bawang tetap terjaga hingga akhir tahun, didukung kelancaran distribusi dan kerja sama antar daerah. Di sisi lain, TPID terus melakukan langkah ekstra seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, dan penguatan kerja sama antar daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan dan lonjakan permintaan musiman. Sinergi antara ketersediaan pasokan dan kebijakan pengendalian ini diharapkan mampu menjaga inflasi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 dalam kisaran sasaran.

### 3.4 Analisis Inflasi Spasial

Perhitungan indeks harga konsumen (IHK) provinsi Sumatera Selatan per Januari 2024 telah menggunakan penambahan 2 kabupaten baru, yaitu Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kab. Muara Enim. Di samping itu, pengukuran inflasi juga telah menggunakan tahun dasar baru berdasarkan Survei Biaya Hidup yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 untuk mengakomodasi perubahan pola konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

**Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Kota Sampel Perhitungan Inflasi**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Tabel 3.14 Inflasi Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

KELOMPOK PENGELOUARAN	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	II 2025	JUL	AGS	SEP	II 2025	JUL	AGS	SEP
<b>UMUM</b>	<b>2,14</b>	<b>2,63</b>	<b>2,83</b>	<b>3,28</b>	<b>2,14</b>	<b>2,63</b>	<b>2,83</b>	<b>3,28</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,39	4,02	5,07	6,42	0,36	1,05	1,30	1,64
Pakaian dan Alas Kaki	0,73	0,49	0,53	0,53	0,04	0,02	0,03	0,03
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,62	0,74	0,84	0,79	0,10	0,12	0,13	0,13
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,39	0,41	0,43	0,10	0,02	0,02	0,03	0,01
Kesehatan	1,90	1,54	1,18	1,31	0,05	0,04	0,03	0,03
Transportasi	1,77	1,09	0,59	0,69	0,26	0,16	0,09	0,10
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,45	-0,50	0,58	-0,53	-0,02	-0,03	0,04	-0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,39	0,88	0,94	0,88	0,02	0,02	0,02	0,02
Pendidikan	1,99	0,79	0,82	0,82	0,13	0,05	0,06	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,29	1,36	1,45	1,32	0,11	0,12	0,12	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	14,48	14,19	14,09	15,71	1,07	1,06	1,06	1,19

Sumber: BPS Kota Palembang (SBH 2022=100), diolah

Sebagaimana dirilis dalam Berita Resmi Statistik Inflasi Bulanan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 425 komoditas yang disurvei dalam SBH 2022 untuk perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Paket komoditas terbanyak ada di Kota Palembang sebanyak 393 barang dan jasa, sementara jumlah paket komoditas paling sedikit sebanyak 177 komoditas adalah Kabupaten Muara Enim yang merupakan kabupaten baru.

Berdasarkan Grafik 3-3 di atas, tingkat inflasi tahunan seluruh kabupaten/kota menunjukkan pergerakan yang searah. Tekanan inflasi tercatat mengalami tren meningkat sejak Maret 2025 sampai dengan Oktober 2025. Dari empat kab/kota sampel perhitungan IHK, 2 diantaranya mencatatkan inflasi tahunan yang di atas level inflasi provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 3,44% (yoy) dan mencatatkan inflasi di atas sasaran inflasi nasional (2,5±1%), yaitu Kab. Muara Enim dan Kab. Ogan Komering Ilir masing-masing sebesar 3,81% (yoy) dan 3,86% (yoy).

#### 3.4.1 Kota Palembang

**Pada triwulan III 2025, inflasi Kota Palembang tercatat sebesar 3,28% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,14% (yoy).** Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi sebesar 6,42% (yoy) dengan andil 1,64% (yoy), naik signifikan dibandingkan triwulan II yang sebesar 1,39% (yoy) dengan andil 0,36% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain cabai merah sebesar 0,34%, bawang merah 0,19%, beras 0,16%, dan daging ayam ras 0,13%.

Selanjutnya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil tertinggi kedua terhadap inflasi Kota Palembang, dengan inflasi sebesar 15,71% (yoy) dan andil 1,19% (yoy). Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar pada kelompok ini dengan andil 1,05% (yoy) mengikuti perkembangan harga emas global. Selain faktor global, dimensi budaya dan sosial memainkan peran penting dalam tingginya permintaan emas perhiasan di Palembang. Emas perhiasan menjadi simbol status dan tradisi bagi masyarakat. Dalam budaya lokal, emas sering menjadi

**Tabel 3.15 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025 Kota Palembang**

KOMODITAS INFLASI	Andil (% ,yoy)
Emas Perhiasan	1,05
Cabai Merah	0,34
Bawang Merah	0,19
Beras	0,16
Daging Ayam Ras	0,13

Sumber: BPS Kota Palembang (SBH 2022=100), diolah

bagian dari prosesi pernikahan, acara adat, dan momen perayaan, sehingga permintaan tetap kuat meskipun harga naik.

Di sisi lain, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi ketiga sebesar 0,79% (yoy) dengan andil 0,13% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,62% (yoy) dengan andil 0,10% (yoy). Kenaikan harga pada kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,09% (yoy) dan kontrak rumah sebesar 0,03% (yoy). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga umumnya disebabkan oleh penyesuaian harga LPG non-subsidi yang mengikuti tren harga internasional dan kebijakan distribusi domestik. Sementara itu, inflasi pada komoditas kontrak rumah terjadi karena penyesuaian tarif sewa oleh pemilik properti sejalan dengan meningkatnya permintaan hunian di perkotaan, terutama di Palembang sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan di Kota Palembang pada triwulan laporan adalah emas perhiasan (1,05%), cabai merah (0,34%), bawang merah (0,19%), beras (0,16%), dan daging ayam ras (0,13%). Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi ditahan oleh lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan, diantaranya bensin (0,04%), udang basah (0,04%), kangkung (0,04%), bayam (0,04%), dan susu bubuk balita (0,03%).

KOMODITAS DEFLASI	Andil (% ,yoy)
Bensin	0,04
Udang Basah	0,04
Kangkung	0,04
Bayam	0,03
Susu Bubuk Balita	0,03

### 3.4.2 Kota Lubuklinggau

Pada triwulan III 2025, inflasi Kota Lubuklinggau tercatat sebesar 3,26% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,07% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi sebesar 5,40% (yoy) dengan andil 1,62% (yoy), naik signifikan dibandingkan triwulan II yang sebesar 1,29% (yoy) dengan andil 0,38% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain bawang merah (0,33%), cabai merah (0,28%), daging ayam ras (0,19%), dan minyak goreng (0,17%).

Selanjutnya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil tertinggi kedua terhadap inflasi Kota Lubuklinggau, dengan inflasi sebesar 12,69% (yoy) dan andil 0,96% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 14,50% (yoy) dengan andil 1,07% (yoy). Komoditas emas perhiasan tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi di kelompok ini dengan andil 0,79% (yoy). Sama seperti di Palembang, kenaikan harga emas perhiasan di Lubuklinggau juga dipengaruhi oleh tren harga emas global dan permintaan yang tetap kuat. Namun, intensitas kenaikan relatif lebih rendah karena bobot konsumsi emas di Lubuklinggau tidak sebesar dibandingkan dengan Palembang sehingga dampak inflasi kelompok ini lebih moderat.

**Tabel 3.16 Inflasi Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

KELOMPOK PENGELOUARAN	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	II 2025	JUL	AGS	SEP	II 2025	JUL	AGS	SEP
<b>UMUM</b>	<b>2,07</b>	<b>2,61</b>	<b>2,92</b>	<b>3,26</b>	<b>2,07</b>	<b>2,61</b>	<b>2,92</b>	<b>3,26</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,29	2,95	4,55	5,40	0,38	0,90	1,37	1,62
Pakaian dan Alas Kaki	0,48	0,89	0,87	0,82	0,03	0,05	0,05	0,05
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,55	1,62	1,55	1,47	0,23	0,24	0,23	0,22
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,63	1,86	1,77	1,82	0,12	0,14	0,14	0,14
Kesehatan	1,83	1,94	1,86	1,92	0,05	0,05	0,05	0,05
Transportasi	-0,01	0,24	-0,28	0,05	0,00	0,03	-0,03	0,01
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,55	-0,64	-0,59	-0,54	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,89	2,26	2,48	2,42	0,02	0,05	0,05	0,05
Pendidikan	1,78	1,23	1,34	1,51	0,09	0,06	0,07	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,36	1,36	1,50	1,41	0,10	0,10	0,11	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	14,50	13,67	12,04	12,69	1,07	1,02	0,91	0,96

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 3.17 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025 Kota Lubuklinggau**

KOMODITAS INFLASI	Andil (%, yoy)
Emas Perhiasan	0,79
Bawang Merah	0,33
Cabai Merah	0,28
Daging Ayam Ras	0,19
Minyak Goreng	0,17

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (SBH 2022=100), diolah

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang andil tertinggi ketiga dengan inflasi sebesar 1,47% (yoy) dan andil 0,22% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,55% (yoy) dengan andil 0,23% (yoy). Berlanjutnya tekanan harga pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh komoditas bahan bakar rumah tangga (andil: 0,14% yoy), sewa rumah (andil: 0,03% yoy), dan keramik (andil: 0,02% yoy). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga terjadi akibat penyesuaian harga LPG non-subsidi dan meningkatnya permintaan untuk kebutuhan rumah tangga serta usaha kecil. Sementara itu, inflasi kontrak rumah dipicu oleh penyesuaian tarif sewa tahunan yang didorong oleh tingginya permintaan hunian di perkotaan dan kenaikan biaya pemeliharaan. Selain itu, komoditas keramik juga memberikan kontribusi inflasi karena adanya penyesuaian harga material bangunan yang mengikuti tren kenaikan biaya produksi dan distribusi, terutama di tengah meningkatnya aktivitas renovasi dan pembangunan rumah pada periode laporan.

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan di Kota Lubuklinggau pada triwulan laporan adalah emas perhiasan (0,79%), bawang merah (0,33%), cabai merah (0,28%), daging ayam ras (0,19%), dan minyak goreng (0,17%). Sementara itu, lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah angkutan udara (0,11%), bawang putih (0,06%), terong (0,04%), kacang panjang (0,03%), dan ketimun (0,03%).

KOMODITAS DEFLASI	Andil (%, yoy)
Angkutan Udara	0,11
Bawang Putih	0,06
Terong	0,04
Kacang Panjang	0,03
Ketimun	0,03

### 3.4.3 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Inflasi Kab. OKI pada Triwulan III 2025 tercatat sebesar 3,67% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan II yang sebesar 3,13% (yoy). Tekanan inflasi pada periode ini didominasi oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat sebesar 4,99% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 2,08% (yoy), naik signifikan dibandingkan Triwulan II yang sebesar 2,63% (yoy) dengan andil 1,11% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini adalah bawang merah (0,45%), cabai merah (0,33%), dan beras (0,29%), mencerminkan tekanan harga pangan akibat gangguan pasokan dan pola musiman.

Kelompok dengan andil tertinggi kedua adalah Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, yang tercatat sebesar 15,63% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 1,24% (yoy), naik tipis dibandingkan Triwulan II yang sebesar 17,07% (yoy) dengan andil 1,18% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini tetap emas perhiasan, dengan andil sebesar 1,09% (yoy), mengikuti tren kenaikan harga emas global dan permintaan masyarakat yang tetap kuat. Masyarakat pedesaan di OKI cenderung membeli emas perhiasan sebagai bentuk tabungan yang mudah dicairkan, terutama untuk menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau acara adat. Tradisi ini membuat permintaan emas relatif stabil sepanjang tahun, meskipun harga global naik. Berbeda dengan kota besar yang menjadikan emas sebagai simbol status sosial, di OKI emas lebih dipandang sebagai aset aman untuk menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

**Tabel 3.18 Inflasi Kab. OKI Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

KELOMPOK PENGELOUARAN	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	II 2025	JUL	AGS	SEP	II 2025	JUL	AGS	SEP
<b>UMUM</b>	<b>3,13</b>	<b>3,6</b>	<b>3,67</b>	<b>3,86</b>	<b>3,13</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,86</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,63	4,47	4,99	5,17	1,11	4,99	2,08	2,15
Pakaian dan Alas Kaki	0,88	-0,94	-1,67	-2,6	0,05	-1,67	0,1	-0,15
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,93	4,26	4,32	4,22	0,35	4,32	0,38	0,37
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,23	-0,02	-0,02	0,06	0,01	-0,02	0,00	0,00
Kesehatan	3,04	0,29	0,16	-0,09	0,06	0,16	0,00	0,00
Transportasi	0,38	0,58	-0,44	-0,21	0,04	-0,44	0,04	-0,02
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,05	-0,05	-0,05	0,06	0,00	-0,05	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	8,24	4,56	3,82	3,57	0,13	3,82	0,06	0,06
Pendidikan	1,77	1,23	1,23	1,42	0,04	1,23	0,03	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,61	1,56	1,56	1,88	0,16	1,56	0,15	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	17,07	15,56	15,63	17,39	1,18	15,63	1,11	1,24

Sumber: BPS Kab. OKI (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 3.19 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025 Kab. OKI**

KOMODITAS INFLASI	Andil (% ,yoy)
Emas Perhiasan	1,09
Bawang Merah	0,45
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,37
Cabai Merah	0,33
Beras	0,29

Sumber: BPS Kab. OKI (SBH 2022=100), diolah

Selanjutnya, kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil tertinggi ketiga terhadap inflasi, dengan inflasi sebesar 4,32% (yoy) dan andil tahunan sebesar 0,38% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan Triwulan II yang sebesar 3,93% (yoy) dengan andil 0,35% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini (andil % yoy) adalah bahan bakar rumah tangga sebesar 0,37%, keramik sebesar 0,07%, dan besi beton sebesar 0,05%. Kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan harga yang relatif konsisten pada komoditas kebutuhan dasar rumah tangga, terutama energi dan material bangunan.

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan (% yoy) di Kab. OKI pada Triwulan III adalah emas perhiasan (1,09%), bawang merah (0,45%), bahan bakar rumah tangga (0,37%), cabai merah (0,33%), dan beras (0,29%). Sedangkan lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah cabai rawit (0,32%), kacang panjang (0,12%), bawang putih (0,11%), kerudung/jilbab (0,05%), dan ketimun (0,05%).

#### 3.4.4 Kabupaten Muara Enim

Inflasi Kab. Muara Enim pada Triwulan III 2025 tercatat sebesar 3,81% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan II yang sebesar 3,31% (yoy). Tekanan inflasi pada periode ini didominasi oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, yang mencatat inflasi 6,46% (yoy) dengan andil tahunan 2,60% (yoy), naik signifikan dari Triwulan II yang sebesar 4,79% (yoy) dengan andil

KOMODITAS DEFLASI	Andil (% ,yoy)
Cabai Rawit	0,32
Kacang Panjang	0,12
Bawang Putih	0,11
Kerudung/Jilbab	0,05
Ketimun	0,05

1,93% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini adalah cabai merah (0,80%), bawang merah (0,62%), tomat (0,55%), dan beras (0,25%), mencerminkan tekanan harga pangan akibat gangguan pasokan dan pola musiman.

Kelompok dengan andil inflasi tertinggi kedua di Kab. Muara Enim adalah kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 14,77% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,18% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,70% (yoy) dengan andil 1,23% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini tetap emas perhiasan dengan andil sebesar 1,19% (yoy) mengikuti tren kenaikan harga emas global dan permintaan masyarakat pedesaan yang menjadikan emas sebagai instrumen tabungan.

Selanjutnya, kelompok Kesehatan memberikan andil tertinggi ketiga terhadap inflasi, dengan inflasi 0,86% (yoy) dan andil tahunan 0,02% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II yang sebesar 0,58% (yoy) dengan andil 0,01% (yoy). Tekanan harga di kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas vitamin dengan andil sebesar 0,01% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi vitamin sebagai suplemen kesehatan semakin menjadi bagian dari pola belanja rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan yang mulai mengadopsi gaya hidup lebih sehat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pasca-pandemi dan kebutuhan pencegahan penyakit musiman.

**Tabel 3.20 Inflasi Kab. Muara Enim Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

KELOMPOK PENGELOUARAN	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	II 2025	JUL	AGS	SEP	II 2025	JUL	AGS	SEP
<b>UMUM</b>	<b>3,31</b>	<b>3,45</b>	<b>3,42</b>	<b>3,81</b>	<b>3,31</b>	<b>3,45</b>	<b>3,42</b>	<b>3,81</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,79	5,26	5,76	6,46	1,93	2,13	2,32	2,60
Pakaian dan Alas Kaki	0,83	0,41	0,01	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,56	0,52	0,52	0,09	0,05	0,05	0,05	0,01
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,33	0,25	0,21	0,20	0,02	0,01	0,01	0,01
Kesehatan	0,58	0,75	1,15	0,86	0,01	0,01	0,02	0,02
Transportasi	-0,23	-0,13	-0,50	-0,15	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,26	-0,27	-0,28	-0,28	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,06	0,51	0,51	0,51	0,02	0,01	0,01	0,01
Pendidikan	0,59	0,42	0,42	0,42	0,02	0,01	0,01	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,22	0,22	0,16	0,16	0,02	0,02	0,01	0,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,70	15,65	13,28	14,77	1,23	1,22	1,06	1,18

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 3.21 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan III 2025 Kab. Muara Enim**

KOMODITAS INFLASI	Andil (% ,yoy)	KOMODITAS DEFLASI	Andil (% ,yoy)
Emas Perhiasan	1,19	Bawang Putih	0,13
Cabai Merah	0,80	Cabai Rawit	0,05
Bawang Merah	0,62	Kangkung	0,04
Tomat	0,55	Kacang Panjang	0,02
Beras	0,25	Kentang	0,02

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan (% yoy) di Kab. Muara Enim pada triwulan III adalah emas perhiasan (1,19%), cabai merah (0,80%), bawang merah (0,62%), tomat (0,55%), dan beras (0,25%). Sedangkan lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah bawang putih (0,13%), cabai rawit (0,05%), kangkung (0,04%), kacang panjang (0,02%), dan kentang (0,02%).

### 3.5 Upaya & Tantangan Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Selatan

terus melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah dengan tetap berpedoman pada strategi Pengendalian Inflasi 4K<sup>3</sup>. Upaya yang telah dilakukan sepanjang periode laporan, diantaranya sebagai berikut:

Evaluasi program pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, tantangan, serta langkah penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025 dapat dirangkum sebagai berikut:

PILAR PENGENDALIAN INFLASI	UPAYA YANG DILAKUKAN
Keterjangkauan Harga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan 480 OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP se-Sumatera Selatan hingga September 2025. Salah satunya adalah pelaksanaan Pasar Murah Provinsi Sumatera Selatan di Terminal Sako Palembang yang turut bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025;</li> <li>Penjualan komoditas dengan harga yang lebih terjangkau melalui 1.003 Rumah Pangan Kita (RPK) yang bekerja sama</li> <li>Pemasangan spanduk MinyaKita dan HET di berbagai titik dan distributor dengan Buleleng;</li> </ol>
Ketersediaan Pasokan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring rutin dan sidak pasar, produsen, dan distributor untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Turut dilaksanakan sidak ke produsen telur ayam ras, distributor minyak goreng, serta distributor dan produsen beras di Kota Palembang dan Kab. Banyuasin</li> <li><i>Launching</i> dan pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 yang terdiri atas GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) untuk 1.020 rumah tangga dan 17 KWT se-Sumatera Selatan dengan komoditas bawang merah dan cabai, GSMP Panti Sosial untuk 10 panti sosial di Sumatera Selatan dengan komoditas hortikultura, perikanan, dan peternakan (ayam), serta GSMP Goes to Office untuk seluruh pemerintah daerah se-Sumatera Selatan dengan fokus komoditas rimpang.</li> <li>Bantuan media padi apung yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada kegiatan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X.</li> <li>Panen pada program <i>Pilot Project</i> Padi Apung di kawasan Jakabaring, Palembang, untuk menguji 44 varietas padi di lahan rawa. Hasil panen menunjukkan produktivitas antara 2,4 hingga 5,6 ton per hektare, dan menjadi acuan untuk menentukan varietas unggul yang paling sesuai bagi pengembangan pertanian rawa di Sumatera Selatan.</li> </ol>
Kelancaran Distribusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian subsidi harga, subsidi angkutan (termasuk melalui Fasilitas Distribusi Pangan/FDP), dan subsidi operasional lainnya untuk mendukung pelaksanaan OPM di seluruh wilayah Sumatera Selatan</li> <li>Penandatanganan 5 MoU/PKS KAD antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Subang untuk komoditas beras dan pakan ternak melalui skema G2G dan B2B. Turut dilaksanakan penandatanganan PKS antara CV Bumi Nusantara Subang dan Perumda Pasar Palembang Jaya untuk komoditas beras.</li> </ol>
Komunikasi Efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rilis infografis dan siaran pers inflasi secara berkala</li> <li>Publikasi informasi jadwal OPM/GPM melalui media sosial dan kanal informasi lainnya</li> <li>Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) rutin TPID setiap awal minggu</li> <li><i>High Level Meeting</i> (HLM) TPID se-Sumatera Selatan mengenai upaya pengendalian inflasi hingga akhir 2025 yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan</li> <li><i>Capacity building</i> dan rapat koordinasi mengenai evaluasi kinerja TPID selama semester I 2025 dan upaya pengendalian inflasi hingga akhir tahun 2025</li> <li><i>Capacity building</i> TPID Kota Palembang mengenai pengelolaan beras</li> </ol>

Sumber: Rekap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Selatan

3. Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif

## A. Keterjangkauan harga

Sepanjang Triwulan III 2025, pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah tercatat sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kali, meningkat hingga 3 kali dibandingkan triwulan II 2025 serta apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 475 kali. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penugasan beras SPHP dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog, yang menyebabkan peningkatan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat.

Selain melalui OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP, TPID Sumatera Selatan selalu memastikan keterjangkauan harga komoditas melalui 1.003 Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Palembang, Lubuk Linggau, Lahat, dan OKU. RPK yang merupakan mitra Bulog ini memperoleh pasokan komoditas langsung dari Bulog dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, distribusi pangan dengan harga terjangkau juga didukung melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok) milik Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Prov. Sumatera Selatan, Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya, serta OKI-Mart dan OKI-Jek milik Pemerintah Daerah Kab. OKI dan BUMD Bande Seguguk.

Kombinasi intervensi melalui OPM/GPM/Pasar Murah, RPK Bulog, dan jaringan lainnya, terbukti mampu menekan laju kenaikan harga sejumlah komoditas penyumbang inflasi. Sepanjang Triwulan III 2025, beberapa komoditas strategis bahkan menunjukkan penurunan harga dibandingkan Triwulan II 2025, antara lain bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

KOMODITAS	Harga Rata-Rata Tw II 2025	Harga Rata-Rata Tw III 2025	Growth
Bawang Merah	Rp43,433	Rp42,517	-2.11%
Bawang Putih	Rp43,550	Rp37,167	-14.66%
Cabai Rawit	Rp48,700	Rp48,458	-0.50%

Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah

## B. Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025 tercatat mengalami kenaikan untuk komoditas padi dan bawang merah, namun mengalami penurunan untuk komoditas cabai merah dibandingkan dengan Triwulan II 2025.

Peningkatan produksi padi dan bawang merah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perluasan lahan panen, penerapan teknologi dan intensifikasi pertanian, penggunaan benih unggul, pendampingan petani, serta ketersediaan pupuk dan irigasi yang memadai. Sementara penurunan produksi

cabai merah terutama disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung seperti musim penghujan yang menyebabkan gagal panen dan membusuknya tanaman di lahan. Adapun data produksi padi dan komoditas hortikultura selama Triwulan II dan Triwulan III 2025 disajikan pada tabel berikut.

Program panen *Pilot Project Padi Apung* yang dilaksanakan di kawasan Jakabaring, Palembang, merupakan inisiatif strategis yang diusung oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dan TPID Provinsi Sumatera Selatan guna mengidentifikasi varietas padi yang paling adaptif terhadap karakteristik lahan rawa di wilayah tersebut. Melalui pengujian terhadap 44 varietas padi, termasuk varietas lokal Sumatera Selatan, diperoleh hasil panen dengan tingkat produktivitas berkisar antara 2,4 hingga 5,6 ton per hektare. Temuan ini menjadi referensi penting dalam memilih varietas unggul yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga mendukung upaya peningkatan produksi dan ketahanan pangan daerah, khususnya di lahan-lahan marginal seperti rawa.

Di sisi lain, TPID Provinsi Sumatera Selatan juga telah melaksanakan launching dan serangkaian kegiatan dalam rangka Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025. Program ini terdiri atas GSMP Menyapa Lingkungan Desa, GSMP Goes to Panti Sosial, dan GSMP Goes to Office. Secara khusus, GSMP Menyapa Lingkungan Desa berfokus pada budidaya komoditas cabai dan bawang merah, yang melibatkan partisipasi 68 dasawisma (1.020 rumah tangga) dan 17 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan. Peserta program secara aktif melakukan budidaya di bawah pendampingan penyuluh pertanian lapangan serta melaporkan perkembangan budidaya kepada tim penjurian GSMP yang terdiri atas TPID Provinsi Sumatera Selatan dan PKK Provinsi Sumatera Selatan. Program GSMP diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat dari sekadar konsumen menjadi produsen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal serta mendorong terciptanya ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

## C. Kelancaran Distribusi

Berdasarkan data perkembangan margin distribusi harga Januari–September 2025, terlihat adanya perbedaan (disparitas) harga yang cukup bervariasi antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pasar untuk 6 komoditas utama penyumbang inflasi sebagaimana tercantum pada tabel.

Komoditas beras, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras di Sumatera Selatan menunjukkan stabilitas harga yang relatif stabil, didukung oleh margin distribusi yang terkendali. Sebaliknya, cabai merah dan cabai rawit masih

KOMODITAS	Produksi Komoditas 2025 (Ton)								
	APR	MEI	JUN	Total Tw II	JUL	AGS	SEP	Total Tw III	Selisih Tw II dengan Tw III
Padi (Ton-GKG)	409,899	204,772	220,608	835,279	256,549	353,550	398,040	1,008,139	172,860
Bawang Merah (Ton)	50.30	8.60	68.78	128	81.60	77.45	40.32	199	72
Cabai Merah (Ton)	1,344.44	1,636.31	1,358.70	4,339	1,120.77	1,357.02	751.59	3,229	-1,110

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

mengalami disparitas harga yang cukup signifikan, dengan selisih harga yang dapat melebihi Rp20.000 per kilogram. Fenomena tersebut mencerminkan tantangan utama dalam kelancaran distribusi, khususnya pada komoditas hortikultura yang bersifat musiman serta rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi pasokan.

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui strategi kelancaran distribusi, TPID Sumatera Selatan turut berperan melalui pemberian subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lainnya. Dukungan ini ditujukan untuk menekan biaya transportasi dan distribusi pangan, memperlancar alur distribusi dari produsen ke konsumen, serta menjaga keterjangkauan harga di pasar.

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Subang untuk komoditas beras dan pakan ternak. Melalui langkah-langkah kolaboratif tersebut, diharapkan disparitas harga dapat semakin diminimalkan, sehingga stabilitas harga pangan strategis di Sumatera Selatan dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

## D. Komunikasi Efektif

Upaya pengendalian inflasi melalui komunikasi efektif dilakukan melalui koordinasi kelembagaan, baik dalam bentuk rapat koordinasi, *high level meeting* (HLM), maupun *capacity building* TPID, serta pengendalian ekspektasi masyarakat. Pada Triwulan III 2025, TPID Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan rapat koordinasi mingguan untuk membahas perkembangan inflasi terkini serta langkah-langkah pengendaliannya.

Sepanjang periode laporan, TPID se-Sumatera Selatan telah melaksanakan HLM, *capacity building*, dan rapat koordinasi TPID antara lain melalui:

- *High Level Meeting* (HLM) TPID se-Sumatera Selatan mengenai Upaya Pengendalian Inflasi Hingga Akhir Tahun 2025 yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan
- *Capacity building* dan rapat koordinasi mengenai Kinerja TPID Semester I 2025 dan Upaya Pengendalian Inflasi Hingga Akhir Tahun 2025 pada Juli 2025
- *Capacity building* Pengelolaan Beras (TPID Kota Palembang) pada Juli 2025

KOMODITAS / MARGIN DISTRIBUSI HARGA		2025										
		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP
Beras	Produsen	Rp.	11,000	Rp.	10,650	Rp.	11,450	Rp.	12,550	Rp.	13,550	Rp. 12,450
	Pasar	Rp.	14,950	Rp.	14,950	Rp.	15,200	Rp.	15,200	Rp.	15,500	Rp. 15,500
	Selisih Harga	Rp.	3,950.00	Rp.	4,300.00	Rp.	3,750.00	Rp.	2,650.00	Rp.	1,950.00	Rp. 3,050.00
	<b>Rata-Rata Selisih Harga</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>32,000</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp. 2.550,00</b>
Daging Ayam Ras	Produsen	Rp.	27,000	Rp.	22,000	Rp.	31,900	Rp.	27,000	Rp.	31,000	Rp. 29,000
	Pasar	Rp.	33,000	Rp.	26,750	Rp.	100.00	Rp.	31,150	Rp.	34,150	Rp. 32,150
	Selisih Harga	Rp.	6,000.00	Rp.	4,750.00	Rp.	40,000	Rp.	4,150.00	Rp.	3,150.00	Rp. 3,150.00
	<b>Rata-Rata Selisih Harga</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>42,250</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp. 3.483,33</b>
Bawang Merah	Produsen	Rp.	38,000	Rp.	40,650	Rp.	2,250.00	Rp.	40,000	Rp.	40,000	Rp. 50,000
	Pasar	Rp.	46,650	Rp.	44,150	Rp.	26,700	Rp.	42,250	Rp.	50,150	Rp. 42,650
	Selisih Harga	Rp.	8,650.00	Rp.	3,500.00	Rp.	43,950	Rp.	2,250.00	Rp.	10,150.00	Rp. 7,350.00
	<b>Rata-Rata Selisih Harga</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>17,250,00</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp. 1.683,33</b>
Cabai Merah	Produsen	Rp.	26,700	Rp.	45,850	Rp.	23,000	Rp.	19,500	Rp.	24,200	Rp. 27,700
	Pasar	Rp.	62,500	Rp.	49,850	Rp.	41,250	Rp.	42,250	Rp.	42,400	Rp. 41,400
	Selisih Harga	Rp.	35,800.00	Rp.	4,000.00	Rp.	18,250.00	Rp.	22,750.00	Rp.	18,200.00	Rp. 13,700.00
	<b>Rata-Rata Selisih Harga</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>23,150</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp. 18.216,67</b>
Cabai Rawit	Produsen	Rp.	33,350	Rp.	23,350	Rp.	27,150	Rp.	33,200	Rp.	43,350	Rp. 27,000
	Pasar	Rp.	88,450	Rp.	60,000	Rp.	4,000.00	Rp.	50,650	Rp.	50,000	Rp. 43,000
	Selisih Harga	Rp.	55,100.00	Rp.	36,650.00	Rp.	4,216.67	Rp.	17,450.00	Rp.	6,650.00	Rp. 16,000.00
	<b>Rata-Rata Selisih Harga</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>4,000,00</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp. 13.366,67</b>
Telur Ayam Ras	Produsen	Rp.	24,500	Rp.	23,150	Rp.	3,550.00	Rp.	24,150	Rp.	24,650	Rp. 24,150
	Pasar	Rp.	28,900	Rp.	27,400	Rp.	4,800.00	Rp.	27,400	Rp.	27,950	Rp. 27,450
	Selisih Harga	Rp.	4,400.00	Rp.	4,250.00	Rp.	19,016.67	Rp.	3,250.00	Rp.	3,300.00	Rp. 3,300.00
	<b>Rata-Rata Selisih Harga</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>2,250,00</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp. 3.283,33</b>

Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah

Lebih lanjut, TPID Sumatera Selatan secara aktif melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi terkait inflasi maupun upaya pengendalian inflasi, termasuk di dalamnya mengenai bijak belanja, melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain siaran pers di media cetak dan online, konten media sosial, pelaksanaan *podcast*, hingga sosialisasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, TPID Sumatera Selatan juga secara rutin menginformasikan rencana pelaksanaan operasi pasar murah dan jaringan penyalur SPHP setiap bulan melalui media cetak maupun media sosial sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga ekspektasi masyarakat.

## BOKS 3 :

## Sinergi Pangan: Sumatera Selatan & Sumatera Barat, Kolaborasi Tanpa Batas

Sebagai komoditas yang masih mengalami keterbatasan pasokan di Sumatera Selatan (Grafik 1.1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan secara aktif melakukan berbagai upaya agar kebutuhan terhadap bawang merah tetap tercukupi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., dan Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.K.M., M.K.M., serta diikuti oleh Pemerintah Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kab. OKI, Kab. Muara Enim, dan Kab. Musi Rawas bersama para kepala daerah dan pejabat terkait.

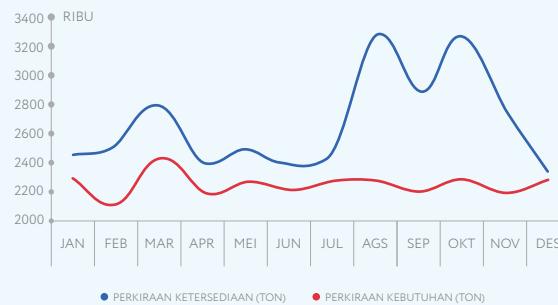
Kerja sama ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, M. Abdul Majid Ikram. Selain sektor pangan, ruang lingkup KAD mencakup bidang strategis lainnya seperti perdagangan dan investasi, pariwisata, kebudayaan, serta kelautan dan perikanan.

Kerja sama antara kedua daerah ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi, koneksi, dan komitmen bersama, tidak hanya untuk pengendalian inflasi daerah namun juga untuk membangun daerah – dari potensi lokal menuju daya saing nasional. Kerja sama ini juga merupakan salah satu bentuk strategi pengendalian inflasi 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Diharapkan, kerja sama ini dapat memperkuat mekanisme *supply chain* antar daerah, sekaligus menghubungkan kekuatan produksi, distribusi, dan konsumsi di dua provinsi besar di Pulau Sumatera.



Penandatanganan 17 MoU/PKS KAD antara Pemerintah Prov. Sumatera Selatan dengan Pemerintah Prov. Sumatera Barat

### Neraca Bawang Merah Sumatera Selatan 2025



Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan kerja sama tersebut, telah dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (*business to business*) antara distributor Kota Palembang dan Kabupaten Solok yang ditandai dengan pengiriman perdana 14 ton bawang merah dari Kabupaten Solok ke Kota Palembang pada 22 Oktober 2025. Pengiriman bawang merah tersebut akan disalurkan ke wilayah Sumatera Selatan melalui Pasar Induk Jakabaring, guna mendukung kelancaran distribusi, pemenuhan pasokan, dan keterjangkauan harga komoditas pangan di wilayah Sumsel yang selama ini masih mengalami defisit.

Implementasi kerja sama yang telah terjalin diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung stabilitas harga komoditas pangan secara berkelanjutan. Berdasarkan data inflasi terakhir, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada September



Pengiriman 14 Ton Bawang Merah dari Kab. Solok ke Kota Palembang

2025 tercatat sebesar 3,44% (yoY), yang masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni sebesar 2,5%±1%. Komoditas cabai dan bawang merah tetap menjadi penyumbang utama inflasi Sumatera Selatan, sejalan dengan kondisi defisit pasokan yang terjadi di daerah ini. Sementara itu, Sumatera Barat sebagai salah satu sentra produksi bawang merah di Sumatera memiliki potensi besar untuk mendukung Sumatera Selatan melalui skema kolaborasi pasokan.

Kerja sama Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Ke depannya Bank Indonesia Sumatera Selatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan para pemangku kepentingan terkait akan terus bersinergi menjaga inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

04

---

## **Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM**

**Secara umum, kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian. Hal ini tercermin melalui terjadinya pertumbuhan penyaluran kredit serta aset perbankan. Di lain sisi, pertumbuhan kinerja intermediasi turut disertai dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.**

- Kinerja pertumbuhan aset perbankan pada triwulan III 2025 tumbuh positif sebesar 1,79% (yoY), meskipun relatif melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,13% (yoY). Kinerja aset perbankan disumbang oleh pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 3,00% (yoY), lebih lambat dibandingkan 8,79% (yoY). Berdasarkan golongan debitur, penyaluran kredit rumah tangga tumbuh 10,94% (yoY) dan penyaluran kredit korporasi tumbuh 10,52% (yoY). Dinamika ketidakpastian global yang berpengaruh terhadap daya beli dan pergerakan harga komoditas acuan global turut mempengaruhi penyaluran kredit keseluruhan di Sumatera Selatan.
- Di lain sisi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 7,03% (yoY) yang tetap positif namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 8,13% (yoY). Pada periode laporan, kinerja DPK disumbang oleh pertumbuhan pada instrumen Giro (11,89% (yoY)) dan Tabungan (9,05% (yoY)) serta ditahan oleh instrumen deposito yang mengalami kontraksi (-1,62% (yoY)). Kinerja DPK tetap tumbuh positif di tengah pembelian aset-aset yang mempunyai imbal hasil, baik aset keuangan maupun riil.
- Sejalan dengan penyaluran kredit secara umum, penyaluran kredit UMKM triwulan III 2025 mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh 2,80% (yoY) yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM skala kecil pada periode ini merupakan penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 18,41% (yoY). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar terkontraksi sebesar -5,93% (yoY) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

## 4.1 Kondisi Umum

Pada triwulan III 2025, kinerja perbankan Provinsi Sumatera Selatan secara umum mengalami pertumbuhan meskipun melambat. Kondisi ini tercermin melalui indikator kinerja utama perbankan yaitu nilai aset, dana pihak ketiga (DPK), dan penyaluran kredit.

Aset perbankan pada periode laporan tercatat tumbuh sebesar 1,79% (yoy), meskipun relatif melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,13% (yoy). Kinerja aset perbankan ini utamanya disumbang oleh kinerja penyaluran kredit perbankan yang turut mengalami perlambatan, yakni tumbuh sebesar 3,00% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 8,79% (yoy).

Di lain sisi, perkembangan DPK tumbuh sebesar 7,03% (yoy) yang relatif melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya (Grafik 4-1). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan instrumen giro secara positif sebesar 11,89% (yoy) dan penurunan instrumen tabungan sebesar 9,05% (yoy). Instrumen giro menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah Kementerian Keuangan mulai menempatkan dana ke bank-bank Himbara pada September 2025. Sementara itu, instrumen tabungan mengalami penurunan, karena sebagian masyarakat memilih menarik dana untuk membeli emas menyusul lonjakan harga emas yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kebijakan penempatan dana pemerintah ini memberikan dampak likuiditas terhadap giro, sedangkan pergeseran preferensi masyarakat ke emas melemahkan pertumbuhan tabungan.

Nominal pada DPK perbankan di triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp117,35 triliun, angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp114,16 triliun (Tabel 4-1). Secara *quarter-on-quarter*, peningkatan DPK utamanya disumbang oleh instrumen giro yang mengalami peningkatan sebesar 11,89% (yoy) pada triwulan III 2025, kinerja ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 4,82% (yoy) (Tabel 4-2). Peningkatan signifikan pada giro di triwulan ini sejalan dengan transmisi dana dari Kementerian Keuangan ke Himbara sebesar Rp 200 triliun mulai tanggal 12 September 2025. Aliran dana besar ini memperkuat likuiditas perbankan dan memperbesar porsi instrumen giro yang relatif memiliki *cost of fund* rendah. Kenaikan giro yang substansial juga mencerminkan bahwa perputaran uang di perekonomian menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini

karena peningkatan transaksi giro menunjukkan perusahaan memiliki likuiditas lebih tinggi untuk kegiatan operasional, mendorong aktivitas produksi dan volume penjualan, serta akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

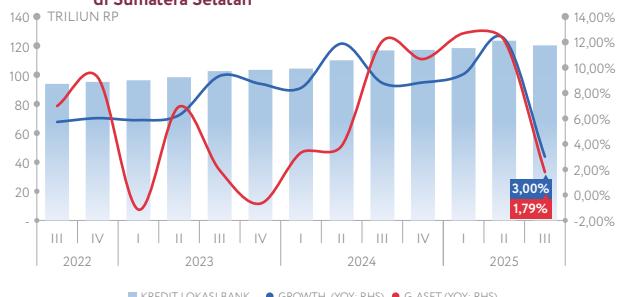
Guna memastikan pertumbuhan bisnisnya, perbankan perlu terus mempertimbangkan untuk menguatkan kinerja CASA yang berkelanjutan antara lain melalui digitalisasi yang diikuti dengan perbaikan *customer experience* sekaligus peningkatan kampanye literasi dan inklusi keuangan. Digitalisasi berbasis *customer experience* diyakini efektif untuk menarik nasabah karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi yang didukung dengan rekomendasi produk yang terpersonalisasi untuk setiap nasabah. Selanjutnya, kampanye literasi dan inklusi keuangan dinilai dapat meningkatkan jumlah nasabah karena dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat mengenai layanan perbankan.

Lebih lanjut, kinerja pembiayaan perbankan pada periode laporan sejalan dengan tingkat Loan-to-Deposit Ratio (LDR) perbankan Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat sebesar 105,18% atau mengalami sedikit peningkatan dari periode triwulan II 2025 sebesar 104,71%. Kinerja ini menegaskan bahwa perbankan di Sumatera Selatan mempunyai rasio likuiditas dimana posisi LDR lebih tinggi dibandingkan treshold (80%-92%).

Sejalan dengan indikasi risiko likuiditas yang meningkat melalui kinerja LDR, tingkat Non-Performing Loan (NPL) berada di tingkat 2,52% pada periode laporan. Kinerja NPL pada periode ini lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang berada pada tingkat 1,66%. Meskipun berada di bawah treshold (5%), kinerja ini mengindikasikan bahwa terjadi pelemahan pada kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kewajiban ditengah himbauan perbankan untuk meningkatkan lending seiring dengan relaksasi kebijakan Makroprudensial.

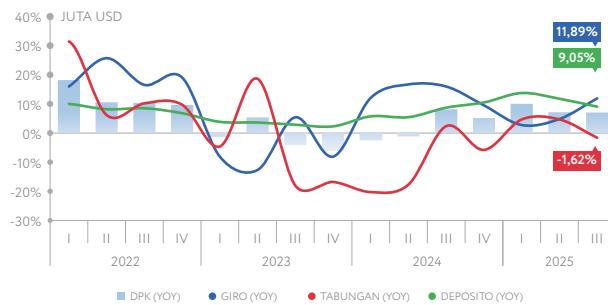
Meskipun demikian, perbankan tetap berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan giro yang sehat, perbankan secara berkesinambungan mengimplementasikan berbagai strategi, antara lain dengan menambah ekosistem pembayaran digital, menjaga stabilitas

Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan DPK dan Aset Perbankan di Sumatera Selatan

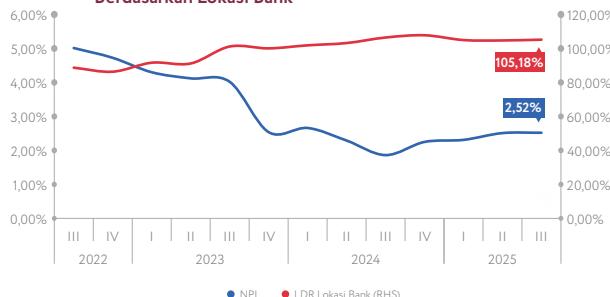


Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.3 Perkembangan Risiko perbankan Sumatera Selatan Berdasarkan Lokasi Bank**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

sistem dan keamanannya, serta menyalurkan kredit secara prudent dengan menjaga NPL dan CAR, dan memperhatikan LDR. Selain itu, perbankan juga terus mendorong pengelolaan dana secara lebih produktif dengan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang selektif, terutama pada sektor-sektor prioritas dan unggulan di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dengan demikian, peningkatan giro tidak hanya memperkuat basis likuiditas perbankan, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan fungsi intermediasi dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## 4.2 Pembiayaan Daerah

**Kondisi pembiayaan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025 tetap menunjukkan pertumbuhan positif, dengan laju yang cukup stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pertumbuhan kredit modal kerja pada triwulan berjalan tercatat sebesar 2,31% (yo), tetapi tumbuh positif dan cukup stabil dibandingkan capaian pada periode sebelumnya yang tumbuh 2,19 (yo). Sementara itu, kredit investasi menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 13,48% (yo) (grafik 4-10), mencerminkan adanya peningkatan aktivitas pembiayaan yang diarahkan untuk mendukung ekspansi usaha jangka panjang.

Pertumbuhan penyaluran kredit di Sumatera Selatan pada triwulan laporan mencerminkan tetap kuatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian ke depan. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya permintaan domestik, stabilitas harga komoditas utama, serta kepercayaan terhadap kondisi makroekonomi yang kondusif. Hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025 juga menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai kembali mengandalkan pembiayaan perbankan, khususnya untuk ekspansi usaha dan penambahan modal kerja.

Selain itu, kebijakan moneter yang tetap akomodatif serta stabilitas sistem keuangan mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit secara selektif namun progresif. Kondisi ini menjadi indikasi positif bahwa dunia usaha telah mampu beradaptasi dengan tantangan pasca pandemi dan mulai mengaktifkan kembali berbagai rencana investasi yang sempat tertunda.

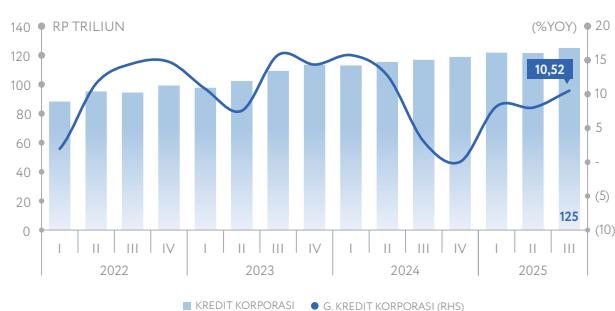
Di sisi lain, perbankan juga menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, yang diiringi dengan upaya

peningkatan kualitas layanan bagi debitur eksisting serta perluasan jangkauan kepada debitur baru. Dengan demikian, kinerja positif ini diharapkan dapat terus memperkuat peran intermediasi perbankan dalam mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.

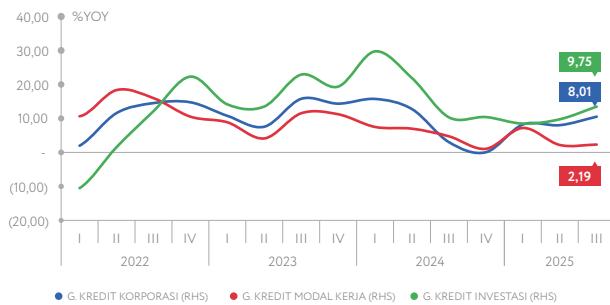
Berdasarkan hasil *liaison* sepanjang tahun 2025, perbankan di Sumatera Selatan menyampaikan bahwa berbagai upaya strategis terus dilakukan untuk memperkuat kinerja penyaluran kredit, baik melalui perbaikan internal maupun kolaborasi eksternal. Langkah-langkah tersebut mencakup optimalisasi proses penilaian kredit, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan layanan berbasis teknologi digital yang kini menjadi salah satu andalan utama dalam memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan perbankan. Meski demikian, perbankan tetap mempertahankan pendekatan konvensional melalui pelayanan tatap muka, sehingga dapat menjangkau beragam segmen nasabah. Dalam menghadapi tantangan infrastruktur, khususnya keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil, perbankan secara proaktif meningkatkan kuantitas dan kualitas agen *Laku Pandai* sebagai solusi alternatif untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di daerah yang belum memiliki akses memadai terhadap jaringan internet, ATM, maupun kantor cabang. Lebih lanjut, perbankan di Sumatera Selatan juga menekankan pentingnya inovasi dalam strategi pembiayaan, termasuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan optimistis dapat terus memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

### 4.2.1 Perkembangan Pembiayaan Korporasi

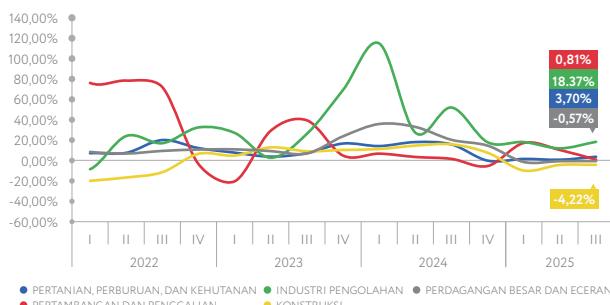
**Pertumbuhan pembiayaan korporasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 10,52% (yo).** Pertumbuhan pada triwulan berjalan tersebut cenderung meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,01% (yo) (Grafik 4-5). Kinerja kredit korporasi yang masih tumbuh positif, seiring dengan kredit modal kerja yang turut mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,31% (yo). Secara nominal, penyaluran kredit modal kerja korporasi di Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat senilai Rp70,64 triliun.

**Grafik 4.4 Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

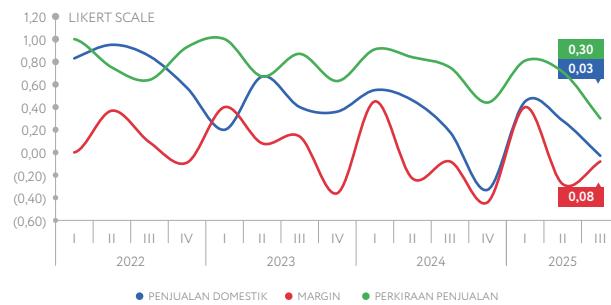
**Grafik 4.7 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

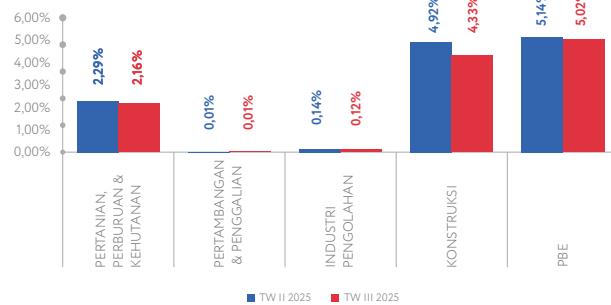
**Peningkatan pembiayaan korporasi pada triwulan III 2025** utamanya bersumber dari kinerja kredit modal yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,31% (yoY) (Grafik 4-6). Kondisi ini menunjukkan kepercayaan diri dalam mengambil langkah investasi, meskipun masih ada kecenderungan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Dari hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, para pelaku usaha disinyalir mulai menunjukkan performa ke arah positif meskipun nilainya relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha mulai mengarah pada fase ekspansi meskipun perkembangannya masih berjalan secara bertahap. Di sisi lain, perbankan terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial secara *prudent* dengan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perekonomian domestik, global serta potensi bisnis calon debitur.

Komitmen perbankan tak lepas dari optimisme yang terekam dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Triwulan III-2025, dimana hasil survei tercatat berada pada level 65 (zona optimis). Optimisme perbankan tersebut didorong oleh ekspektasi akan membaiknya kondisi makroekonomi, berlanjutnya peningkatan fungsi intermediasi perbankan dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi.

Optimisme perbankan tersebut juga sejalan dengan hasil liaison yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada berbagai pelaku usaha, di mana pelaku usaha mencatatkan sentimen positif atas efisiensi dan

**Grafik 4.6 Likert Scale Penjualan Domestik, Margin, dan Perkiraan Penjualan**

Sumber: Liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan diolah

**Grafik 4.8 NPL Kredit Korporasi Sumatera Selatan**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

produktivitas usaha, yang selanjutnya mendorong peningkatan margin perusahaan. Sentimen ini tercermin dari hasil Likert Scale margin pada Triwulan III 2025 yang tercatat sebesar -0,08 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar -0,28 (Grafik 4-7). Peningkatan ini mengindikasikan performa perusahaan yang semakin membaik di masa mendatang.

Berdasarkan lapangan usaha, kredit korporasi di Sumatera Selatan triwulan III 2025 utamanya didominasi oleh pertumbuhan positif penyaluran kredit pada lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan, LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan, dan LU Pertambangan dan Penggalian. Secara spasial, pertumbuhan penyaluran kredit pada 5 (lima) sektor utama di Sumatera Selatan di triwulan berjalan ditopang oleh LU Industri Pengolahan yang tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 18,37% (yoY). Lebih lanjut, penyaluran kredit korporasi pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dan LU Pertambangan dan Penggalian, dan tercatat sebesar 3,70% (yoY) dan 0,81% (yoY).

**Kinerja kualitas kredit korporasi Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada triwulan III 2025.** NPL kredit korporasi pada triwulan berjalan tercatat sebesar 1,97% mengalami peningkatan dibandingkan dengan NPL periode sebelumnya yang tercatat sebesar 2,01% (Grafik 4-9). Ditinjau dari jenis penggunaan kreditnya, peningkatan kinerja kredit utamanya bersumber dari meningkatnya kualitas kredit modal kerja yang tercatat sebesar 2,23% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,49%. Di sisi lain, kualitas kredit investasi mengalami penurunan menjadi 1,34% dari sebelumnya sebesar 1,32%.

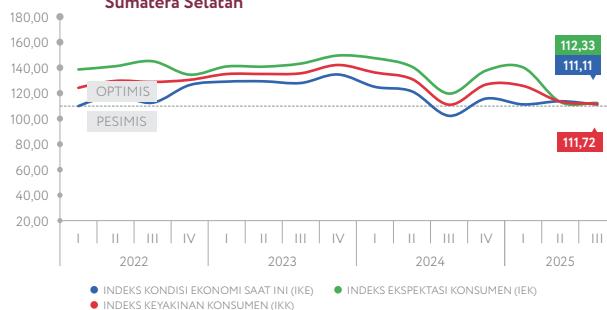
Sementara jika ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, peningkatan kualitas kredit disebabkan oleh kualitas kredit pada sebagian besar sektor utama yaitu LU Industri Pengolahan dan PBE yang masing-masing sebesar 0,12% dan 5,02%. Meski demikian, terdapat penurunan kualitas kredit pada Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian yang berada di tingkat 0,02%.

## 4.2.2 Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga

**Komponen konsumsi rumah tangga (RT) memegang peranan strategis sebagai motor penggerak utama permintaan dalam perekonomian, termasuk di wilayah Sumatera Selatan.** Konsumsi oleh rumah tangga tidak hanya menjadi pendorong langsung bagi aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa, tetapi juga menciptakan siklus ekonomi yang saling terhubung.

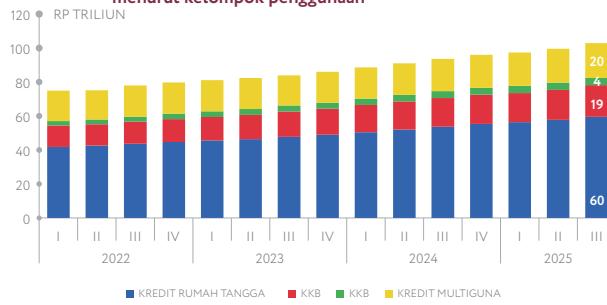
Kinerja rumah tangga Provinsi Sumatera Selatan tetap tumbuh meskipun melambat, sejalan dengan keyakinan rumah tangga terhadap kondisi perekonomian pada triwulan III 2025. Pada periode laporan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Sumatera Selatan triwulan III 2025 tercatat sebesar 4,89% (yo), sedikit melambat dibandingkan pada triwulan II 2025 yang tercatat 4,93% (yo). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut juga sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) KPw BI Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap kondisi masih berada pada titik optimis meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara khusus, Indeks Keyakinan Konsumen pada periode laporan tercatat sebesar 111,72.

**Grafik 4.9 Indeks Keyakinan Konsumen dan Komponennya Sumatera Selatan**



Sumber: Survei Konsumen BI Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 4.11 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan menurut kelompok penggunaan**



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Penyaluran kredit pada rumah tangga Provinsi Sumatera Selatan tetap mengalami pertumbuhan meskipun melambat.** Sejalan dengan PDRB konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh 4,89% (yo) pada triwulan III 2025, kredit sektor rumah tangga turut mengalami pertumbuhan sebesar 10,94% (yo), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 11,19% (yo) dan triwulan III 2024 yang sebesar 12,49% (yo).

Pertumbuhan penyaluran kredit utamanya disumbang oleh penyaluran kredit multiguna dengan pangsa sebesar 37,04% diikuti oleh kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar 33,70% dan kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan pangsa sebesar 7,59% dari total kredit rumah tangga.

Berdasarkan komposisi penyaluran kredit rumah tangga, kredit multiguna mengalami pertumbuhan sebesar 8,18% (yo), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,85% (yo). Kinerja ini didorong oleh karakteristik multiguna yang mempunyai keleluasaan penggunaan untuk berbagai kebutuhan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Kredit multiguna semakin diminati masyarakat sebagai solusi praktis untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari biaya pendidikan hingga modal usaha. Perbankan juga memprakirakan bahwa kinerja kredit multiguna optimis akan terus meningkat pada periode mendatang.

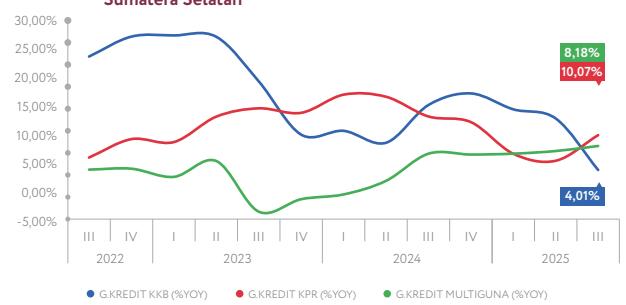
Di lain sisi, penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit perumahan (KPR) masing-masing tumbuh lebih lambat secara *year-on-year*. Pertumbuhan penyaluran KKB dan KPR pada periode laporan secara berurutan tumbuh sebesar 4,01% (yo) dan

**Grafik 4.10 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan**

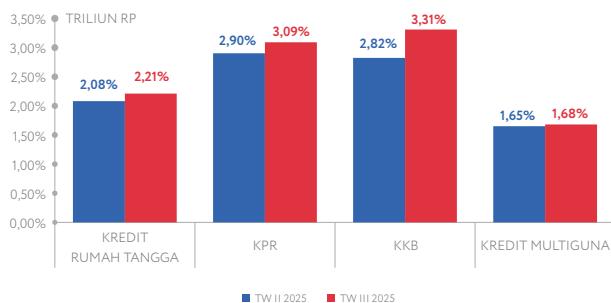


Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.12 Pertumbuhan Komposisi Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan**



Sumber: LBN BI Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 4.13 NPL Kredit Rumah Tangga Sumatera Selatan**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

10,07% (yoY) dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 15,31% (yoY) dan 13,31% (yoY). Perlambatan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat yang relatif masih terbatas, sehingga lebih memprioritaskan kebutuhan dasar. Namun demikian, pertumbuhan KPR diproyeksikan akan bounce back yang didorong oleh meningkatnya realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Sumsel melalui Himbara dan BPD. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya seperti dukungan regulasi dari pemerintah pusat, transparansi dalam penyaluran bantuan, hingga kerja sama dengan pengembang lokal.

**Sejalan dengan kinerja dan kondisi penyaluran kredit rumah tangga, indikator risiko penyaluran kredit tetap terjaga.** Kinerja NPL pada kredit rumah tangga tercatat meningkat sebesar 2,21% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 2,08%. Penurunan kualitas kredit rumah tangga ini disumbang dari kinerja NPL pada komponen KPR, KKB, dan Kredit Multiguna yang masing-masing tercatat sebesar 3,09%, 3,31%, dan 1,68%. Angka kualitas kredit tersebut cenderung meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,90%, 2,82%, dan 1,65%. (Grafik 4-13).

### 4.3 Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM

Pada triwulan III 2025, total penyaluran kredit UMKM Provinsi Sumatera Selatan tetap mengalami pertumbuhan meskipun melambat. Secara umum, kredit yang disalurkan ke sektor UMKM pada triwulan III 2025 mengalami pertumbuhan positif yang tercatat sebesar 2,08% (yoY) dengan *outstanding* sebesar Rp47,25 triliun. Namun demikian, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 27,72% (yoY).

**Berdasarkan skala usahanya, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM Sumatera Selatan disumbang oleh penyaluran kredit UMKM skala kecil.** Kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil mencatatkan kinerja yang tetap tumbuh, masing-masing sebesar 18,41% (yoY). Di lain sisi, penyaluran kredit UMKM mikro dan menengah mengalami kontraksi secara berurutan sebesar 5,93% (yoY) dan 2,51% (yoY). Kinerja penyaluran kredit UMKM mikro dan kecil memberikan tekanan terhadap penyaluran kredit UMKM keseluruhan. Namun demikian, besarnya pengaruh penyaluran kredit UMKM skala kecil turut mendorong kinerja positif

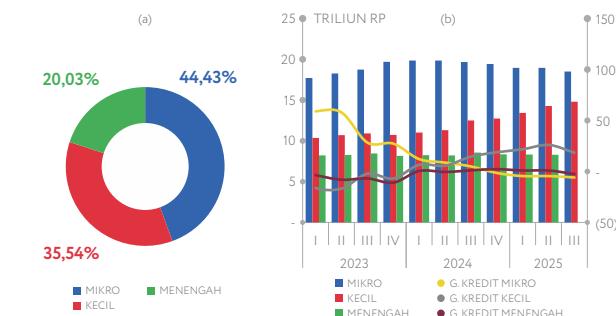
**Grafik 4.14 Perkembangan Kredit UMKM di Sumatera Selatan (Rp TRILIUN)**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

penyaluran kredit UMKM Sumatera Selatan secara keseluruhan. Kinerja ini ditunjukkan dengan dominasi pangsa penyaluran kredit UMKM skala kecil yang mendominasi dengan sebesar 35,54%.

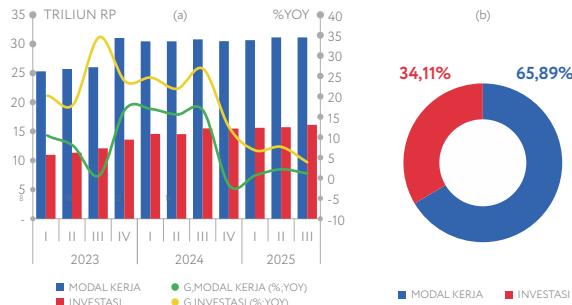
**Realisasi penyaluran kredit UMKM Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 juga masih didominasi dengan penyaluran dalam bentuk kredit modal kerja.** Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM utamanya disalurkan dalam bentuk modal kerja dengan pangsa sebesar 65,89% diikuti oleh investasi dengan pangsa sebesar 34,11%. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kebutuhan UMKM di wilayah Sumatera Selatan masih berpusat pada operasional harian daripada akuisisi maupun penambahan aset jangka menengah hingga panjang. Secara nominal, kredit modal kerja UMKM pada periode laporan mencapai *outstanding* sebesar Rp31,13 triliun atau tumbuh sebesar 1,10% (yoY) dan kredit investasi mencapai *outstanding* sebesar Rp16,11 triliun atau tumbuh sebesar 3,85% (yoY).

**Berdasarkan lapangan usahanya, penyaluran kredit UMKM di Sumatera Selatan tetap terjaga pada periode laporan.** Kinerja penyaluran kredit didominasi pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan pangsa sebesar 39,75%, diikuti oleh LU perdagangan sebesar 35,31%, LU konstruksi sebesar 4,79%, LU industri pengolahan sebesar 3,15%, dan LU pertambangan sebesar 0,49%. Dominasi LU Pertanian Perburuan, dan Kehutanan serta LU Perdagangan menunjukkan fundamental UMKM sebagai perekonomian daerah cukup *robust* dalam mendukung pertumbuhan daerah secara berkelanjutan melalui penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan konsumsi masyarakat.

**Grafik 4.15 Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Skala Usaha: (a) Pangsa Kredit UMKM; dan (b) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoY)**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.16 Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Penggunaan : (a) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoY); dan (b) Pangsa Kredit UMKM**



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

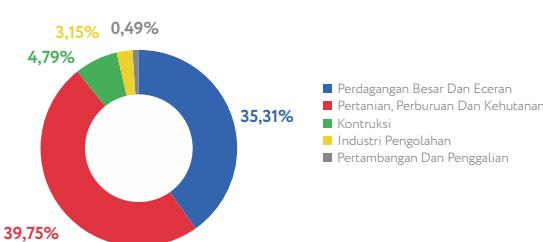
**Kinerja penyaluran kredit pada LU strategis yang positif turut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit UMKM.** Pada periode laporan, kinerja penyaluran kredit pada LU pertanian mengalami pertumbuhan hingga 6,00% (yoY) meneruskan tren periode sebelumnya dengan *outstanding* sebesar Rp16,55 triliun. Peningkatan kompetisi UMKM yang mendorong peningkatan nilai tambah dan harga yang bergerak di bidang pertanian diikuti oleh situasi global yang mendukung turut membantu terjaganya produksi LU dan kinerja penyaluran kredit. Sejalan dengan LU pertanian, LU konstruksi dan LU pertambangan dan penggalian turut mengalami pertumbuhan dengan masing-masing secara berurutan sebesar 5,26% (yoY) dan 12,65% (yoY). Hal ini didorong oleh lebih banyaknya proyek pembangunan maupun perbaikan

infrastruktur mikro/kecil di wilayah Sumatera Selatan pada LU konstruksi serta peningkatan kebutuhan eksplorasi sebagai sumber produksi pada LU Pertambangan dan penggalian.

**Secara agregat, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM turut disertai dengan kualitas kredit yang tetap terjaga pada periode laporan.** Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan berjalan tercatat sebesar 3,89% atau berada di bawah threshold tingkat kritis penyaluran kredit. Kinerja NPL tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 4,14% yang mengindikasikan bahwa risiko penyaluran kredit cenderung menurun seiring dengan melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit. Berdasarkan kategori penerima, kualitas kredit UMKM ini ditekan oleh kinerja kualitas segmen UMKM Mikro dan Kecil yang mengalami peningkatan menjadi masing-masing sebesar 4,45% dan 3,68% setelah sebelumnya tercatat masing-masing 4,52% dan 3,68% pada periode sebelumnya.

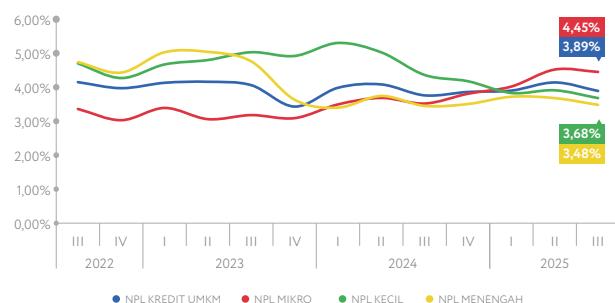
Berdasarkan lapangan usaha, NPL penyaluran kredit UMKM masih disumbang utamanya oleh LU konstruksi dengan rasio 10,01%. Proses bisnis dengan tingkat pengembalian modal yang lebih lama diikuti oleh risiko inheren yang tinggi turut menjadi andil pada tingginya NPL pada LU Konstruksi. Selanjutnya, NPL pada LU pertanian sebesar 3,04%, LU pertambangan dan penggalian sebesar 1,27%, LU Industri Pengolahan sebesar 3,83%, dan LU Perdagangan besar dan eceran sebesar 4,53% mempunyai NPL di tingkat yang aman. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM yang tersebar di LU sektor strategis secara umum mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang cukup baik.

**Grafik 4.17 Pangsa Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan**



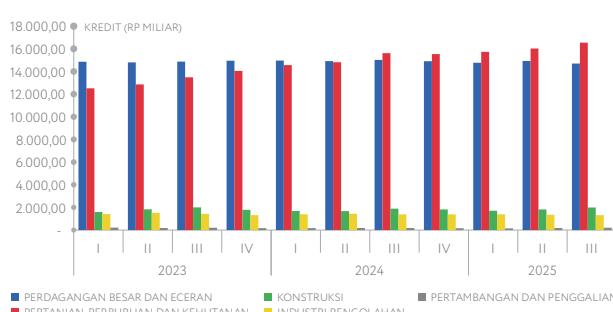
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.19 Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumatera Selatan**

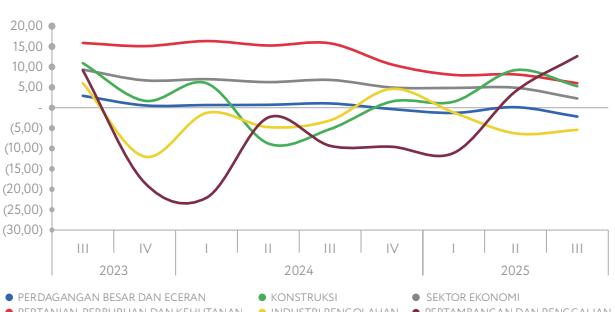


Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.18 Pertumbuhan Sektoral Kredit UMKM dan Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Triwulan III 2025**



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah



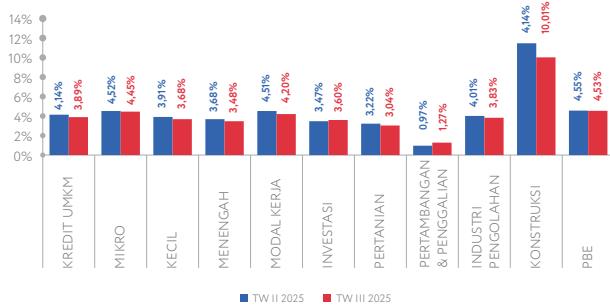
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, diperlukan dukungan stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan yang kokoh. Untuk mendukung upaya tersebut salah satunya diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kontribusi UMKM, salah satunya dilakukan melalui pemasaran produk UMKM secara global. Namun demikian, persaingan pasar global saat ini tidak mudah. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Dalam rangka mendukung pelaku UMKM agar dapat memberikan kontribusi maksimalnya serta untuk mewujudkan porsi penyaluran kredit UMKM menjadi sebesar 30% pada tahun 2024, Bank Indonesia terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM yang dilakukan melalui kebijakan baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*. Dari sisi *demand*, UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga mampu masuk ke dalam kategori bankable, melalui berbagai bentuk program bantuan teknis berlandaskan 3 pilar, yaitu (1) Korporatisasi, melalui penguatan kelembagaan dan perluasan mitra, (2) Peningkatan kapasitas secara *end-to-end*, melalui penguatan kewirausahaan dan perluasan pasar dan (3) Pembiayaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan perluasan digitalisasi keuangan. Khususnya dalam pilar pembiayaan, Bank Indonesia mendorong percepatan akses pembiayaan UMKM melalui penyediaan data & informasi UMKM yang potensial mendapat pembiayaan (BISAID), penyediaan dan pendampingan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan secara digital (SIAPIK), serta fasilitasi pelaksanaan *business matching* pembiayaan bersama perbankan.

Sementara itu, dari sisi *supply*, salah satunya melalui penerbitan ketentuan tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Upaya mendorong efektivitas implementasi RPIM khususnya pada modalitas 1 dan modalitas 2 dapat dilakukan dalam berbagai strategi antara lain: i) korporatisasi UMKM melalui sinergi dengan Pemerintah; ii) mendorong kemitraan antara bank dengan korporasi untuk pembiayaan rantai pasok; serta iii) mendorong kerja sama bank dengan berbagai lembaga mitra penyalur kredit UMKM. Selain itu, ke depan, Bank Indonesia masih terus berkomitmen terhadap pengembangan UMKM Indonesia melalui pemberian dukungan di berbagai even seperti Karya Kreatif

Indonesia (KKI) termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia yang menjadi stimulus bagi UMKM Sumatera Selatan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitasnya menjadi lebih baik lagi.

**Grafik 4.20 Perkembangan NPL Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan**



## BOKS 4 :

**SERU SRIWIJAYA X SUSUR SUNGAI MUSI****Semarak UMKM (SERU) Sriwijaya x Susur Sungai Musi 2025 Sebagai Komitmen dalam Penguatan Peran UMKM Pendukung Perekonomian Sumatera Selatan yang Berkelanjutan**

Sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan 6th **Sriwijaya Economic Forum 2025** pada 24 s.d. 26 Oktober 2025 yang mengangkat tema "Sinergi dan Inovasi: Kunci Penguatan Peran UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi Berkelanjutan". Kegiatan ini menjadi puncak dari program yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dalam rangkaian kebijakan pengembangan UMKM.

**Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bp. Dr. H. Herman Deru,** Bersama dengan Anggota Komisi XI, Bertu Merlas, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Bidang 3, Juda Agung, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti Forkopimda, instansi vertikal, perbankan, asosiasi UMKM, serta Masyarakat umum. Hal ini menguatkan statement bahwa sinergi dan kolaborasi program BI – Pemerintah – Masyarakat merupakan kunci sukses dalam kesinambungan UMKM sebagai katalisator perekonomian daerah.

**Inovasi atau pembaruan dari SERU Sriwijaya tahun 2025 adalah mengangkat isu penguatan hilirisasi UMKM sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi berbasis model hijau dan berkelanjutan.** Sejalan dengan isu tersebut, fokus yang menjadi cakupan antara lain terkait penguatan nilai tambah produk UMKM andalan Sumatera Selatan, dorongan inovasi UMKM hijau dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, digitalisasi UMKM baik sektor produksi



Gambar Boks D.1. Opening Ceremony SERU Sriwijaya x SSM 2025

Sumber: BI Sumsel



Gambar Boks D.2. Antusiasme Ibu-ibu dalam SERU Sriwijaya x SSM 2025

Sumber: BI Sumsel

hingga pembayaran (*end-to-end*), serta optimalisasi dan komitmen dalam kelancaran transmisi kebijakan BI utamanya kebijakan makroprudensial dalam meningkatkan penyaluran kredit perbankan di Sumatera Selatan.

Lebih lanjut, penguatan nilai tambah diwujudkan melalui dorongan untuk pengolahan produk kopi di dalam Provinsi Sumatera Selatan, dimana terdapat talkshow hilirisasi kopi dan pendalaman kemampuan penggiat kopi melalui *Cup Taster* pertama di Sumatera Selatan. Dalam penguatan UMKM berbasis hijau dengan model bisnis berkelanjutan, talkshow dan praktik pengolahan kain sisa (perca) dilaksanakan dengan melibatkan PIPEBI, Kelompok PKK, serta UMKM Wastra/RTW. Dan penguatan UMKM sektor wastra untuk terus berinovasi dengan mengintegrasikan *digital payment system* digencarkan oleh BI Sumsel melalui sosialisasi QRIS *merchant* dan tap serta Cinta Bangga Paham Rupiah.

Dan tidak lupa juga sebagai bentuk apresiasi mitra BI Sumsel dalam mendorong perkembangan UMKM Unggulan di Sumatera Selatan, BI Sumsel menganugerahkan beberapa penghargaan, diantaranya adalah:

- Apresiasi Mitra Kerja Terkolaboratif: Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan
- Apresiasi Penyaluran Program Satu Wakaf Melalui Aplikasi Digital Keuangan Sosial Syariah: Dompet Dhuafa
- Apresiasi UMKM Terinovatif Seru Sriwijaya 2025: Pyo Jewelry
- Apresiasi Penjualan Tertinggi Seru Sriwijaya 2025 PUTROHRAMADHAN dan My Bakery, dan
- Apresiasi UMKM Terkolaboratif Seru Sriwijaya 2025: Beskabean Coffee Roastery dan Sriwijaya Sewing Craft



Gambar Boks D.3. Penerima Apresiasi SERU Sriwijaya x SSM 2025

Sumber: BI Sumsel

Rangkaian SERU Sriwijaya 2025 secara umum berhasil menampilkan exhibition produk unggulan dari 44 (empat puluh empat) UMKM binaan/mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan serta berhasil mencatatkan transaksi penjualan yang menawan. Hal ini menjadi komitmen BI Sumsel untuk terus memperkuat ekosistem UMKM demi mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang *robust* dan berkelanjutan.

Selain itu juga, guna mendukung kelancaran aktivitas roda perekonomian di Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan senantiasa terus menjamin ketersediaan uang Rupiah salah satunya melalui program Susur Sungai Musi. Kegiatan yang bersinergi dengan TNI Angkatan Laut Palembang dalam melakukan layanan penukaran uang Rupiah ke daerah *blind spot* merupakan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat salah satunya di Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan *clean money policy*, memastikan bahwa masyarakat di seluruh pelosok Sumatera Selatan khususnya pesisir Sungai Musi memiliki akses yang sama untuk mendapat ketersediaan uang Rupiah dengan jumlah yang cukup, nominal yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan juga hadir membawa semangat Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah dalam rangkaian SSM 2025. Edukasi CBP Rupiah ini diberikan kepada Masyarakat pesisir Sungai Musi akan makna Rupiah, Cinta Rupiah dengan caranya mengenali keasliannya, Bangga Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa dan Paham Rupiah sebagai alat transaksi.



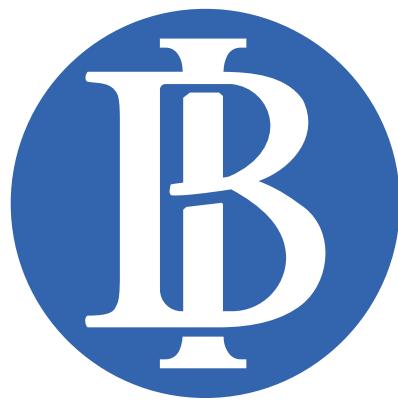
Gambar Boks D.4. Opening Ceremony Susur Sungai Musi (SSM) 2025

Sumber: BI Sumsel



Gambar Boks D.5. Edukasi CBP Rupiah dan Antusias Layanan Susur Sungai Musi (SSM) 2025

Sumber: BI Sumsel



05

---

# Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah





**Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal baik melalui metode tunai maupun nontunai memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025.**

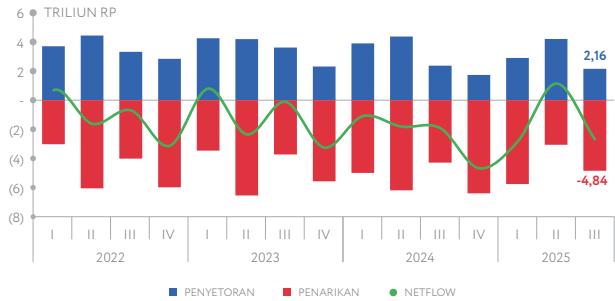
- Sesuai dengan pola historis tahunan, aliran transaksi uang kartal mengalami *net outflow* pada triwulan III 2025.
- Tingginya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan berbasis tunai di sektor-sektor tertentu seperti perdagangan, perkebunan (karet, sawit, kopi), dan UMKM.
- Penyaluran kredit pemerintah memicu peningkatan kebutuhan uang tunai, sehingga mendorong terjadinya *net outflow* pada triwulan III 2025.
- Di sisi lain, kinerja sistem pembayaran nontunai pada triwulan III 2025 terus menunjukkan akselerasi, sejalan dengan meningkatnya adopsi instrumen digital di berbagai lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

## 5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan III 2025, peredaran uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan *net outflow* yang mengindikasikan peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat dikarenakan data historis dan panen raya kopi. Triwulan III laporan mencatatkan peredaran uang kartal di Sumatera Selatan mengalami *net outflow* sebesar Rp2,68 triliun. Realisasi *net outflow* tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp1,14 triliun (Grafik 5-1), hal ini dikarenakan pada triwulan sebelumnya terdapat momen HKBN yaitu Hari Raya Idul Fitri. Transaksi penarikan uang kartal tercatat sebesar Rp4,84 triliun dengan peningkatan sebesar 13,05 % (yoY), sementara transaksi penyetoran uang kartal pada periode yang sama tercatat sebesar Rp2,16 triliun dengan penurunan sebesar 8,88% (yoY).

Pelaksanaan kegiatan program edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) secara masif pada triwulan III 2025 turut membangun kesadaran masyarakat dan perbankan terhadap pelaporan uang yang diragukan keasliannya ke Bank Indonesia. Adapun jumlah uang palsu yang dilaporkan pada periode berjalan sejumlah 1.388 lembar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 1.053 lembar. Adapun kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan secara konsisten yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk di dalamnya instansi perbankan, pendidikan, aparatur negara, pers, dan sosial media di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan program ini, diharapkan pemahaman masyarakat dan stakeholders di Sumatera Selatan dalam mengenali dan merawat uang Rupiah terus meningkat, sehingga uang Rupiah yang beredar dimasyarakat dalam kondisi layak edar dan terhindar dari peredaran uang palsu.

Grafik 5.1 Aliran Uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan



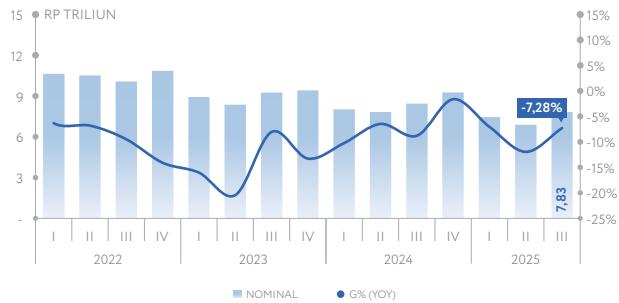
Sumber: Bank Indonesia, diolah

## 5.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

### 5.2.1 Transaksi SKNBI dan BI-RTGS

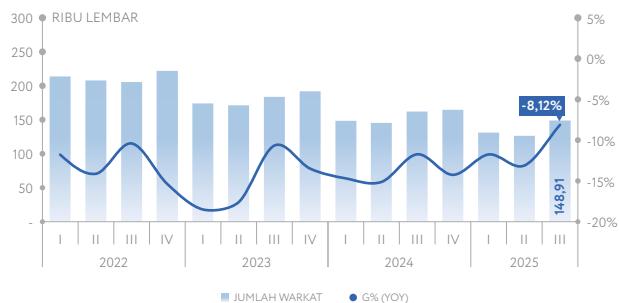
Perkembangan transaksi pembayaran ritel pada Triwulan III 2025 menunjukkan dinamika yang terus bergerak menuju lanskap digital, sejalan dengan arah kebijakan Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menekankan interoperabilitas, efisiensi, serta inklusivitas. Namun demikian, proses transisi menuju sistem pembayaran yang semakin digital

Grafik 5.2 Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Sumatera Selatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah Warkat Transaksi Kliring Sumatera Selatan

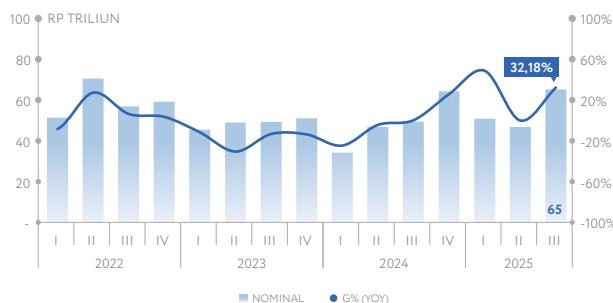


Sumber: Bank Indonesia, diolah

jugalah menciptakan pola pergeseran antar-instrumen yang perlu dicermati secara strategis. Transaksi pembayaran ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan III 2025 masih mengalami perlambatan baik dari sisi nominal maupun volume secara tahunan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tren digitalisasi pembayaran yang berpotensi mengalihkan sebagian besar transaksi kecil ke *platform* pembayaran non-kliring. Nominal transaksi perputaran kliring pada triwulan III 2025 tercatat Rp7,83 triliun atau terkontraksi sebesar 7,28% (yoY). Angka ini menunjukkan kontraksi yang lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan kontraksi hanya sebesar 11,95% (yoY) (Grafik 5-2). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan jumlah warkat pada triwulan III 2025 juga tercatat masih mengalami kontraksi sebesar 8,12% (yoY) dengan jumlah warkat sebanyak 148,91 ribu warkat (Grafik 5-3). Penurunan transaksi kliring ini disebabkan oleh pergeseran preferensi masyarakat ke sistem pembayaran non-kliring, antara lain BI-FAST dan QRIS. BI-FAST mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai opsi pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal dengan sistem *real time* 24 jam. Di beberapa wilayah, termasuk Sumatera Selatan, perbankan melaporkan bahwa transaksi korporasi seperti pembayaran vendor, *payroll*, dan *settlement* operasional yang sebelumnya menggunakan kliring kini beralih ke BI-FAST.

Sementara itu, QRIS hadir sebagai solusi pembayaran yang lebih fleksibel sehingga memungkinkan pengguna melakukan transaksi yang dapat diakses melalui berbagai *platform* pembayaran tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan atau menggunakan perangkat khusus. Pergeseran ini mencerminkan semakin kuatnya adopsi ekosistem pembayaran digital yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi lebih tinggi dibandingkan sistem kliring konvensional.

Grafik 5.4 Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Sumatera Selatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS Sumatera Selatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 5.1 Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Selatan

KETERANGAN	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
<b>RTGS dari Provinsi Sumsel</b>												
Nilai (Rp Triliun)	45,40	49,01	49,27	51,07	34,20	46,85	49,35	64,23	50,86	46,82	65,23	
Volume	17.325	15.802	17.662	19.395	15.419	15.567	17.133	19.367	16.523	13.982	16.726	

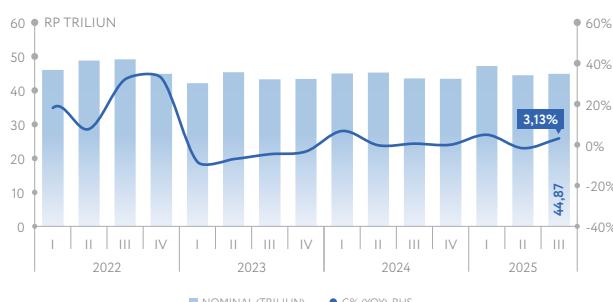
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pada sisi lain, aktivitas transaksi melalui BI-RTGS pada triwulan III 2025 tercatat menguat baik dari sisi nilai maupun volume (Tabel 5-1). Dari sisi nominal, total transaksi RTGS tercatat sebesar Rp65,23 triliun (Grafik 5-4), atau meningkat 32,18% (yoY). Kinerja ini berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih mencatat penurunan hingga 0,07% (yoY). Dari sisi volume, jumlah setelmen mencapai 16.726 transaksi, terkontraksi sebesar 2,37% (yoY), lebih tinggi dibandingkan penurunan sebesar 10,18% pada periode sebelumnya. Peningkatan nilai RTGS ini terutama mencerminkan meningkatnya aktivitas transaksi *wholesale* bernali besar, seperti settlement antarbank, pembayaran korporasi, transaksi keuangan pemerintah, serta aktivitas *treasury* dan perdagangan komoditas.

## 5.2.2 Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Pergeseran menuju instrumen **cashless, cardless, dan contactless** didorong dengan inovasi teknologi pembayaran. Meskipun demikian, dinamika di Sumatera Selatan memperlihatkan bahwa penggunaan instrumen berbasis kartu fisik masih menempati posisi yang kuat, terutama pada transaksi konvensional yang bergantung pada uang tunai.

Grafik 5.6 Jumlah Nominal Kartu ATM/D

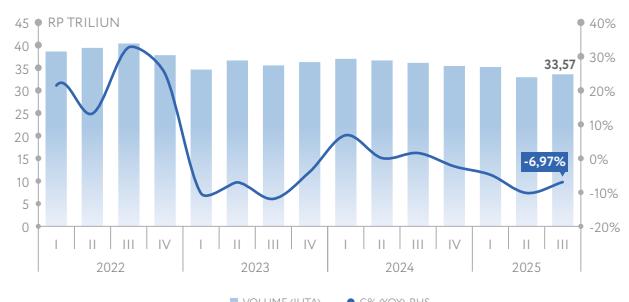


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pada triwulan III 2025, transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Sumatera Selatan menunjukkan penguatan, baik dari sisi nilai maupun volume. Dari sisi nominal, transaksi kartu ATM/Debit tercatat sebesar Rp44,87 triliun atau meningkat 3,13% (yoY). Kinerja ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan 1,68% (yoY) dengan capaian Rp44,49 triliun (Grafik 5-6). Dari sisi volume, transaksi tercatat sebanyak 33,57 juta, terkontraksi sebesar 6,97% (yoY), mengalami perbaikan dibandingkan penurunan 10,19% (yoY) pada triwulan sebelumnya dengan jumlah 32,89 juta transaksi (Grafik 5-7). Data ini menunjukkan bahwa penggunaan kartu tetap tinggi meski ekosistem pembayaran digital terus berkembang.

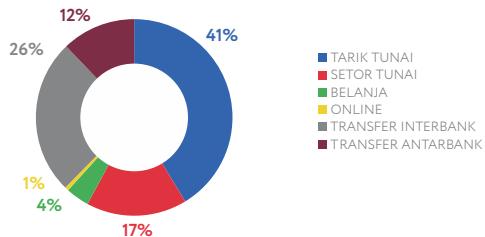
Struktur transaksi penggunaan kartu ATM/Debit masih sangat terkonsentrasi pada aktivitas tarik tunai yang mencapai Rp18,54 triliun atau sekitar 41% dari total nominal. Aktivitas lainnya terdiri dari transfer antarbank senilai Rp5,45 triliun (12%), transfer intrabank Rp11,45 triliun (26%), setor tunai Rp7,43 triliun (17%), transaksi belanja Rp1,74 triliun (4%), serta transaksi *online* Rp276,34 miliar (1%) (Grafik 5-8). Komposisi ini menegaskan bahwa fungsi kartu di Sumatera Selatan masih terkonsentrasi pada penarikan dan pemindahan dana, sementara pemanfaatannya untuk transaksi ritel dan *digital commerce* belum mengalami akselerasi signifikan.

Grafik 5.7 Volume Transaksi Kartu ATM/D



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.8 Pangsa Transaksi ATM/D

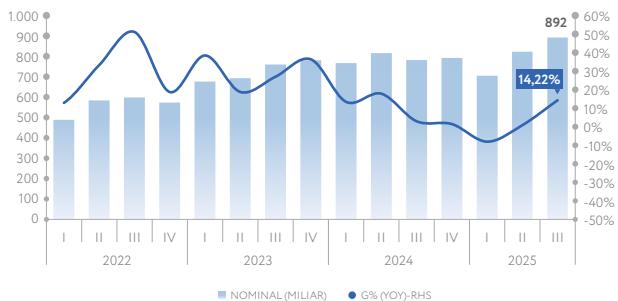


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain itu, jumlah kartu ATM/Debit yang beredar juga meningkat menjadi 8,77 juta kartu atau naik 9,42% (yoY). Angka ini mengalami penguatan dibandingkan dengan kondisi triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,17% (yoY) (Grafik 5-9).

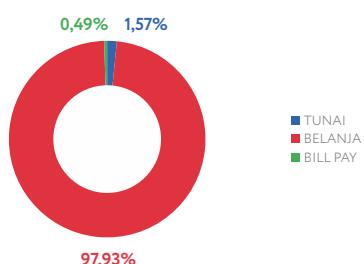
Secara keseluruhan, peningkatan transaksi kartu ATM/Debit, baik dari sisi nilai, volume, maupun jumlah kartu yang beredar, menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran di Sumatera Selatan telah menguat namun masih berada pada fase transisi. Pergeseran perilaku menuju transaksi nontunai berlangsung progresif, tetapi ketergantungan pada layanan berbasis tunai masih substansial sehingga diperlukan penguatan literasi, perluasan akseptansi, dan peningkatan integrasi layanan untuk mendorong migrasi yang lebih cepat menuju ekosistem pembayaran digital.

Grafik 5.10 Nominal Transaksi Kartu Kredit



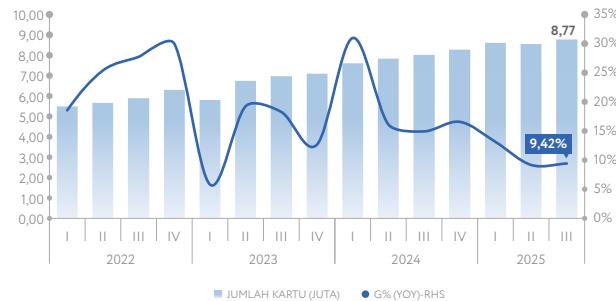
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12 Pangsa Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

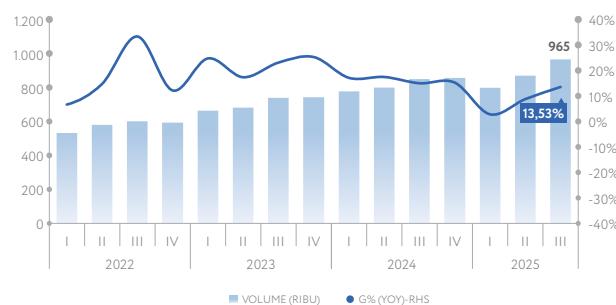
Grafik 5.9 Jumlah Kartu ATM/D



Sumber: Bank Indonesia, diolah

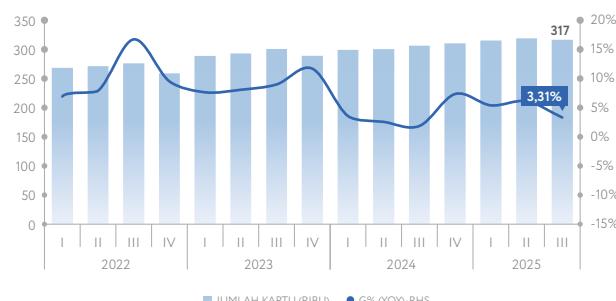
Pada triwulan III 2025, transaksi kartu kredit di Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan kinerja setelah sempat mengalami kontraksi pada periode sebelumnya. Dari sisi nominal, total transaksi tercatat sebesar Rp891,66 miliar atau tumbuh 14,22% (yoY), meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan 0,78% (yoY) pada triwulan II 2025. Volume transaksi juga menguat 13,53% (yoY) menjadi 964.732, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,77% (yoY) (Grafik 5-10). Dari sisi volume, transaksi kartu kredit mencapai 964.732, meningkat 13,53% (yoY), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,77% (yoY) (Grafik 5-11). Kinerja ini menunjukkan peningkatan konsumsi masyarakat melalui instrumen kredit secara konsisten baik dari sisi nilai maupun frekuensi.

Grafik 5.11 Volume Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Jumlah Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan struktur penggunaannya, kartu kredit masih didominasi oleh transaksi belanja dengan nilai Rp873,21 miliar atau 97,93% dari total, diikuti transaksi tarik tunai sebesar Rp14,04 miliar (1,57%) dan pembayaran tagihan (bill pay) Rp4,41 miliar (0,49%). Pola ini mengindikasikan bahwa fungsi utama kartu kredit tetap sebagai instrumen konsumsi ritel, dengan pemanfaatan untuk layanan lain relatif terbatas. Dinamika tersebut sejalan dengan arah transformasi sistem pembayaran sebagaimana diamanatkan dalam BSPI 2030, yang mendorong diversifikasi instrumen dan peningkatan pengalaman pengguna (*consumer experience*).

Meskipun ekosistem pembayaran digital berbasis akun terus berkembang, kartu kredit masih mempertahankan relevansinya sebagai instrumen yang menawarkan fleksibilitas pembayaran, manfaat tambahan seperti *reward* dan cicilan, serta persepsi nilai tambah bagi pengguna. Dengan demikian, penguatan transaksi kartu kredit tidak hanya mencerminkan optimisme konsumsi rumah tangga, tetapi juga menunjukkan bahwa instrumen kartu tetap menjadi bagian integral dari ekosistem pembayaran dalam fase transisi menuju digitalisasi yang lebih maju.

### 5.3 Perkembangan Transaksi Elektronifikasi dan E-Commerce

**Sejalan dengan percepatan transformasi digital, Bank Indonesia konsisten memperluas ekosistem transaksi non-tunai di sektor ritel untuk mendorong efisiensi sistem pembayaran sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di Sumatera Selatan.** Dalam konteks tersebut, uang elektronik (UE) terus menunjukkan kinerja yang menguat dan menjadi salah satu instrumen utama yang menopang aktivitas pembayaran sehari-hari.

Pada triwulan III 2025, nilai transaksi UE di Sumatera Selatan tercatat Rp3,19 triliun, tumbuh 16% (yoy). Dari sisi volume, transaksi UE terakselerasi, meningkat 20,14% (yoy) menjadi 32,78 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan 30,14 juta volume transaksi pada periode sebelumnya.

**Selain peningkatan transaksi, jumlah uang elektronik yang beredar di Sumatera Selatan juga menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.** Jumlah uang elektronik yang beredar di Sumatera Selatan tumbuh menjadi 7,58 juta pada triwulan laporan, atau 156,87% (yoy) (Grafik 5-14). Peningkatan mencerminkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap instrumen digital, diperkuat oleh strategi promosi dan insentif dari penyedia layanan pembayaran. Perkembangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan perluasan inklusi keuangan melalui instrumen yang mudah diakses dan berbiaya rendah.

**Sejalan dengan itu, infrastruktur pembayaran juga mengalami penguatan.** Jumlah reader UE meningkat menjadi 3.490 unit atau tumbuh 10,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan naiknya adopsi oleh *merchant*, khususnya pada sektor ritel dan UMKM yang semakin terintegrasi dalam ekosistem pembayaran digital. Ketersediaan infrastruktur yang semakin luas berperan penting dalam memperkuat utilisasi UE dan memperdalam penetrasi transaksi non-tunai di daerah.

Dari sisi struktur penggunaan, transaksi belanja mendominasi dengan pangsa 69,65% atau Rp2,22 triliun. Transaksi transfer menempati 27,10% atau Rp865 miliar, sementara tarik tunai berkontribusi relatif kecil sebesar 3,25% atau Rp104 miliar. Komposisi ini menunjukkan bahwa UE telah berfungsi terutama sebagai instrumen pembayaran ritel dan pemindahan dana, sejalan dengan karakteristik instrumen yang dirancang untuk transaksi bernilai kecil hingga menengah yang cepat dan efisien. Secara keseluruhan, dinamika ini menegaskan bahwa uang elektronik telah menjadi pilar penting dalam akselerasi digitalisasi pembayaran di Sumatera Selatan.

**Pada triwulan pelaporan, Kota Palembang menempati posisi tertinggi dalam penggunaan uang elektronik (UE) di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi.** Secara keseluruhan, Palembang mencatat pangsa 60,64% dari total nilai transaksi UE, serta berkontribusi 57% terhadap total volume transaksi provinsi (Grafik 5-16 dan Grafik 5-17). Tingginya capaian ini mencerminkan peran strategis Palembang sebagai pusat perekonomian dan aktivitas perdagangan di Sumatera Selatan.

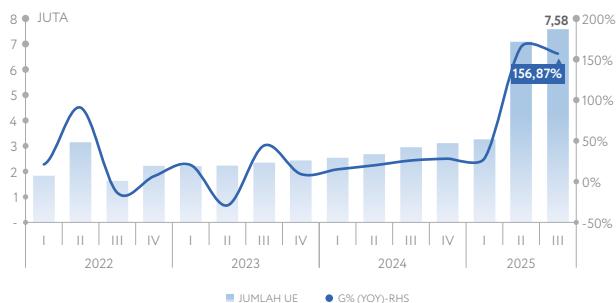
Tingginya capaian kota Palembang didukung oleh keunggulan dalam ketersediaan infrastruktur pembayaran digital yang lebih luas, mulai dari jaringan *merchant*, mesin pembaca, hingga integrasi dengan berbagai aplikasi layanan keuangan. Selain itu, tingkat adopsi masyarakat perkotaan yang lebih siap terhadap transaksi non-tunai, ditambah peran Palembang sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Selatan, menjadikan kota ini lebih dinamis dalam mengadopsi instrumen pembayaran digital. Dukungan regulasi pemerintah daerah serta kolaborasi aktif dengan Bank Indonesia turut memperkuat posisinya sebagai episentrum pertumbuhan transaksi uang elektronik di provinsi ini.

Selaras dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah strategis untuk memperluas ekosistem keuangan digital secara lebih inklusif di seluruh wilayah provinsi, sehingga manfaat penggunaan uang elektronik tidak hanya terpusat di Palembang, tetapi juga dapat mendorong pemerataan transformasi digital hingga ke daerah lainnya.

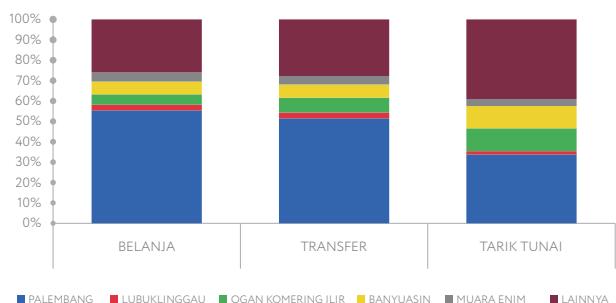
**Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan**

TRANSAKSI	III 2024		IV 2024		I 2025		II 2025		III 2025	
	VOLUME	NOMINAL	VOLUME	NOMINAL	VOLUME	NOMINAL	VOLUME	NOMINAL	VOLUME	NOMINAL
Belanja	23.461	1.923	25.648	1.967	26.162	2.018	27.312	2.036	29.019	2.222
Transfer	3.551	740	3.486	751	3.389	770	3.200	768	3.437	864,7
Tarik Tunai	277	85	247	84,4	255.195	89	274	82	339	104
<b>TOTAL</b>	<b>27.289</b>	<b>2.748</b>	<b>29.381</b>	<b>2.718</b>	<b>284.746</b>	<b>3.646</b>	<b>30.786</b>	<b>2.887</b>	<b>30.786</b>	<b>3.191</b>

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.14 Jumlah UE**

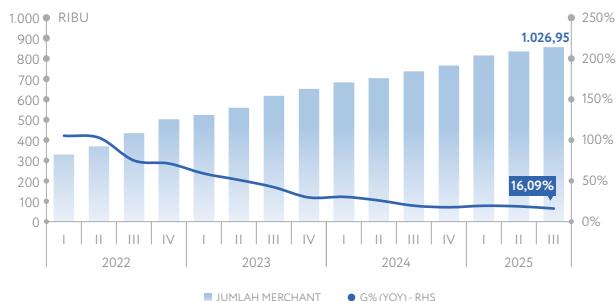
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.16 Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Nominal**

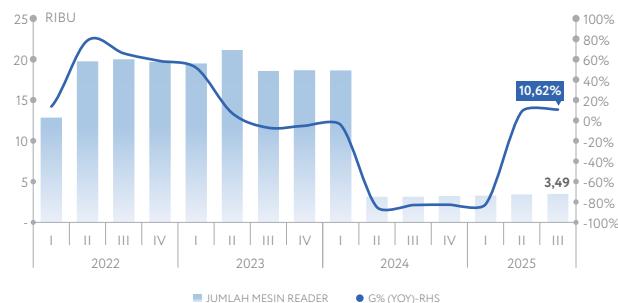
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan digiliterasi di seluruh sektor dibarengi dengan peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital melalui **Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)**. Kehadiran QRIS dalam eksositem pembayaran digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai dan mendukung peningkatan efisiensi operasional bagi pelaku usaha. Dengan dorongan integrasi yang kian meluas, QRIS memberikan pengalaman transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal.

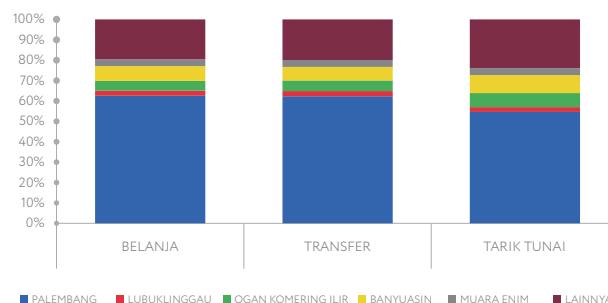
Pada triwulan III 2025, transaksi melalui QRIS tercatat sebesar 6,39 triliun atau tumbuh 106,86% (yoy), dengan jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1.026.948 *merchant* atau tumbuh sebesar 16,86% (yoy) (Grafik 5-18). Secara lebih rinci, mayoritas *merchant* QRIS di Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Kota Palembang dengan pangsa mencapai 54,13%. Kabupaten Banyuasin menempati posisi kedua dengan proporsi jumlah *merchant* sebesar 6,58% dari total *merchant* di Sumatera Selatan.

**Grafik 5.18 Jumlah Merchant QRIS**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.15 Jumlah UE reader**

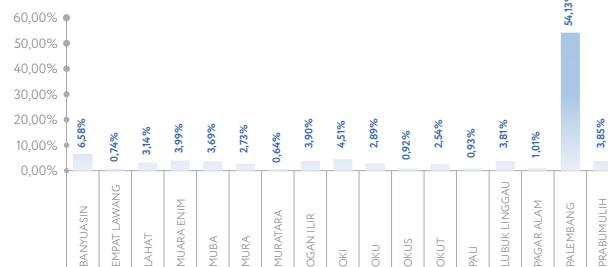
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.17 Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Volume**

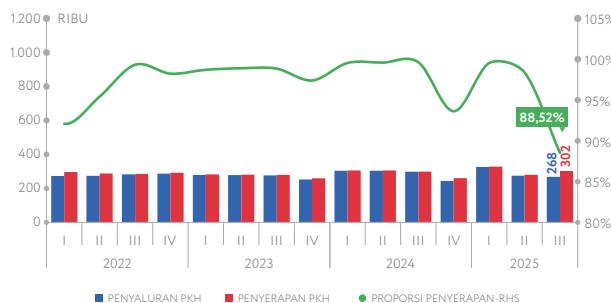
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Faktor pendukung tingginya akseptasi QRIS di Kota Palembang antara lain dipengaruhi ketersediaan infrastruktur dan koneksi yang memadai, tingginya tingkat pemahaman dan literasi masyarakat, serta adanya dukungan pemerintah daerah berupa regulasi yang mendorong penggunaan QRIS (Grafik 5-19).

Penguatan ekosistem ekonomi digital juga tercermin pada penyaluran bantuan sosial non-tunai di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya melalui **Program Keluarga Harapan (PKH)**. Pada triwulan III 2025, bantuan PKH telah disalurkan untuk 302 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nominal Rp222,19 miliar. Proporsi penyerapan KPM sebesar 88,52%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang telah terserap 98,38%. Penurunan tingkat penyerapan antara lain dipengaruhi oleh bantuan yang secara nominal telah disalurkan ke rekening KPM, namun belum dimanfaatkan atau ditarik, sehingga statusnya sudah tersalurkan namun belum tercatat sebagai penyerapan (Grafik 5-20).

**Grafik 5.19 Persebaran Merchant QRIS**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.20 Proporsi Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Program Keluarga Harapan (PKH)** merupakan salah satu skema bantuan sosial pemerintah yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna memperkuat perlindungan sosial dan menurunkan angka kemiskinan. Melalui program ini, rumah tangga sasaran didorong untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai fasilitas jaminan sosial yang tersedia. Selain berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, PKH juga dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Skema penyaluran yang dilakukan secara non-tunai diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan bantuan sosial. Di saat yang sama, pola penyaluran non-tunai ini diperkirakan mendorong perluasan inklusi dan pemanfaatan layanan keuangan digital di masyarakat. Bank Indonesia mendukung mekanisme tersebut melalui penyediaan infrastruktur dan sistem

pembayaran elektronik yang andal, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan tepat guna.

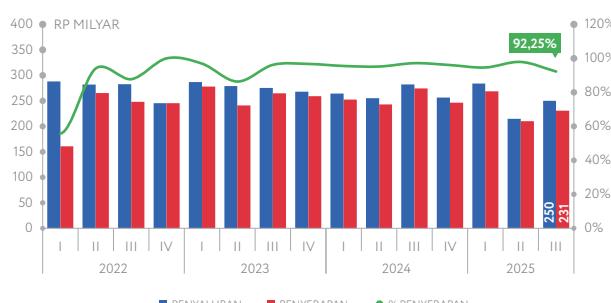
**Pelaksanaan Program Sembako sebagai salah satu skema bantuan sosial non-tunai menunjukkan kinerja realisasi yang tetap terjaga.** Pada triwulan III 2025, bantuan Program Sembako secara nontunai telah disalurkan kepada sejumlah 1,25 juta KPM dengan total nominal Rp250,16 miliar, dengan persentase penyerapan sebesar 92,25% (Grafik 5-21 & Grafik 5-22).

Pada triwulan III 2025, penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako dilakukan melalui dua skema. Skema pertama berupa penyaluran uang tunai yang dilaksanakan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Skema kedua berupa penyaluran non-tunai melalui bank-bank Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Provinsi Sumatera Selatan, implementasi bantuan sosial non-tunai didukung oleh pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan jaringan agen bank yang menjangkau hingga wilayah kecamatan, sehingga KPM dapat melakukan penarikan maupun pembelanjaan bantuan secara lebih mudah dan aman.

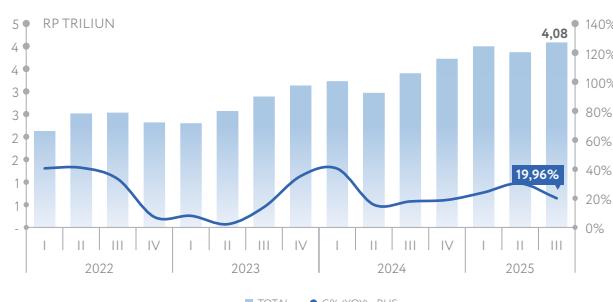
**Transaksi e-commerce di Provinsi III 2025 menunjukkan pertumbuhan dari sisi nominal, maupun volume transaksi.** Pada triwulan III 2025, nominal transaksi tercatat sebesar Rp4,08 triliun atau tumbuh sebesar 19,96% (yoy), tumbuh melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 30,19% (yoy) (Grafik 5-23). Hal tersebut sejalan dengan normalisasi belanja daring setelah tingginya aktivitas promosi dan momentum hari

**Grafik 5.21 Proporsi Penyaluran Jumlah KPM Bantuan Sembako**

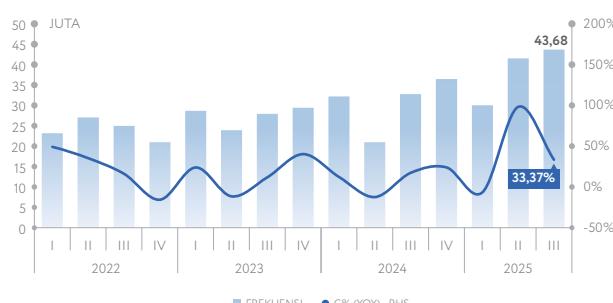
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.22 Proporsi Penyaluran Nominal Bantuan Sembako**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.23 Nominal transaksi E-commerce**

Sumber: Beberapa marketplace terbesar di Indonesia, diolah

**Grafik 5.24 Frekuensi transaksi E-commerce**

Sumber: Beberapa marketplace terbesar di Indonesia, diolah

besar pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya, frekuensi transaksi melalui *e-commerce* pada triwulan laporan mencatatkan angka sejumlah 43,61 juta transaksi atau mengalami pertumbuhan sebesar 33,37% (yo), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh signifikan sebesar 98,16% (yo) dengan frekuensi sebesar 41,50 juta transaksi (Grafik 5-24).

Sejalan dengan peningkatan aktivitas *e-commerce* tersebut, preferensi metode pembayaran masyarakat masih didominasi oleh skema pembayaran tunai. Metode pembayaran yang paling diminati dan sering digunakan dalam transaksi *e-commerce* adalah *Cash on Delivery*(CoD) dan transfer bank, dengan proporsi transaksi masing-masing sebesar 40,15% dan 18,63%.

## 5.4 Kegiatan Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Aktivitas jual beli Uang Kertas Asing (UKA) pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 menunjukkan kenaikan secara tahunan. Pada periode tersebut, nominal transaksi jual beli valuta asing KUPVA BB tercatat sebesar Rp40,40 miliar atau tumbuh 65,13% (yo). Secara rinci, transaksi pembelian mencapai Rp20,017 miliar dengan pertumbuhan 65,13% (yo), sementara transaksi penjualan tercatat sebesar Rp20,38 miliar dengan pertumbuhan 65,14% (yo).

Ke depan, dinamika transaksi KUPVA BB diperkirakan akan semakin dipengaruhi oleh penguatan ekosistem pembayaran digital, antara lain melalui ketersediaan layanan transaksi valuta asing pada berbagai *platform* pembayaran dan kanal perbankan digital. Tingginya aksesi masyarakat terhadap instrumen dan kanal digital tersebut berjalan seiring dengan konsistensi dan komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan sekaligus meregulasi ekosistem transaksi digital yang aman, efisien, dan andal.

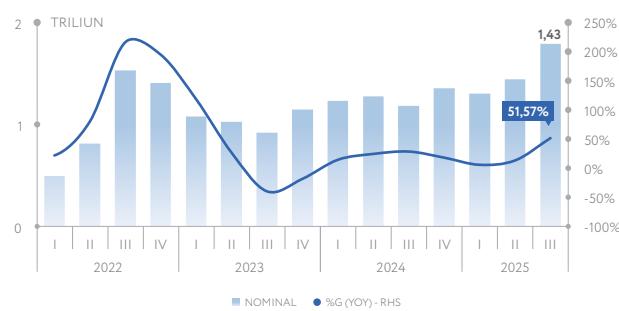
Nominal transaksi pada transfer dana masuk (*incoming*) dari domestik tumbuh, namun demikian transfer dana masuk dari luar negeri masih mencerminkan kontraksi pada triwulan III 2025. Pada triwulan laporan, tercatat nominal transfer dana *incoming* domestik sebesar Rp1,43 triliun atau tumbuh 51,57% (yo), terakselerasi

Grafik 5.25 Perkembangan Transaksi KUPVA BB Sumatera Selatan



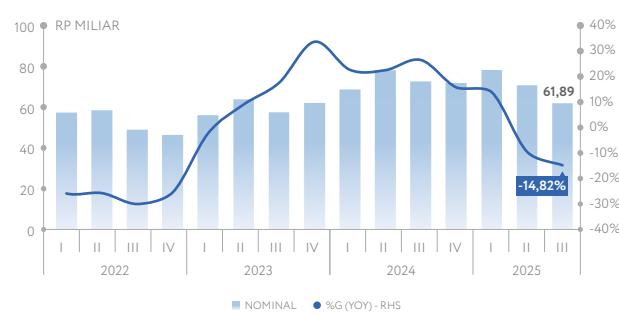
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.26 Transfer Dana Domestik-*Incoming*



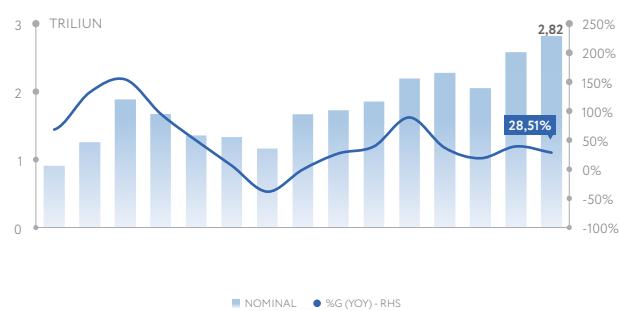
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.27 Transfer Dana Luar Negeri-*Incoming*



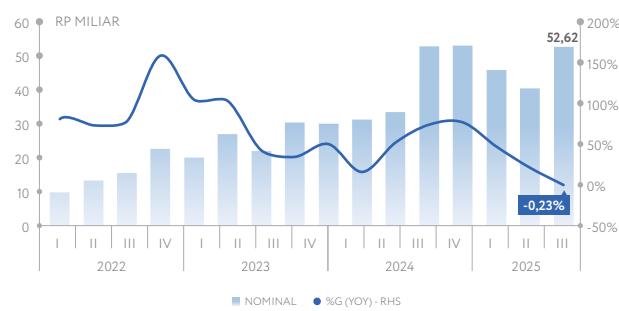
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.28 Transfer Dana Domestik-*Outgoing*



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.29 Transfer Dana Luar Negeri-*Outgoing*



Sumber: Bank Indonesia, diolah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,70% (oy) atau dengan nominal Rp1.042,30 miliar (Grafik 5-26). Selanjutnya, nominal *incoming* yang berasal dari luar negeri ke Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tercatat sejumlah Rp61,88 miliar atau terkontraksi 14,82% (oy), menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 9,55% (oy) (Grafik 5-27).

Sejalan dengan transfer dana *incoming*, transfer dana keluar atau *outgoing* domestik pada triwulan III 2025 mengalami pertumbuhan, sedangkan terjadi penurunan pada transaksi transfer dana keluar negeri. Pada triwulan laporan, nominal *outgoing* domestik tercatat Rp2,82 triliun atau tumbuh 28,51% (oy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 39,26% (oy) atau sebesar Rp2,58 triliun (Grafik 5-28). Adapun nominal *outgoing* yang berasal dari Sumatera Selatan ke luar negeri pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp52,62 miliar atau terkontraksi 0,23% (oy), mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang dicatat mengalami pertumbuhan 20,99% (oy) (Grafik 5-29). Sementara frekuensi transaksi *outgoing* ke luar negeri tercatat sebanyak 2,59 ribu transaksi atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 (oy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 10,45% (oy).

06

---

# Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah





## **Pada triwulan III 2025, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi membaik.**

- Sejalan dengan pertambahan penduduk, jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Sumatera Selatan pada Agustus 2025 sebesar 6,67 juta orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,58 juta orang.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,69% atau menurun sebesar 0,17% (yoy).
- Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 122,38 menjadi 127,77.
- Sejalan dengan itu, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau penghasilan saat ini lebih baik dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu dan masih optimis bahwa penghasilan mereka ke depan akan relatif lebih baik.

## 6.1 Kondisi Ketenagakerjaan

Pada triwulan III 2025, kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dari beberapa indikator, seperti peningkatan jumlah penduduk usia kerja, bekerja, NTP, SKDU dan penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPAK) di Sumatera Selatan pada periode pelaporan terakhir.

### 6.1.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Sejalan dengan pertambahan penduduk, jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Sumatera Selatan pada Agustus 2025 sebesar 6,67 juta orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,58 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 4,49 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2,01 juta orang. Dibandingkan Agustus 2024, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 12,47 ribu orang, sementara pengangguran turun 7,35 ribu orang. Angkatan kerja yang melimpah di Sumatera Selatan merupakan potensi yang perlu dimaksimalkan melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi di Sumatera Selatan.

**Grafik 6.1 Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Juta orang), 2021-2025**

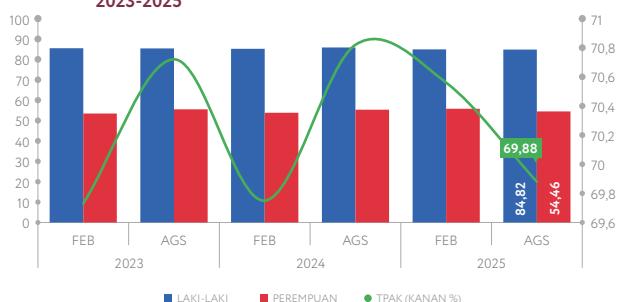


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

### 6.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK di Sumatera Selatan stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. TPAK Sumatera Selatan pada Agustus 2025 mencapai 69,88%, turun sebesar 0,68% dibandingkan Februari 2025. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja bertambah sebanyak 5,13 ribu orang.

**Grafik 6.2 Perkembangan TPAK di Sumatera Selatan, 2023-2025 (dalam %), 2023-2025**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,82% lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 54,46%. Angka TPAK perempuan ini menunjukkan peningkatan, namun masih dibawah target RPJMN 2025-2029, yaitu sebesar sebesar 56,70–60,89. Hal ini berarti masih ada tantangan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, baik dari sisi akses terhadap pekerjaan maupun pengembangan keterampilan yang dibutuhkan. Sementara, dibandingkan Agustus 2024, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,97% poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,89%.

### 6.1.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, yaitu sektor pertanian, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; dan industri pengolahan. Faktor pendorong penyerapan tenaga kerja terbesar di LU pertanian ini adalah tingginya permintaan produk pertanian serta kehutanan di pasar lokal dan ekspor, yang didukung oleh cuaca yang lebih kondusif mendorong produktivitas pertanian didukung oleh bendungan dan jalur irigasi yang ditargetkan telah selesai pada tahun 2025.

Dibandingkan Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Konstruksi (25,27 ribu orang); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (7,45 ribu orang), dan Aktivitas Profesional dan Perusahaan (6,68 ribu orang). Peningkatan signifikan dalam sektor konstruksi ini dipengaruhi oleh banyaknya proyek infrastruktur yang sedang berlangsung di Sumatera Selatan. Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumsel, seperti pembangunan jalan tol, rel kereta api, dan pengembangan kawasan industri, telah menyerap banyak tenaga kerja. Sementara, lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah Perdagangan (12,57 ribu orang); Administrasi Pemerintah (8,64 ribu orang); dan Informasi dan Komunikasi (5,99 ribu orang).

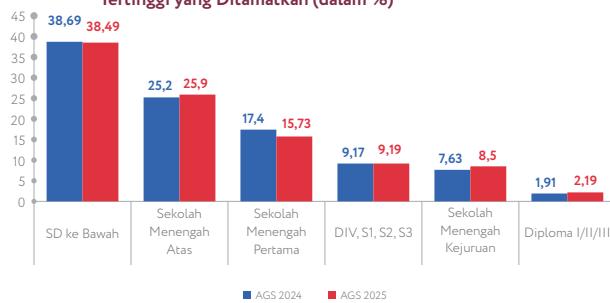
### 6.1.4. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja di Sumatera Selatan pada Agustus 2025 masih didominasi oleh jenjang SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yaitu mencapai 38,49%. Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami tren menurun dibandingkan Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa lebih banyak penduduk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk berpendidikan rendah tetap ada.

Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,38% dan mengalami tren yang meningkat dibandingkan Agustus 2024. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama sejak 2023.

**Grafik 6.3 Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Sumatera Selatan (%)**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

**Grafik 6.4 Penduduk Bekerja di Sumatera Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)**

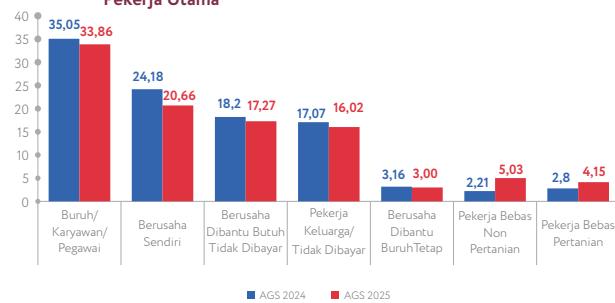
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dibandingkan dengan Agustus 2024, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 0,20% dan 1,67%. Selanjutnya, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami kenaikan tertinggi sebesar 0,87%. Pendidikan vokasional ini memberikan keterampilan langsung yang dapat digunakan di dunia kerja, dan peningkatan proporsi ini mencerminkan minat yang tumbuh dalam pendidikan kejuruan di masyarakat. Meski begitu, jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan SMA Umum, yang menunjukkan bahwa pendidikan vokasional di Sumatera Selatan masih belum sepenuhnya berkembang atau kurang menarik bagi sebagian masyarakat.

Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,70%, 0,28%, dan 0,02%. Kenaikan proporsi penduduk berpendidikan universitas ini menjadi sinyal positif bagi kualitas sumber daya manusia di provinsi Sumsel, dengan semakin banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian lebih tinggi dan berpotensi besar untuk berkontribusi pada sektor ekonomi modern.

### 6.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada Agustus 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 33,87%, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap, yaitu sebesar 3,00%.

**Grafik 6.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dibandingkan Agustus 2024, status pekerjaan yang meningkat dengan persentase terbesar adalah pekerja bebas non pertanian yaitu sebesar 127,20 ribu orang. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar terdapat pada status berusaha sendiri sebesar 59,98 ribu orang.

Pada Agustus 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,84 juta orang (63,13%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,65 juta orang (36,87%). Dibandingkan Agustus 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 0,79% sedangkan penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 0,79%.

### 6.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

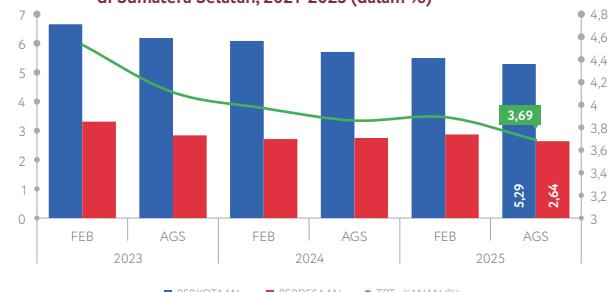
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025** tercatat sebesar **3,69%**. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3-4 orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan dengan Agustus 2024. Dengan angka TPT yang tercatat sebesar 3,69%, Provinsi Sumsel lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang sebesar 4,85%. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja dan kebijakan pengurangan pengangguran yang diterapkan selama ini cukup efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran. Pada Agustus 2025, pemerintah Provinsi Sumsel mengadakan Job Fair yang diikuti oleh 35 lembaga/perusahaan dari berbagai sektor industri, yang menyediakan lebih dari 2.000 lowongan kerja. Hal ini diharapkan berdampak terhadap penurunan TPT Sumsel.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 3,56%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,91%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,19%, sementara TPT perempuan menurun sebesar 0,11% dibandingkan dengan Agustus 2024. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan (5,29%) lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (2,64%). Dibandingkan dengan Agustus 2024, TPT di perkotaan turun sebesar 0,41 persen poin, sedangkan TPT di perdesaan naik sebesar 0,11 persen poin.

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh angkatan kerja, pola TPT pada Agustus 2025 hampir sama dengan yang terjadi pada Agustus 2024 dan Agustus 2023. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi ditemukan pada tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 8,08%. Sementara itu, TPT terendah terdapat pada pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yakni 1,27%.

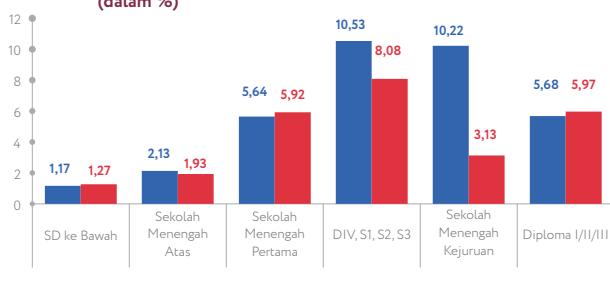
Dalam mengatasi masalah pengangguran, beberapa program pemerintah sebagai perwujudan dari visi asta cita mulai dikembangkan dalam RPJMN 2025-2029. Salah satu programnya adalah kartu usaha afirmatif bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, namun masih menghadapi tantangan seperti intervensi yang kurang sesuai kebutuhan. Namun, standar pelaksanaan masih menghadapi tantangan seperti intervensi yang kurang sesuai kebutuhan, standar pelaksanaan yang belum seragam, penargetan yang belum tepat sasaran, penduduk miskin dan rentan yang belum termotivasi, kapasitas program yang masih belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan. Adapun target sasaran kartu tersebut yaitu jumlah penerima yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 3 juta jiwa/tahun pada 2029.

**Grafik 6.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan, 2021-2025 (dalam %)**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

**Grafik 6.7 Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

## 6.1.7. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025, Nilai Saldo Bersih tertimbang (SBT) sebesar 4,82%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan II sebesar 7,81. Penurunan utamanya terjadi pada subsektor pengadaan listrik serta informasi dan komunikasi.

Sedangkan berdasarkan hasil Survei Konsumen triwulan III 2025, nilai Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini dibandingkan 6 bulan yang lalu tercatat sebesar 105,33, menurun terbatas dibandingkan triwulan II 2025 yang sebesar 105,22 (Grafik 6-1). Namun, nilai ini masih berada di atas level optimis (100).

**Grafik 6.8 Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu**



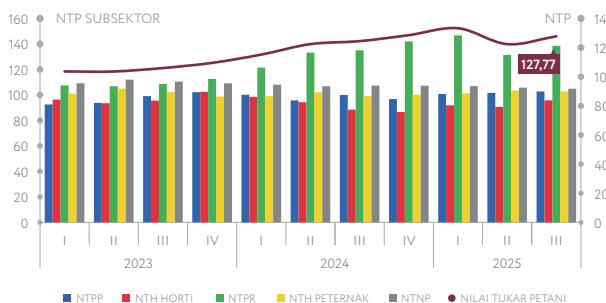
Sumber : Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia

## 6.2 Kondisi Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan NTP Sumatera Selatan pada triwulan III meningkat dibandingkan NTP triwulan sebelumnya, yaitu dari 122,38 menjadi 127,77 (Grafik 6-9). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan atau daya beli petani meningkat dimana nilai tukar produk yang dihasilkan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga petani meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertanian.

Peningkatan NTP pada triwulan III 2025 terutama bersumber pada peningkatan NTP Tanaman Pangan (NTPP), NTP Hortikultura (NTPH), dan NTP Perkebunan Rakyat (NTPR) (Grafik 6-10). NTPP pada triwulan III 2025 tercatat 102,78 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 101,56. NTPH menunjukkan nilai sebesar 95,74, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 90,62. Selanjutnya, NTPR menunjukkan nilai sebesar 138,52, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 131,42. Beberapa komoditas penyumbang kenaikan NTP September 2025 a.l karet, kopi biji kering, kelapa sawit, cabai merah, jagung, dan cabai rawit. Sedangkan NTP subsektor yang mengalami penurunan yaitu subsektor peternakan dan perikanan.

NTP pada triwulan laporan masih berada di atas angka 100 yang mencerminkan bahwa petani dalam kondisi surplus yaitu harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh petani. Indeks Harga yang diterima Petani (lt) tercatat sebesar 158,08 pada triwulan III 2025, atau menurun dari

**Grafik 6.10 Nilai Tukar Petani Per Subsektor**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

periode sebelumnya yang tercatat 167,23, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) yang meningkat menjadi 126,50 dari 125,46 pada triwulan sebelumnya.

Pada triwulan III 2025, Indeks Harga Konsumsi (IHK) Pedesaan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 128,34 mengalami kenaikan sebesar 4,54% (yoy) (Grafik 6-11). Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau; untuk pakaian dan alas kaki; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Sejalan dengan itu, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau penghasilan saat ini lebih baik dibandingkan dengan 6 bulan yang

**Grafik 6.9 Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang dibayar dan Nilai Tukar Petani**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 6.1 Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu Triwulan III 2025**

BULAN	Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan yang Lalu (Jml Responden)			
	Lebih Baik	Sama	Lebih Buruk	Jumlah
JUL	46	252	2	300
AGS	39	256	5	300
SEP	39	256	5	300
<b>Jumlah</b>	<b>124</b>	<b>764</b>	<b>12</b>	<b>900</b>
<b>Persentase</b>	<b>13,78%</b>	<b>84,89%</b>	<b>1,33%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

lalu (Tabel 6-1). Sebanyak 13,78% responden menyatakan bahwa penghasilan mereka pada triwulan laporan lebih baik dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Sementara itu, 1,33% responden menyatakan penghasilan saat ini justru menurun/lebih buruk dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil Survei Konsumen, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan masih optimis bahwa penghasilan mereka ke depan akan relatif lebih baik. Masih solidnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan berlanjutnya program bantuan sosial dan adanya peningkatan UMP turut memberikan andil dalam optimisme penghasilan ke depan. Hal ini terkonfirmasi dari sejumlah 13,78% responden berpendapat bahwa penghasilan yang akan diterima pada 6 bulan mendatang akan lebih baik dibandingkan saat ini dan 85,89% responden menyatakan penghasilan yang akan diterima ke depan akan sama atau stabil dibandingkan dengan kondisi saat ini. Sementara itu, sebagian responden lainnya sebanyak 0,33% memperkirakan penghasilan 6 bulan yang akan datang menurun/lebih buruk dibandingkan saat ini (Tabel 6-2). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat masih terus terjaga.

## 6.3 Kemiskinan

**Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2025 mengalami penurunan.** Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2025 sebanyak 919,60 ribu orang atau 10,15% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2024 yang tercatat sebanyak 10,51% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan (Grafik 6-5).

**Grafik 6.11 Perkembangan NTP dan Inflasi Pedesaan Sumatera Selatan**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 6.2 Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan 6 Bulan Yang Akan Datang Triwulan III 2025**

BULAN	Perkiraan Penghasilan 6 Bulan Mendatang Dibandingkan Saat Ini (Jml Responden)			
	Lebih Baik	Sama	Lebih Buruk	Jumlah
JUL	31	268	1	300
AGS	41	258	1	300
SEP	52	247	1	300
<b>Jumlah</b>	<b>124</b>	<b>773</b>	<b>3</b>	<b>900</b>
<b>Persentase</b>	<b>13,78%</b>	<b>85,89%</b>	<b>0,33%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

**Grafik 6.12 Perkembangan Penduduk Miskin**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Adapun penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada periode laporan diiringi oleh peningkatan garis kemiskinan menjadi Rp581.702,00/kapita/bulan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga kelompok makanan seiring dengan besarnya pangsa kelompok tersebut bila dibandingkan kelompok non makanan.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat, sementara pedesaan mengalami penurunan pada periode Maret 2025. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan yang sebanyak 314,49 ribu orang, menurun dibandingkan posisi September 2024 sebanyak 310,04 ribu orang. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan pada Maret 2025 menjadi 605,12 ribu orang dibandingkan posisi September 2024 sebanyak 638,81 ribu orang (Tabel 6-3).

Terdapat berbagai program unggulan yang tertuang dalam program asta cita, di antaranya Sekolah Rakyat, yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin; Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah; Padat Karya Desa; Pelatihan Vokasi dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang bertujuan meningkatkan kompetensi kerja dan perlindungan bagi pekerja rentan; dan lain-lain.

Beberapa program pengentasan kemiskinan juga telah dicanangkan dalam Visi Misi Gubernur Sumsel tahun 2025-2029. Dalam Program Misi ke-V yaitu mendorong kesempatan kerja yang merata di Sumsel; meningkatkan kualitas tenaga pendamping pertanian yang merata; meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam melahirkan *socioecopreneur* dari generasi Z dan generasi milenial; mendorong kebijakan untuk peningkatan upah minimum regional yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah; dan mendorong pengembangan lembaga mikro, dukungan permodalan usaha, kemudahan perizinan usaha, fasilitasi produk, teknologi usaha, dan kemasan produk dan akses bagi pasar UMKM. Selain itu, adanya program strategis seperti kesejahteraan dan kesehatan perempuan dan anak. Program-program dirancang dan digulirkan dengan harapan kemiskinan dan ketimpangan dapat berkurang signifikan.

### 6.3.1 Perubahan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan<sup>4</sup> Provinsi Sumatera Selatan pada periode Maret 2025 tercatat sebesar Rp581.702,00/kapita/bulan, meningkat sebesar 3,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 6-4). Pada periode Maret 2025, peranan kelompok makanan masih jauh lebih besar dibandingkan kelompok bukan makanan. Besar sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM)<sup>5</sup> terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2025 adalah sebesar 75,06%, sedikit meningkat dibandingkan September 2024 yang sebesar 75,03%.

Komoditas kelompok makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada periode Maret 2025, baik di perkotaan dan perdesaan adalah beras dan rokok kretek filter. Beras dan rokok kretek filter masih memberikan sumbangan terbesar yaitu 23,53% dan 11,99% di perkotaan. Sementara, di perdesaan, beras memberi sumbangan sebesar 23,53% dan rokok kretek filter 10,98%. Komoditi lainnya adalah telur ayam, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, roti, dan seterusnya. Selanjutnya, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan dan perdesaan adalah komoditas perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan lainnya.

**Tabel 6.3 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin**

Tahun	Bulan	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan & Pedesaan	
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin
2020	Maret	387,80	12,16	693,78	693,78	1.081,58	12,66
	September	404,43	12,52	715,22	715,22	1.119,65	12,98
2021	Maret	402,25	12,36	711,51	711,51	1.113,76	12,84
	September	393,38	11,99	723,23	723,23	1.116,61	12,79
2022	Maret	371,50	11,23	673,18	673,18	1.044,69	11,90
	September	379,09	11,37	675,9	675,9	1.054,99	11,95
2023	Maret	371,75	11,07	673,93	12,21	1.045,68	11,78
2024	Maret	342,34	10,04	641,9	11,53	984,24	10,97
	September	310,04	9,02	638,81	11,43	948,85	10,51
<b>2025</b>	<b>Maret</b>	<b>314,49</b>	<b>9,1</b>	<b>605,12</b>	<b>10,79</b>	<b>919,60</b>	<b>10,15</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

4. Garis Kemiskinan merupakan suatu batas dalam mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

5. Komponen Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

**Tabel 6.4 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)								
	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan & Pedesaan		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
Mar-20	337,697	131,854	469,551	321,453	100,198	421,650	327,021	112,021	439,041
Sep-20	338,390	132,409	470,800	323,914	100,455	424,369	328,710	112,549	441,259
Mar-21	350,163	135,276	485,439	335,549	105,866	441,415	340,567	116,888	457,455
Sep-21	354,236	137,422	491,658	337,702	108,975	446,678	343,549	119,702	463,251
Mar-22	374,346	141,579	515,925	353,000	114,139	467,139	360,600	124,469	485,069
Sep-22	400,354	148,101	548,455	368,981	124,901	493,882	379,882	133,642	513,524
Mar-23	405,674	150,428	556,102	373,072	127,616	500,688	384,507	136,247	520,754
Mar-24	433,537	156,059	589,596	402,078	131,714	533,792	413,237	140,960	554,197
Sep-24	447,563	155,742	603,305	409,879	131,942	541,821	423,507	140,955	564,462
<b>Mar-25</b>	<b>465,384</b>	<b>159,166</b>	<b>624,550</b>	<b>420,834</b>	<b>136,419</b>	<b>557,253</b>	<b>436,639</b>	<b>145,063</b>	<b>581,702</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

### 6.3.2 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

**Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2025 tercatat sebesar 1,642, lebih tinggi dibandingkan September 2024 yang sebesar 1,449.** Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Rp581.702,00 per kapita per bulan) semakin terpuruk, dengan jarak yang semakin lebar antara pendapatan mereka dengan garis kemiskinan tersebut. Selain itu, pada Maret 2025 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turut menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya yaitu dari 0,316 menjadi 0,371, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin lebar (Tabel 6-5).

**Secara spasial, pada Maret 2025, indeks P1 maupun P2 di perdesaan tercatat melampaui daerah perkotaan.** Nilai indeks P1 di perdesaan tercatat sebesar 1,739, sedangkan di daerah perkotaan tercatat sebesar 1,484. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin perdesaan di Sumatera Selatan lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan. Sementara itu, indeks P2 pada Maret 2025 di perdesaan tercatat sebesar 0,397, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks P2 di daerah perkotaan yang sebesar 0,330. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibanding ketimpangan antara penduduk miskin di perkotaan.

### 6.3.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

**Kondisi ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan.** Hal ini tercermin dari indeks rasio gini yang tercatat sebesar 0,311, lebih rendah dibanding periode September 2024 yang sebesar 0,331. Kondisi ini menggambarkan terjadinya penurunan kesenjangan ekonomi antarpenduduk di Sumatera Selatan.

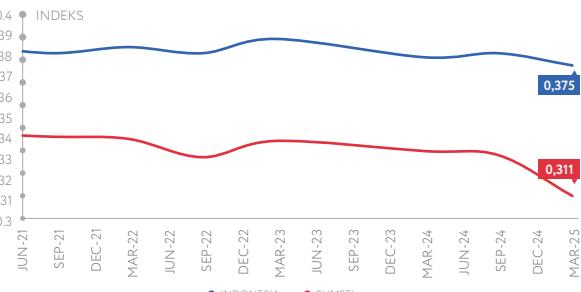
Rasio gini Sumatera Selatan lebih rendah dari rasio gini nasional yang tercatat sebesar 0,375 (Grafik 6-13). Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, posisi Sumatera Selatan menduduki peringkat 14 dengan koefisien gini terendah di Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,370, sedikit lebih tinggi daripada periode September 2024 sebesar 0,357. Sementara itu, di daerah perdesaan, indeks rasio gini tercatat sebesar 0,224 di Maret 2025, menurun dibanding September 2024 yang sebesar 0,300.

Penurunan rasio gini ini disebabkan oleh menurunnya distribusi pendapatan pada kelompok penduduk 20% berpengeluaran tinggi di Sumatera Selatan, yaitu sebesar 39,41% pada periode Maret 2025, menurun dari periode September 2024 yang sebesar 41,46% (Grafik 6-14). Adapun distribusi pendapatan kelompok 40% berpengeluaran rendah pada Maret 2025 di perkotaan tercatat sebesar 18,40%, menurun dibanding periode September 2024 yang tercatat sebesar 19,32% (Grafik 6-15). Selanjutnya, distribusi kelompok 20% berpengeluaran tinggi di perdesaan turut mengalami penurunan dari 38,58% pada September 2024 menjadi 31,22% pada Maret 2025 (Grafik 6-16).

**Tabel 6.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan**

Periode	Kota	Desa	Kota & Desa
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>			
Maret 2022	1,997	1,938	1,961
September 2022	1,855	1,749	1,789
Maret 2023	1,784	1,688	1,724
Maret 2024	1,688	2,011	1,888
September 2024	1,032	1,705	1,449
Maret 2025	1,484	1,739	1,642
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b>			
Maret 2022	0,472	0,438	0,451
September 2022	0,423	0,364	0,386
Maret 2023	0,433	0,369	0,393
Maret 2024	0,390	0,499	0,457
September 2024	0,178	0,400	0,316
Maret 2025	0,330	0,397	0,371

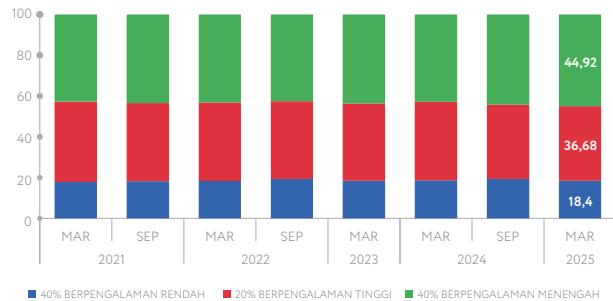
Sumber: BPS Sumatera Selatan

**Grafik 6.13 Perkembangan *Gini Ratio* Sumatera Selatan dan Nasional**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 6.14 Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk**

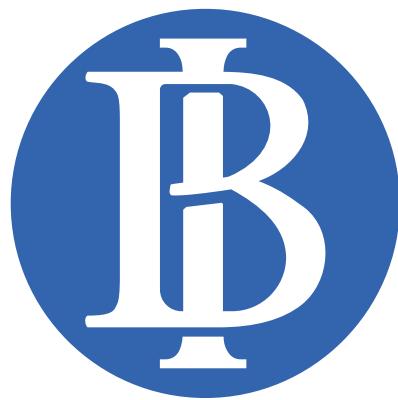
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 6.15 Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perkotaan**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 6.16 Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perdesaan**

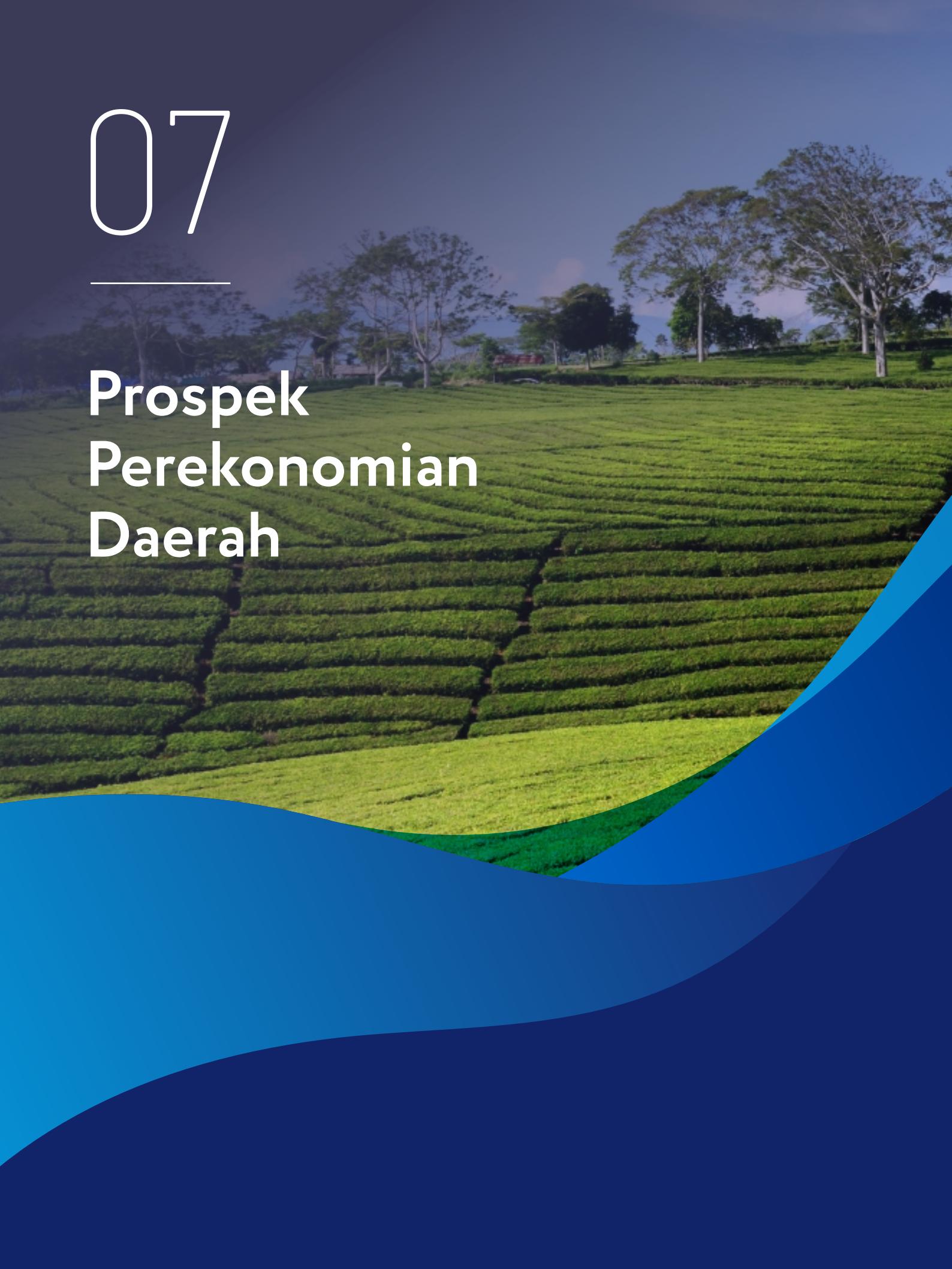
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah



07

---

# Prospek Perekonomian Daerah





**Di tengah dinamika kondisi geopolitik dan perekonomian global, ekonomi Sumatera Selatan diprakirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2025, didukung oleh inflasi yang terjaga pada rentang sasaran.**

- Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,8-5,6% (yo), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan.
- Ke depan, inflasi pada tahun 2025 diprakirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar  $2,5\pm1\%$  setelah pada tahun sebelumnya berada di bawah rentang target.
- Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.

## 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2025

Meski menunjukkan perbaikan dibandingkan proyeksi sebelumnya, kinerja perekonomian dunia pada tahun 2025 diperkirakan tetap termoderasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang dagang dan perubahan arah kebijakan di sejumlah negara besar. Berdasarkan **World Economic Outlook (WEO) Oktober 2025**, perekonomian global tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pembaruan Juli yang sebesar 3,0% dan revisi April sebesar 2,8%. Kendati demikian, proyeksi tersebut masih berada 0,2 poin lebih rendah secara kumulatif dibandingkan perkiraan sebelum perubahan kebijakan perdagangan dalam WEO Oktober 2024, serta lebih rendah dari tren historis 2000–2019 sebesar 3,7%. Revisi naik ini terutama dipengaruhi oleh *front-loading* perdagangan dan investasi yang lebih kuat dari perkiraan serta penurunan tarif efektif Amerika Serikat dari level puncak pengumuman pada April. Selain itu, perbaikan kondisi keuangan global yang didorong pelemahan dolar AS turut memberikan ruang bagi penyesuaian pertumbuhan.

Namun demikian, ketahanan perekonomian global pada awal tahun terbukti lebih banyak ditopang oleh faktor sementara, seperti *front-loading* dagang untuk mengantisipasi kenaikan tarif dan pembelian persediaan, sehingga ketika dampak-dampak temporer tersebut memudar, tanda-tanda perlambatan mulai terlihat. Data terkini menunjukkan pelemahan aktivitas di sejumlah sektor, pelemahan pasar tenaga kerja di negara maju, serta meningkatnya kemungkinan *pass-through* tarif terhadap inflasi konsumen, terutama di Amerika Serikat. Di sisi lain, penurunan tajam arus tenaga kerja imigran di negara-negara maju akibat dinamika politik menimbulkan tekanan terhadap kapasitas output jangka menengah, sehingga memperlemah prospek pemulihan.

Prospek perekonomian global juga dihadapkan pada risiko penurunan yang tidak ringan. Ketegangan perdagangan yang berlanjut serta fragmentasi kebijakan di antara negara-negara besar masih menahan prospek ekspor dan investasi. Perubahan sentimen pasar yang cepat menambah risiko terhadap stabilitas pasar keuangan global, termasuk potensi pengetatan kondisi keuangan yang lebih kuat dari perkiraan. Dalam konteks tersebut, penguatan koordinasi kebijakan terutama antara kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan mengurangi dampak rambatan ketidakpastian terhadap aktivitas ekonomi dunia.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan, inflasi global diproyeksikan terus menurun menjadi 4,2% pada 2025 dan 3,7% pada 2026. Inflasi di negara maju diperkirakan kembali menuju sasaran lebih cepat dibandingkan negara berkembang, meskipun untuk Amerika Serikat risiko kenaikan inflasi masih cenderung meningkat akibat tekanan tarif dan pasar tenaga kerja yang ketat. Ketidakpastian yang terus berlanjut dari kebijakan perdagangan dan tarif berpotensi menghambat proses disinflasi dan menunda transisi menuju kebijakan moneter yang lebih longgar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberlanjutan fiskal dan stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik yang berlanjut termasuk potensi gangguan rantai pasokan global dapat meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, sehingga memperlambat proses penurunan inflasi global. Ketidakpastian ini juga mendorong peningkatan volatilitas di berbagai instrumen keuangan dunia. Dorongan *risk-off* global turut memperkuat dolar AS, sehingga menahan aliran modal masuk ke negara-negara berkembang dan memicu tekanan pelemahan nilai tukar di banyak perekonomian emerging markets.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian dan perlambatan prospek ekonomi dunia, tantangan utama ke depan adalah memulihkan kepercayaan melalui kebijakan yang kredibel, dapat diprediksi, dan berkelanjutan. Upaya tersebut menuntut pemerintah di berbagai negara untuk menetapkan peta jalan kebijakan perdagangan yang jelas, transparan, serta berbasis aturan guna mengurangi ketidakpastian dan mendukung pemulihan investasi. Penguatan arsitektur perdagangan internasional perlu diarahkan pada modernisasi regulasi agar lebih sesuai dengan dinamika ekonomi digital dan mendorong kerja sama multilateral yang lebih kuat. Reformasi ini menjadi penting mengingat perdagangan yang lebih terbuka dan tepercaya berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi global ke depan.

Sejalan dengan itu, diplomasi perdagangan perlu dipadukan dengan penyesuaian makroekonomi yang tepat guna mengoreksi ketidakseimbangan eksternal yang bersifat persisten dengan menangani penyebab fundamentalnya. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa penyesuaian eksternal tidak hanya bersifat sementara, tetapi memberikan dampak jangka panjang bagi stabilitas ekonomi. Di sisi fiskal, upaya membangun kembali buffer fiskal dan menjaga keberlanjutan utang tetap menjadi prioritas utama. Konsolidasi fiskal jangka menengah perlu disusun berdasarkan rencana yang realistik dan seimbang, yang mencakup rasionalisasi belanja serta optimalisasi penerimaan. Pemberian stimulus atau dukungan kebijakan baru perlu dilakukan secara hati-hati dengan memastikan sifatnya yang sementara dan terarah.

**Prospek perdagangan internasional dalam 2025 dan 2026 diperkirakan masih terbatas, dengan tren pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata historis.** Berdasarkan WEO Oktober 2025, volume perdagangan dunia diproyeksikan tumbuh lebih cepat pada 2025 dibandingkan proyeksi April, namun melambat pada 2026 seiring memudarnya efek *front-loading*. Secara keseluruhan,

**Tabel 7.1 Global Economic Outlook**

WILAYAH	2023	2024	2025 <sup>o</sup>	2026 <sup>o</sup>
World	3,3	3,2	3,2	3,1
US	2,5	2,8	2,0	2,1
Euro Area	0,5	0,8	1,2	1,1
Japan	1,9	-0,2	1,1	0,6
China	5,2	4,8	4,8	4,2
India	8,2	6,5	6,6	6,2

Sumber: WEO IMF, <sup>o</sup> estimasi

rata-rata pertumbuhan perdagangan 2025–2026 diperkirakan hanya 2,9%, lebih rendah dibandingkan proyeksi WEO Oktober 2024 sebesar 3,3%, mencerminkan masih kuatnya tekanan proteksionisme dan moderasi permintaan global.

*Imbalances* dalam transaksi berjalan global diprakirakan meningkat pada 2025 sebelum menyempit kembali pada periode berikutnya. Peningkatan percepatan perdagangan menjelang penerapan tarif baru diperkirakan memperlebar defisit transaksi berjalan Amerika Serikat sekaligus meningkatkan surplus Tiongkok dan beberapa negara surplus lainnya. Seiring meredanya perilaku *pull-forward*, transaksi berjalan negara-negara utama diperkirakan kembali mengarah pada pola jangka menengah yang lebih berimbang. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa tekanan proteksionisme dan fragmentasi perdagangan masih menjadi risiko utama bagi prospek perdagangan global.

Ke depan, risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia tetap dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi terutama perang dagang terus berlanjut, termasuk dampaknya terhadap kembali naiknya harga energi dan pangan, serta lebih lamanya pengetatan kebijakan moneter khususnya di negara maju untuk mampu menurunkan inflasi kembali ke sasarannya di masing-masing negara.

Untuk mengatasi tingginya dan dampak buruk fragmentasi dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Indonesia tidak hentinya melakukan penguatan diplomasi ekonomi internasional dengan meningkatkan kolaborasi lembaga antara bank sentral dan kementerian luar negeri dalam pengelolaan persepsi positif Indonesia untuk mendorong investasi dan perdagangan, perumusan kebijakan luar negeri untuk meningkatkan peran dan kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, perluasan koneksi sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di level internasional. Selain itu, Indonesia juga terus menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan bauran kebijakan dalam berbagai forum internasional.

**Di tengah perlambatan ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan diprakirakan tumbuh stabil pada 2025.** Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada dalam kisaran 4,8–5,4%, didorong oleh peningkatan investasi, terutama investasi non-

bangunan. Untuk mendukung prospek pertumbuhan ini, konsumsi rumah tangga perlu terus diperkuat guna menopang permintaan domestik. Dari sisi eksternal, berbagai upaya untuk meningkatkan ekspor menjadi krusial dalam meredam dampak perang dagang dan perlambatan permintaan dari negara mitra dagang utama. Selain itu, sejumlah indikator dan hasil survei Bank Indonesia terkini, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, *Purchasing Managers' Index (PMI)* Manufaktur menunjukkan tren positif yang mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut.

Sebagai bagian dari strategi kebijakan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial serta akselerasi digitalisasi dalam transaksi pembayaran diperkuat untuk bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program Asta Cita Pemerintah, yang mencakup pembiayaan ekonomi, digitalisasi, hilirisasi industri, serta ketahanan pangan.

**Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.** Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing serta menjaga stabilitas Rupiah. Selain itu, penguatan kebijakan Pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025 juga diprakirakan akan turut menopang stabilitas nilai tukar ke depan.

**Dalam aspek inflasi, Bank Indonesia meyakini inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional akan tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%.** Inflasi inti diperkirakan tetap terjaga, seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar untuk merespons permintaan domestik, serta imported inflation yang terkendali melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Selain itu, dampak positif dari perkembangan digitalisasi juga berkontribusi dalam menjaga inflasi. Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat serta Daerah dalam pengendalian inflasi, akan semakin memperkuat upaya stabilisasi inflasi nasional pada tahun 2025.

**Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tetap resilien dan tumbuh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.** Ekonomi Sumatera Selatan yang tetap tumbuh kuat seiring dengan kenaikan UMP sebesar 6,5%; diterapkannya stimulus pada momen HBKN, diantaranya diskon pesawat, diskon tol, diskon belanja, dan diskon mudik; program swasembada dan ketahanan pangan yang difokuskan di Sumatera Selatan; dan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih. Namun demikian, tertahannya konsumsi rumah tangga seiring dengan normalisasi harga komoditas unggulan Sumatera Selatan dan permintaan negara mitra dagang yang belum membaik akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur menahan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada level yang lebih moderat.

**Tabel 7.2 Volume Perdagangan Internasional**

	2023	2024	2025 <sup>o</sup>	2026 <sup>o</sup>
<b>Volume Perdagangan Internasional</b>	<b>0,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>
<b>Negara Maju</b>				
Impor	-0,7	2,1	3,1	1,3
Ekspor	1,0	1,8	2,1	1,7
<b>Negara Berkembang</b>				
Impor	3,0	5,6	4,3	4
Ekspor	0,6	6,5	5,9	3,3

Sumber: WEO IMF, <sup>o</sup> estimasi

**Konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap tumbuh pada tahun 2025.** Peningkatan UMP Sumatera Selatan yang sangat signifikan sebesar 6,5% mendorong kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2025. Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi adanya kebijakan diskon listrik PLN yang mendorong peningkatan pendapatan rill masyarakat. Di samping itu, TPIN dan TPID juga terus melakukan upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Berlanjutnya penyaluran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga ikut menopang peningkatan konsumsi RT di tahun 2025. Namun demikian, permintaan masyarakat sedikit tertahan akibat adanya penurunan permintaan global berpotensi menekan harga komoditas ekspor Sumatera Selatan seperti batu bara dan karet, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan petani, pekerja industri, dan sektor bisnis terkait. Akibatnya, pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada gilirannya berpotensi mengurangi konsumsi rumah tangga.

**Konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh terbatas dibanding tahun sebelumnya.** Terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan pada tahun 2025 disebabkan oleh terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan tahun 2025 seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, tantangan struktural seperti ketergantungan Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan pada komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam belanja daerah menyebabkan adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat. Namun demikian, berbagai upaya untuk optimalisasi PAD seperti pemberian insentif keringanan pajak kendaraan bermotor (bebas denda), optimalisasi aset pemerintah daerah, memperkuat dukungan teknologi untuk penagihan dan pembayaran pajak, serta intensifikasi penagihan langsung ke lapangan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan. Selanjutnya, berbagai program swasembada dan ketahanan pangan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih (KMP) yang dilaksanakan di Sumatera Selatan diprakirakan dapat mendorong kinerja konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan.

**Pemulihan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan juga disumbang oleh kinerja investasi yang tumbuh signifikan dibandingkan dengan tahun 2024.** Akselerasi investasi didorong oleh berlanjutnya proyek infrastruktur nasional dan daerah antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), peningkatan kapasitas operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Muara Enim, berlanjutnya penyelesaian pembangunan pabrik kertas OKI Pulp and Paper; serta rencana penyelesaian target Proyek Strategis Nasional Berupa bendungan dan daerah irigasi di Sumatera Selatan. Kemudian, pembangunan pabrik pengolahan kelapa terpadu hasil kerja sama dengan Jepang yang akan dimulai pada tahun 2025 dapat mendorong kinerja investasi Sumatera Selatan pada 2025.

**Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 ditopang oleh kinerja beberapa LU utama yang tetap tumbuh kuat seperti LU pertanian, LU industri pengolahan, serta**

**LU kontruksi.** Peningkatan kinerja LU Pertanian diprakirakan sejalan dengan cuaca yang lebih kondusif, sehingga mendorong produktivitas pertanian yang didukung oleh bendungan dan jalur irigasi yang ditargetkan telah selesai pada tahun 2025. Hal tersebut didukung juga pelaksanaan program cetak sawah dan padi gogo di Sumatera Selatan. Selain itu, *input cost* pertanian yang semakin efisien dan berlanjutnya bantuan Gernas Tanam Padi, salah satunya melalui perluasan lahan tanam. Kinerja LU pertanian tahun 2025 juga ditopang oleh kinerja sub-sektor perkebunan terutama kelapa sawit seiring dengan kebutuhan kelapa sawit untuk kebutuhan domestik seperti adanya program biodiesel (B40 dan B50).

**Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap tumbuh positif juga ditopang oleh kinerja LU industri pengolahan.** Pada tahun 2025, kinerja industri pengolahan diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan permintaan domestik. Selain itu, berlanjutnya pembangunan pabrik tisu di Kab. OKI juga turut meningkatkan kinerja LU ini pada tahun 2025. Di samping itu, prospek LU ini pada tahun 2025 juga didukung oleh peningkatan permintaan dari industri pangan (minyak goreng) dan penguatan program energi terbarukan yang didukung stok bahan baku yang tinggi (CPO). Selanjutnya, rencana percepatan peningkatan produksi migas domestik seiring dengan pembukaan 85 sumur baru turut meningkatkan kinerja Sub LU industri pengilangan migas pada keseluruhan tahun 2025.

**Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2025 juga sejalan dengan penyelesaian target PSN yang mendorong kinerja LU Kontruksi.** Hal tersebut sejalan dengan berlanjutnya berbagai PSN di Sumatera Selatan yang bersifat *multiyears*. Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan kelapa terpadu hasil yang baru akan dimulai pada tahun 2025 diharapkan dapat mendorong kinerja LU Kontruksi Sumatera Selatan pada 2025.

**Sementara itu, kinerja LU pertambangan Sumatera Selatan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2025.** Hal ini terutama disebabkan oleh normalisasi harga batu bara yang diprakirakan terjadi pada 2025 setelah mencapai puncaknya pada tahun 2024. Namun demikian, terdapat optimisme peningkatan produksi batu bara pada tahun 2025 seiring dengan pembukaan hauling road khusus batu bara dan peningkatan kapasitas angkutan kereta api batu bara.

## 7.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2026

**Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diproyeksikan meningkat dibanding tahun sebelumnya, berada pada kisaran 4,90–5,70% (yoy).** Proyeksi tersebut mencerminkan resiliensi perekonomian Sumatera Selatan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, terutama sebagai dampak kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat yang cenderung lebih protektif dan berpotensi memicu ketegangan perdagangan dengan Tiongkok. Kondisi ini berisiko menahan permintaan komoditas unggulan Sumatera Selatan, seperti batubara dan CPO, seiring perlambatan perdagangan dunia dan meningkatnya fragmentasi global. Di sisi lain, stimulus ekonomi yang diluncurkan Pemerintah Tiongkok sejak 2024 diprakirakan terus memberikan dukungan terhadap permintaan komoditas di kawasan, sehingga membantu menahan pelemahan ekspor Sumatera Selatan dan

menjaga prospek pertumbuhan ke depan. Di tengah kombinasi tantangan dan peluang tersebut, Sumatera Selatan masih memiliki ruang pertumbuhan yang perlu dimaksimalkan melalui sinergi kebijakan, inovasi, dan penguatan optimisme pelaku ekonomi. Bank Indonesia akan terus mempertegas komitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

**Dari sisi permintaan**, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat seiring dengan daya beli masyarakat yang terjaga berkat inflasi yang tetap terkendali. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga menghadapi risiko dari potensi pelemahan harga komoditas unggulan, seperti kelapa sawit dan karet, yang dapat menekan pendapatan masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor perkebunan. Aktivitas investasi (PMTB) diperkirakan meningkat sejalan dengan meredanya sikap wait and see investor dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur utama. Penyelesaian dan kelanjutan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) serta dimulainya pembangunan proyek tol Junction Palembang menjadi pendorong penting peningkatan investasi, baik di sektor konstruksi maupun sektor terkait lainnya. Perbaikan produksi pertanian, didukung kondisi cuaca yang relatif kondusif dan optimalisasi pengairan melalui beroperasinya bendungan dan jaringan irigasi, berpotensi mendorong kinerja ekspor antar daerah, termasuk melalui peningkatan pasokan pangan dan komoditas perkebunan. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diperkirakan termoderasi seiring normalisasi belanja pasca tingginya aktivitas fiskal pada periode Pemilu dan Pilkada 2024, di tengah ruang fiskal yang masih terbatas.

**Dari sisi sektoral**, pada tahun 2026, seluruh lapangan usaha utama di Sumatera Selatan diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun dengan dinamika yang berbeda antar sektor. Sektor pertambangan masih akan memberikan kontribusi penting, ditopang oleh volume produksi batubara yang relatif terjaga dan peningkatan efisiensi logistik, antara lain melalui pemanfaatan hauling road yang telah beroperasi. Meskipun harga batubara secara global tidak setinggi periode sebelumnya dan dipengaruhi pelemahan permintaan dunia, perbaikan sisi infrastruktur dan efisiensi biaya diharapkan dapat menjaga daya saing sektor ini. LU Pertanian diperkirakan tumbuh lebih baik didukung peningkatan produktivitas, terutama pada komoditas unggulan seperti padi, karet, dan kelapa sawit, seiring perbaikan sarana irigasi dan pengelolaan lahan yang lebih optimal, meski harus dihadapkan pada risiko tekanan harga komoditas global. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh solid, ditopang oleh kelanjutan PSN, pembangunan infrastruktur baru, serta proyek-proyek strategis seperti pembangunan pabrik pulp di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Di sisi lain, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh moderat sejalan dengan normalisasi aktivitas pasca lonjakan sementara pada periode Pemilu, namun tetap memperoleh dukungan dari selesainya sejumlah proyek industri pengolahan di OKI yang meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Sektor perdagangan diperkirakan tetap tumbuh positif namun lebih moderat, sejalan dengan normalisasi pola konsumsi masyarakat pasca periode Pemilu. Kendati demikian, perdagangan kendaraan bermotor dan barang konsumsi utama masih akan menjadi penopang penting, seiring daya beli yang relatif terjaga.

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap resilien dengan dukungan utama dari permintaan domestik, peningkatan investasi, dan kontribusi sektor-sektor unggulan yang terus diperkuat. Di tengah lingkungan global yang masih dibayangi perlambatan pertumbuhan dan meningkatnya proteksionisme, diversifikasi sumber pertumbuhan melalui hilirisasi komoditas unggulan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer dan memperkokoh fondasi pertumbuhan jangka menengah. Dengan implementasi kebijakan yang terarah, penguatan sinergi pusat-daerah, serta pengelolaan risiko yang *prudent*, Sumatera Selatan diharapkan mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu kontributor penting perekonomian nasional dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

### 7.3 Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2025

**Mencermati perkembangan inflasi global dan nasional, inflasi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam kisaran target sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%.** Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh kombinasi faktor penguatan ketahanan pasokan pangan daerah, stabilitas nilai tukar, serta ekspektasi inflasi yang relatif terjaga di tengah ketidakpastian global. Program swasembada pangan daerah, penguatan produksi tanaman pangan, serta perbaikan infrastruktur irigasi dan dukungan alat mesin pertanian menjadi fondasi penting dalam menjaga pasokan dan mengendalikan tekanan harga, terutama di daerah pedesaan yang selama ini menjadi sumber utama tekanan inflasi Sumsel.

Meski menunjukkan prospek yang positif, beberapa risiko inflasi perlu dicermati. Tekanan harga dari eksternal tetap ada seiring meningkatnya proteksionisme global dan tensi perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan mendorong kenaikan biaya impor. Kebijakan global tersebut juga memicu volatilitas harga emas dunia, yang berdampak pada kenaikan harga emas perhiasan—salah satu komoditas dengan kontribusi besar terhadap inflasi Sumsel pada 2025. Dari sisi domestik, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% turut berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa serta meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama pada awal tahun.

Tekanan harga dari sisi energi dan kebijakan tarif juga perlu diwaspadai. Kenaikan harga energi global serta pengetatan penyaluran BBM bersubsidi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang konsumsi masyarakat. Rencana penyesuaian tarif PDAM Tirta Musi Palembang terkait penanganan limbah dapat menambah tekanan harga di sebagian wilayah. Selain itu, kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok yang berlaku sejak 1 Januari 2025 berdasarkan PMK 96/2024 dan 97/2024 diperkirakan turut mendorong kenaikan harga berbagai jenis rokok di pasaran. Meski demikian, berbagai kebijakan mitigasi seperti diskon tarif listrik dan tiket pesawat pada periode puncak mobilitas diperkirakan membantu meredam tekanan harga dari sisi tarif.

Sementara itu, inflasi pangan pada 2025 diperkirakan terjaga seiring membaiknya produktivitas pertanian berkat kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan sistem irigasi, optimalisasi pascapanen, penggunaan bibit unggul, penyediaan saprodi, alsintan, dan pendampingan intensif oleh penyuluh turut memperkuat produksi komoditas strategis seperti

padi, cabai, dan sayuran hortikultura lainnya. Namun demikian, tantangan struktural masih perlu diperhatikan, antara lain produksi on-farm/off-farm yang belum optimal, ketergantungan pada pasokan luar daerah, serta distribusi pangan yang belum efisien dan masih menimbulkan margin perdagangan dan pengangkutan yang tinggi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperkuat melalui pelaksanaan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027, yang mencakup empat pilar utama: keterjangkauan harga melalui operasi pasar dan stabilisasi harga pangan; peningkatan ketersediaan pasokan melalui pengembangan lumbung pangan, perluasan lahan hortikultura, dan optimalisasi irigasi; kelancaran distribusi melalui kerja sama antar daerah dan perbaikan infrastruktur logistik; serta komunikasi efektif melalui penguatan kualitas data dan sosialisasi pengendalian ekspektasi inflasi. Pelaksanaan program GNPIP, kerja sama antara daerah (KAD), subsidi ongkos angkut, dan intervensi pasar terkoordinasi menjadi instrumen kunci menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga.

Secara keseluruhan, dengan koordinasi kebijakan yang kuat dan konsisten, inflasi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam lintasan yang mendukung daya beli masyarakat dan pemulihian ekonomi daerah. Penguatan pasokan pangan lokal, efisiensi distribusi, serta pengelolaan risiko harga energi dan komoditas global menjadi kunci keberlanjutan stabilitas inflasi di Sumatera Selatan.

## 7.4 Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026

Inflasi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5±1%, ditopang oleh permintaan domestik yang relatif stabil dan pasokan komoditas pangan yang semakin baik seiring dengan realisasi program ketahanan pangan. Moderasi aktivitas ekonomi pascapengeluaran konsumsi pada 2025 serta upaya pengendalian harga yang lebih terarah di tingkat pusat dan daerah menjadi faktor utama yang menjaga inflasi tetap terkendali. Meski demikian, sejumlah risiko perlu diantisipasi, terutama terkait perkembangan harga komoditas global, ketidakpastian cuaca, dan potensi gangguan distribusi.

Dari sisi domestik, tekanan inflasi pada 2026 diperkirakan tetap terbatas seiring stabilitas daya beli masyarakat dan penguatan produksi pangan. Perbaikan infrastruktur irigasi dan bendungan strategis yang mulai beroperasi sejak 2025 diproyeksikan meningkatkan produksi pertanian dan hortikultura, sehingga membantu menahan kenaikan harga komoditas yang selama ini sensitif terhadap gangguan pasokan. Upaya peningkatan kapasitas produksi lokal dan penguatan cadangan pangan daerah diperkirakan semakin mengurangi ketergantungan pada pasokan luar wilayah.

Pada saat yang sama, risiko harga yang dipengaruhi oleh dinamika global tetap perlu dicermati. Fragmentasi perdagangan internasional, kebijakan proteksionis sejumlah negara besar, serta ketidakpastian geopolitik berpotensi menimbulkan kenaikan harga emas dan biaya impor barang tertentu. Namun, tekanan tersebut diperkirakan mereda seiring moderasi harga energi dan komoditas dunia dalam proyeksi 2026. Stabilitas nilai tukar yang terjaga

melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan nasional turut membantu menahan kenaikan biaya produksi domestik.

Dari sisi kebijakan publik, stabilisasi harga energi dan transportasi yang lebih terarah diperkirakan membantu meredam risiko kenaikan harga barang dan jasa yang sensitif terhadap biaya logistik. Penyesuaian tarif beberapa layanan diproyeksikan terbatas dan dikelola secara bertahap sehingga tidak menciptakan tekanan harga yang berlebihan.

Secara kelembagaan, penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten/kota melalui GNPIP menjadi pilar utama dalam memastikan stabilitas harga, terutama untuk komoditas pangan strategis. Optimalisasi kerja sama antara daerah, digitalisasi rantai pasok, penguatan peran BUMD Pangan dan Bulog dalam penyerapan dan stabilisasi pasokan, serta penyaluran bantuan sosial yang terarah diperkirakan menjadi instrumen efektif menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, inflasi Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam lintasan yang mendukung pemulihian ekonomi daerah. Dengan koordinasi kebijakan yang kuat dan respons yang tepat dalam menghadapi risiko harga pangan, energi, dan logistik, stabilitas inflasi diproyeksikan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

## 7.5 Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di level global, nasional, dan Sumatera Selatan di 2025 dan proyeksi di 2026, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan perlu memperkuat sinergi dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi peluang dan tantangan perekonomian. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan antara lain:

### 1) Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Pangan

Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat lumbung pangan nasional, yang terlihat dari produksi padi 2,83 juta ton di 2023 (tertinggi kelima se-nasional). Pada saat yang sama, beras menjadi penyumbang andil inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Selatan. Adapun peluang dan tantangan dari sisi produksi antara lain masih kurangnya infrastruktur untuk pengembangan lahan rawa untuk pertanian; tingginya biaya produksi terutama dari harga dan ketersediaan pupuk; dan hambatan pada akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan produksi petani. Dari sisi distribusi, inefisiensi logistik dan maraknya sistem ijon dengan tengkulak ditengarai menyebabkan panjangnya rantai distribusi beras di Sumsel. Hal ini tercermin dari tingginya Marginal Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) beberapa komoditas strategis dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2024, MPP beras mencapai 34,16% dan cabai merah 41,41%, menandakan tingginya disparitas harga dan biaya distribusi antarwilayah.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan maupun pengendalian inflasi. Kolaborasi ini perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan

ke depan sesuai Program Asta Cita, yang pada gilirannya mendukung daya beli dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

**a) Keterjangkauan Harga**

- Perluasan program kios/toko/warung pengendalian inflasi
- Optimalisasi pelaksanaan operasi pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat

**b) Ketersediaan Pasokan**

- Mendorong produksi pangan lokal
- Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai
- Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan nelayan

**c) Kelancaran Distribusi**

- Penguatan sistem distribusi dan rantai pasokan
- Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
- Peningkatan kualitas infrastruktur logistik
- Digitalisasi UMKM pangan

**d) Komunikasi Efektif**

- Diversifikasi komoditas pangan masyarakat
- Mendorong kemitraan antara petani dan industri (*contract farming*)
- Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi

## 2) Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan signifikan meskipun telah terjadi tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan per Maret 2025 tercatat sebesar 10,15%, yang merupakan pencapaian terendah dalam beberapa tahun terakhir, namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di tingkat kabupaten/kota, tujuh daerah sudah mencapai tingkat kemiskinan satu digit, tetapi masih ada beberapa wilayah yang menghadapi kemiskinan ekstrem, terutama di kabupaten seperti Lahat, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, dan Empat Lawang. Masalah utama yang dihadapi adalah ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak, serta ketidakmampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kontribusi besar dari komoditas seperti beras dan rokok terhadap garis kemiskinan.

Untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan perlu diterapkan antara lain melalui:

**a) Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin**

- Memperkuat jaring pengaman sosial melalui program bantuan sembako dan bantuan tunai dengan penyaluran yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin ekstrem.
- Mengadakan operasi pasar murah secara rutin di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi guna menekan harga kebutuhan pokok, terutama beras.
- Mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan dengan mendorong daya beli melalui program-program kemandirian ekonomi.

**b) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin**

- Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal, dan pendampingan usaha bagi UMKM.
- Mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
- Meningkatkan inklusi keuangan untuk memastikan masyarakat miskin memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi guna mengelola risiko ekonomi dan memanfaatkan peluang usaha.

**c) Sinergi Lintas Sektor dan Koordinasi Antarperangkat Daerah**

- Memastikan implementasi strategi pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor.
- Mengoptimalkan peran instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi inklusif bagi masyarakat miskin.

## 3) Mengakselerasi Investasi

Investasi memegang peran yang sangat krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Pada triwulan II 2025, kontribusi investasi terhadap PDRB mencapai 29,8%, menjadikannya salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Porsi yang signifikan ini menunjukkan bahwa percepatan investasi berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat dibandingkan komponen PDRB lainnya. Lebih jauh, investasi tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam transformasi ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, potensi investasi di Sumatera Selatan belum dapat dioptimalkan sepenuhnya. Beberapa kendala masih perlu ditangani, antara lain belum optimalnya proses realisasi proyek strategis nasional (PSN) maupun proyek swasta, serta keterbatasan insentif fiskal yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut dapat mengurangi daya tarik investor, terutama ketika dibandingkan dengan daerah lain yang menawarkan skema insentif dan fasilitas yang lebih kompetitif.

Selain itu, struktur ekonomi Sumatera Selatan hingga kini masih ditopang oleh komoditas unggulan berbasis sumber daya alam mentah, terutama batu bara, kelapa sawit, dan karet. Ketergantungan ini menjadikan perekonomian daerah sangat rentan terhadap gejolak global, baik berupa fluktuasi harga internasional maupun perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor. Setiap kali terjadi penurunan harga komoditas, tekanan langsung dirasakan pada kinerja ekspor, penerimaan daerah, hingga daya beli masyarakat.

Kondisi ini menegaskan urgensi untuk melakukan hilirisasi komoditas agar perekonomian Sumatera Selatan lebih tahan terhadap guncangan global. Dengan mendorong proses pengolahan lebih lanjut di dalam negeri, nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan, penciptaan lapangan kerja lebih luas, serta struktur industri daerah menjadi lebih kokoh.

Namun, proses hilirisasi masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan tenaga kerja terampil, rendahnya akses terhadap teknologi modern, hingga infrastruktur logistik yang belum memadai.

Untuk mendorong hilirisasi, optimalisasi investasi menjadi prasyarat utama. Investasi yang masuk perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada penggalian dan ekspor bahan mentah, tetapi juga mendukung transformasi struktural melalui pengolahan lanjutan di daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat *soft infrastructures* dan *hard infrastructures* sebagai penopang iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.

#### a) Penguatan *Soft Infrastructures*

- Koordinasi tata ruang dan perizinan: memperkuat sinergi dalam penyusunan RTRW dan RDTR, sekaligus memastikan perizinan investasi berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- Regulasi insentif fiskal daerah: mendorong penyusunan kebijakan turunan berupa pengurangan pajak dan retribusi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna meningkatkan daya tarik investor.
- Optimalisasi sistem OSS berbasis risiko (RBA): meningkatkan kualitas layanan dan kapabilitas aplikasi OSS agar proses perizinan investasi lebih cepat, transparan, dan efisien.
- Sinergi pusat-daerah: memperkuat koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan mengatasi hambatan birokrasi.

#### b) Penguatan *Hard Infrastructures*

- Infrastruktur konektivitas: membangun dan memperkuat jalan antarkota, *hauling road*, serta jalur kereta logistik guna memperlancar distribusi bahan baku dan produk olahan. Selain itu, realisasi pembangunan New Palembang Port sebagai pelabuhan baru mampu menampung kapal berkapasitas besar, sekaligus mendukung pelabuhan eksisting (Boom Baru).
- Kawasan industri siap pakai: memastikan ketersediaan lahan *clean and clear* serta mempercepat pengembangan kawasan industri strategis (KEK Tanjung Api-Api, Tanjung Enim, Sriwijaya CBD) agar investor mendapatkan kepastian lokasi usaha.
- Ketersediaan energi dan air: menjamin pasokan energi listrik dan air baku yang memadai serta berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas industri.

Selain memperbaiki iklim investasi, langkah yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan hilirisasi benar-benar berjalan efektif. Strategi ini tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan insentif, tetapi juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, teknologi pengolahan yang memadai, serta diversifikasi produk hilir yang mampu bersaing di pasar global. Upaya peningkatan kualitas SDM menjadi kunci, antara lain melalui program *link and match* antara institusi pendidikan dengan kebutuhan industri, pendirian sekolah vokasi dan pusat pelatihan berbasis kemitraan dengan swasta, serta

insentif bagi perusahaan yang aktif dalam menyediakan program magang bersertifikat. Di sisi lain, kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga riset, dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat transfer teknologi hilirisasi serta pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Tujuan hilirisasi sendiri mencakup diversifikasi produk olahan dari komoditas unggulan Sumatera Selatan. Batu bara diarahkan pada pengembangan gasifikasi, Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG, pupuk, dan bahan kimia dasar. Kelapa sawit ditujukan untuk menghasilkan produk oleokimia, biodiesel, serta pangan olahan. Sementara karet memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk ban kendaraan, sarung tangan medis, hingga kebutuhan industri lainnya. Dengan diversifikasi tersebut, struktur ekonomi akan lebih bernilai tambah, menyerap tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekspor daerah.

### 4) Mengembangkan Ekonomi Digital

Pengembangan ekonomi digital di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa tantangan, yang tercermin dalam penurunan peringkat dalam *East Ventures - Digital Competitiveness Index* (EV-DCI) 2025. EV-DCI bertujuan untuk memetakan perkembangan pilar daya saing digital dan sektor yang turut membangun ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia. Sumatera Selatan turun enam peringkat dari peringkat 22 pada tahun 2024 menjadi peringkat 28 pada tahun 2025, dengan skor 37,1. Penurunan ini menunjukkan adanya urgensi perbaikan dalam beberapa aspek daya saing digital, terutama terkait dengan infrastruktur digital dan literasi digital masyarakat. Meskipun terdapat peningkatan pada jaringan 4G di Sumatera Selatan, masih terdapat wilayah dengan *blank spot*, yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan internet yang memadai. Selain itu, masih belum optimalnya tingkat literasi digital dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi ekonomi di Sumatera Selatan.

Untuk meningkatkan ekonomi digital di Sumatera Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil:

#### a) Perluasan Infrastruktur Digital

- Memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital, terutama di *blank spot* yang belum terjangkau layanan internet yang memadai.
- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah (melalui TP2DD), pemerintah pusat, dan operator telekomunikasi untuk memastikan pemerataan akses internet, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil.

#### b) Peningkatan Literasi Digital

- Menggalakkan program pelatihan digital bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha.
- Memperkuat regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda), yang mendorong penggunaan layanan pembayaran non-tunai dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

## 5) Mendorong Sektor Ekonomi dan Keuangan Hijau sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

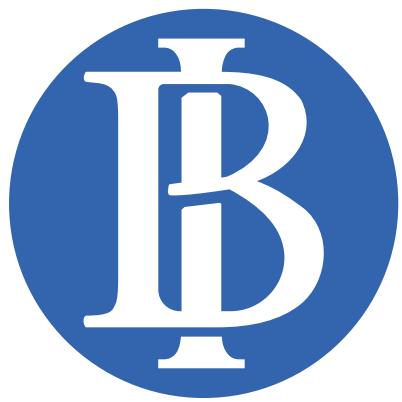
Pengembangan ekonomi dan keuangan hijau merupakan salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang berkelanjutan. Sinergi antara Pemerintah Daerah, industri, dan lembaga keuangan diperlukan untuk mendorong proyek-proyek berbasis hijau, baik melalui penyediaan regulasi yang mendukung, pendanaan, maupun insentif fiskal. Dukungan antarpemangku kepentingan akan memastikan bahwa agenda pembangunan hijau tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Adapun sektor pertanian dan UMKM memiliki posisi strategis sebagai lokomotif ekonomi hijau di Sumatera Selatan. Implementasi praktik berkelanjutan di sektor pertanian—misalnya penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kelapa sawit—dapat meningkatkan daya saing, memperkuat akseptasi produk Sumatera Selatan di pasar internasional, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, integrasi pembiayaan hijau dalam mendukung UMKM dan petani akan membantu mereka mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan atau sistem irigasi hemat energi, sehingga tidak hanya menurunkan biaya produksi, tetapi juga mengurangi emisi karbon.

Untuk mempercepat adopsi praktik ekonomi hijau di tingkat akar rumput, peran *local champion* sangat penting sebagai *role model*. *Local champion* merupakan pelaku UMKM yang memiliki dedikasi tinggi, terbuka pada inovasi, serta mampu mendorong perubahan mindset di komunitasnya. Melalui program *capacity building*, pendampingan, dan *showcasing best practices*, *local champion* dapat menjadi motor penyebaran inovasi hijau ke kelompok-kelompok UMKM lainnya. Dengan sinergi Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia, penguatan kapasitas ini akan memperluas dampak ekonomi hijau secara lebih inklusif.

Selain penguatan di tingkat komunitas, langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah membangun ekosistem pembiayaan hijau yang kokoh. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait dapat memperkuat dukungan insentif bagi UMKM yang mengadopsi praktik berkelanjutan, sekaligus mendorong lembaga keuangan mengembangkan produk pembiayaan ramah lingkungan. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah meluncurkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang memberikan keringinan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk UMKM dan proyek ekonomi hijau. Dengan plafon insentif yang diperluas hingga 5% dan realisasi ratusan triliun rupiah secara nasional, KLM menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan hijau di daerah. Pemanfaatan KLM oleh perbankan di Sumatera Selatan, apabila dipadukan dengan kebijakan insentif fiskal daerah, akan memperkuat aliran kredit ke sektor pertanian berkelanjutan, hilirisasi komoditas, serta UMKM hijau. Sinergi ini tidak hanya memperluas akses

pembiayaan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Selatan menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



A blurred background image showing a portion of a keyboard on the left and a red and blue circular logo in the center-right. The logo appears to be the Indonesian flag. The overall image has a dark, semi-transparent overlay.

# Lampiran

**A.Tabel Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan**

TAHUN /BULAN	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Pengeluaran, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Sumatera Selatan (mtm%)</b>													
2023	1	0,35	1,30	0,22	0,18	0,46	0,04	-1,63	0,00	0,13	0,00	0,23	0,99
	2	0,08	-0,08	0,52	-0,22	0,03	0,27	-0,21	0,00	0,09	0,83	0,42	0,84
	3	0,20	0,35	0,02	-0,01	-0,02	-0,02	0,61	0,03	0,03	0,03	0,04	0,36
	4	0,33	0,17	0,23	0,04	0,15	0,00	1,72	0,04	0,04	0,00	0,29	0,47
	5	-0,04	0,58	-0,01	-0,02	-0,03	0,01	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08
	6	0,39	1,19	0,11	-0,04	0,04	0,63	0,13	0,01	0,05	0,00	0,20	-0,50
	7	0,29	0,71	0,32	-0,03	-0,28	0,00	0,35	0,00	0,09	0,40	0,00	0,02
	8	-0,04	-0,60	-0,05	0,01	0,04	0,21	0,34	0,00	0,06	1,56	0,03	0,21
	9	0,37	1,06	0,01	0,09	-0,10	0,02	0,02	0,26	0,02	0,00	0,00	0,26
	10	0,50	0,41	0,02	1,81	0,18	0,03	0,27	-0,01	0,08	0,00	0,03	0,30
	11	0,54	1,66	0,02	-0,02	-0,04	0,06	-0,05	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,43
	12	0,15	0,26	0,00	-0,02	0,02	0,08	0,47	0,09	-0,03	0,00	0,01	0,19
2024	1	-0,08	-0,11	-0,80	0,10	0,07	0,21	-0,29	-0,07	-0,24	0,00	0,02	0,33
	2	0,01	0,20	-0,31	-0,05	0,02	0,07	-0,11	-0,11	-0,36	0,01	0,01	-0,08
	3	0,25	0,55	-0,40	0,03	-0,22	-0,03	0,12	-0,14	0,00	0,00	0,55	0,64
	4	0,43	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	0,00	0,02	0,12
	5	0,06	-0,05	-0,28	0,17	-0,70	0,05	0,04	-0,02	0,00	0,00	0,28	1,01
	6	-0,03	-0,48	0,25	0,28	-0,01	0,17	0,24	0,00	0,43	0,00	0,16	0,26
	7	-0,29	-1,68	0,35	-0,10	0,07	0,62	0,29	0,04	0,82	1,73	0,01	0,68
	8	-0,19	-1,06	0,17	0,03	0,16	0,24	0,32	0,01	-0,02	0,04	0,01	0,84
	9	-0,12	-0,51	-0,03	0,08	0,12	0,08	-0,12	-0,04	0,06	0,04	0,09	0,29
	10	0,09	0,07	0,02	0,11	0,00	0,00	-0,45	0,02	0,20	0,00	0,00	1,34
	11	0,58	1,49	-0,03	0,03	-0,14	0,14	0,40	0,01	-0,36	0,05	0,10	0,93
	12	0,50	1,72	0,00	-0,10	-0,03	0,19	-0,06	-0,01	0,08	0,00	0,03	-0,13
2025	1	-0,36	2,27	-0,21	-8,35	0,02	0,06	0,20	-0,07	0,45	0,00	0,21	0,86
	2	-0,41	-0,79	0,06	-3,58	0,23	0,07	0,51	-0,02	0,20	0,00	0,04	2,71
	3	1,53	1,18	1,15	7,71	-0,04	0,18	-0,17	-0,01	0,04	0,00	0,01	1,98
	4	1,39	0,48	-0,03	6,09	0,09	0,00	0,48	-0,39	0,08	0,00	0,18	4,63
	5	-0,35	-0,81	-0,79	-0,01	-0,11	0,00	-0,11	0,08	0,04	0,00	0,47	-0,86
	6	0,08	-0,10	0,11	-0,03	0,08	0,31	0,02	0,01	0,69	0,00	0,07	0,92
	7	0,14	0,30	-0,15	0,03	0,05	0,05	-0,15	0,00	0,02	0,68	0,06	0,27
	9	0,27	0,41	-0,19	-0,01	-0,09	0,10	0,03	0,02	-0,03	0,07	0,06	1,67

TAHUN /BULAN	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Palembang (mtm%)</b>													
2023	1	0,35	1,32	0,24	0,19	0,51	0,04	-1,72	0,00	0,15	0,00	0,23	1,07
	2	0,09	-0,08	0,57	-0,25	0,03	0,30	-0,23	0,00	0,03	0,86	0,46	0,88
	3	0,21	0,36	0,01	-0,01	-0,04	-0,03	0,63	0,03	0,03	0,04	0,05	0,36
	4	0,33	0,14	0,23	0,02	0,16	0,00	1,82	0,04	0,05	0,00	0,30	0,50
	5	-0,05	0,57	0,00	0,00	-0,03	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09
	6	0,39	1,24	0,13	-0,05	0,05	0,67	0,15	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,55
	7	0,29	0,72	0,35	-0,04	-0,32	0,00	0,35	0,00	0,08	0,40	0,00	0,02
	8	-0,04	-0,61	-0,06	0,00	0,04	0,22	0,35	0,00	0,06	1,58	0,04	0,21
	9	0,37	1,07	0,01	0,09	-0,11	0,02	0,02	0,26	0,00	0,00	0,00	0,27
	10	0,53	0,41	0,03	1,97	0,19	0,00	0,28	0,00	0,06	0,00	0,03	0,29
	11	0,55	1,74	0,01	-0,01	-0,07	0,07	-0,06	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,44
	12	0,15	0,26	0,00	-0,02	0,02	0,08	0,47	0,09	-0,03	0,00	0,01	0,19
2024	1	-0,02	0,17	-0,05	0,01	0,02	0,17	-0,59	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,27
	2	0,21	0,85	0,01	-0,02	0,04	0,11	-0,13	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,03
	3	0,46	1,68	-0,69	0,06	-0,24	-0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	0,20	0,34
	4	0,38	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	5	0,10	0,13	-0,02	-0,01	-0,94	0,08	0,25	0,01	0,00	0,00	0,17	1,00
	6	-0,07	-0,56	0,24	0,00	0,03	0,05	0,35	0,00	0,01	0,00	0,19	0,03
	7	-0,31	-2,15	0,25	-0,08	0,08	0,36	0,41	0,05	0,51	1,88	0,00	0,71
	8	-0,27	-1,40	-0,01	0,01	0,21	0,34	0,25	0,00	-0,06	0,06	0,00	0,40
	9	-0,13	-0,68	-0,01	0,05	0,17	0,05	-0,07	-0,03	0,07	0,00	0,13	0,27
	10	0,09	0,14	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,49	0,00	0,28	0,00	0,00	1,55
	11	0,39	0,91	0,18	-0,01	-0,23	0,19	0,52	0,00	-0,45	0,06	0,06	1,02
	12	0,42	1,80	0,03	0,03	0,12	0,26	0,11	0,02	0,40	0,00	0,01	0,32
2025	1	-0,47	2,43	-0,03	-7,70	0,08	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,09	0,96
	2	-0,30	-0,78	0,08	-2,94	0,26	0,10	0,59	-0,03	0,30	0,00	0,03	2,88
	3	1,52	1,22	0,36	7,25	-0,09	0,24	-0,22	0,00	0,06	0,00	0,00	2,08
	4	1,33	0,45	-0,04	4,95	0,13	-0,13	0,68	-0,40	0,13	0,00	0,25	4,34
	5	-0,19	-0,49	-0,03	-0,10	-0,21	-0,03	-0,05	-0,02	0,04	0,00	0,69	-0,99
	6	0,09	0,02	0,01	-0,06	0,14	0,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81
	7	0,17	0,39	0,01	0,05	0,10	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,67	0,08	0,45
	8	-0,07	-0,40	0,03	0,11	0,24	-0,01	-0,25	-0,08	0,01	0,09	0,09	0,32
	9	0,30	0,61	-0,01	0,00	-0,17	0,17	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	1,69

TAHUN /BULAN	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Lubuklinggau (mtm%)</b>													
2023	1	0,34	1,06	0,04	0,12	-0,03	-0,01	-0,39	-0,14	0,00	0,00	0,05	0,13
	2	0,04	-0,07	0,00	0,16	0,06	0,04	-0,02	0,00	0,61	0,00	0,01	0,26
	3	0,11	0,18	0,04	-0,10	0,04	0,00	0,29	0,04	0,00	0,00	0,00	0,37
	4	0,35	0,62	0,32	0,22	0,08	0,08	0,70	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06
	5	0,13	0,72	-0,04	-0,10	-0,08	0,11	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
	6	0,25	0,64	0,00	0,07	-0,08	0,00	-0,02	0,15	0,54	0,00	0,00	0,08
	7	0,31	0,68	0,03	0,07	0,13	0,07	0,27	-0,02	0,25	0,44	0,02	0,07
	8	-0,04	-0,45	0,00	0,07	0,02	0,06	0,27	0,10	0,00	1,33	0,00	0,20
	9	0,34	0,92	0,00	0,06	-0,03	0,00	-0,05	0,23	0,28	0,00	0,01	0,24
	10	0,19	0,39	0,00	0,03	0,00	0,39	0,19	-0,12	0,22	0,00	0,00	0,31
	11	0,33	0,90	0,01	0,00	0,26	0,00	0,06	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,35
	12	0,25	0,31	0,00	0,08	0,27	0,39	0,48	0,08	-0,45	0,00	0,13	0,89
2024	1	-0,13	-0,56	0,00	0,08	0,06	0,00	-0,11	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,63
	2	0,20	0,77	0,00	0,02	-0,12	0,10	-0,43	0,05	-0,01	0,00	0,07	0,79
	3	0,30	0,56	0,23	0,05	0,01	0,00	0,19	-0,03	0,33	0,00	0,72	0,25
	4	0,36	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10
	5	0,14	0,28	0,02	0,15	0,19	-0,01	-0,22	-0,05	0,00	0,00	0,14	0,57
	6	-0,10	-0,45	0,00	0,23	-0,06	0,06	0,17	-0,44	-0,16	0,00	0,09	-0,03
	7	-0,31	-1,34	0,09	0,02	-0,08	-0,11	-0,22	0,09	0,00	1,20	0,00	0,91
	8	-0,24	-1,28	0,01	0,07	0,10	0,18	0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00	1,55
	9	-0,06	-0,52	0,05	0,08	-0,04	0,04	-0,11	-0,01	0,06	0,58	0,16	0,69
	10	0,02	0,06	0,00	0,04	-0,06	0,15	-0,41	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,69
	11	0,26	0,59	0,00	0,00	0,02	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,25	0,93
	12	0,58	1,58	0,00	0,03	0,19	0,03	0,52	0,03	0,00	0,00	0,03	0,20
2025	1	-0,64	1,67	0,00	-8,59	0,42	0,73	0,03	-0,08	0,14	0,00	0,00	0,64
	2	-0,13	0,53	0,00	-4,08	0,75	-0,01	0,30	0,00	0,02	0,00	0,03	1,98
	3	1,41	1,06	0,33	7,67	-0,08	0,08	-0,45	0,01	0,01	0,00	0,13	1,58
	4	1,29	-0,02	0,00	7,31	-0,08	0,00	0,05	-0,46	0,00	0,00	0,26	3,57
	5	-0,21	-1,07	0,00	0,00	0,56	0,39	-0,05	-0,11	0,08	0,00	0,49	0,44
	6	0,11	0,08	0,00	0,00	-0,09	0,34	0,32	0,00	0,61	0,00	0,00	0,48
	7	0,21	0,28	0,50	0,10	0,15	0,00	0,03	0,00	1,36	0,65	0,91	9,16
	8	0,07	0,26	-0,01	0,00	0,01	0,10	-0,41	0,03	0,21	0,10	0,14	0,10
	9	0,27	0,29	0,00	0,00	0,01	0,10	0,23	0,04	0,00	0,75	0,07	1,28

TAHUN /BULAN	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
<b>Ogan Komering Ilir (mtm%)</b>												
2024	1	-0,11	0,09	-4,36	0,88	0,37	0,33	-0,16	0,00	-0,55	0,00	0,06
	2	-0,13	-0,22	-0,11	-0,42	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,04
	3	0,05	-0,55	0,20	-0,15	-0,33	0,44	-0,01	-1,04	-0,17	0,00	2,19
	4	0,42	0,02	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,12
	5	0,11	-0,08	-1,52	1,67	-0,04	-0,03	-0,03	-0,23	0,00	0,00	0,57
	6	0,19	-0,57	0,48	2,84	0,00	0,03	-0,05	0,24	2,75	0,00	0,00
	7	-0,40	-1,55	0,75	-0,37	0,07	2,89	0,00	0,00	3,52	1,61	0,06
	8	-0,18	-0,97	0,71	0,16	0,00	0,00	0,95	0,00	0,09	0,00	1,07
	9	-0,16	-0,36	-0,15	-0,01	0,00	0,00	-0,21	-0,11	0,07	0,16	0,00
	10	0,07	-0,26	0,13	1,35	0,00	0,00	-0,32	0,11	0,18	0,00	1,03
	11	0,92	2,20	-0,81	0,19	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,47	0,00	0,32
	12	0,70	1,62	0,10	-0,34	0,16	0,00	-0,05	0,00	0,23	0,00	0,06
2025	1	-0,03	2,16	-1,12	-11,76	-0,07	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,87
	2	-0,44	-0,40	0,04	-5,57	0,04	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	2,00
	3	1,68	0,97	5,25	11,47	0,07	0,00	-0,21	-0,05	0,00	0,00	0,02
	4	1,34	0,19	0,00	10,82	0,01	0,00	-0,13	-0,38	0,00	0,00	5,56
	5	-0,49	-0,49	-4,36	0,00	-0,01	0,02	~0	0,38	0,00	0,00	-0,66
	6	0,09	-0,44	0,58	-0,01	-0,03	0,13	-0,20	0,00	4,46	0,00	0,27
	7	0,05	0,22	-1,07	-0,05	-0,19	0,14	0,20	0,00	0,00	1,07	0,00
	8	-0,11	-0,48	-0,04	0,21	0,00	-0,13	-0,06	0,00	-0,62	0,00	0,00
	9	0,03	-0,18	-1,09	-0,11	0,08	-0,25	0,02	0,00	-0,17	0,35	0,32
<b>Muara Enim (mtm%)</b>												
2024	1	-0,28	-1,14	0,00	0,17	-0,05	0,50	1,66	-0,49	-0,96	0,00	0,10
	2	-0,93	-1,57	-2,28	-0,10	-0,05	-0,11	0,00	-0,80	-1,37	0,00	0,00
	3	-0,69	-1,81	0,00	0,03	-0,02	0,44	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	4	0,81	0,25	0,00	0,03	0,01	0,01	0,14	0,00	0,06	0,00	0,01
	5	-0,29	-0,75	0,00	0,02	-0,72	0,00	-1,23	0,03	0,00	0,00	0,58
	6	-0,02	-0,09	0,05	0,01	-0,21	1,12	-0,19	-0,03	0,33	0,00	0,25
	7	-0,07	-0,30	0,42	0,01	0,12	0,00	0,00	0,02	0,00	0,59	0,00
	8	0,24	0,00	0,41	-0,01	0,07	-0,06	0,20	0,01	0,00	0,00	0,05
	9	0,02	-0,14	0,01	0,43	0,03	0,30	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,22
	10	0,12	0,20	0,00	-0,31	0,31	0,00	-0,18	0,07	-0,08	0,00	0,00
	11	1,28	2,85	0,00	0,26	0,11	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	1,31
	12	0,60	1,70	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,02	0,00	-1,60	0,00	0,00
2025	1	-0,02	2,06	0,00	-10,14	-0,40	0,14	0,38	-0,45	2,79	0,00	0,00
	2	-1,02	-1,73	0,00	-6,75	-0,01	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	2,85
	3	1,40	1,34	0,00	7,92	0,08	0,15	0,39	0,00	0,00	0,00	1,99
	4	1,80	1,16	0,00	10,41	0,06	0,18	-0,10	-0,38	0,00	0,00	5,46
	5	-0,98	-2,19	0,00	0,68	-0,04	-0,11	-0,71	0,43	0,00	0,00	-0,96
	6	-0,04	-0,13	0,00	0,18	-0,01	-0,05	-0,19	0,02	0,00	0,00	0,30
	7	0,06	0,15	0,00	0,68	-0,28	0,48	0,20	-0,37	2,22	0,42	0,16
	8	0,22	0,47	0,00	-0,01	0,03	0,34	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,39
	9	0,35	0,53	0,00	~-0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54

**B.Tabel Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan**

TAHUN /BULAN	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Sumatera Selatan (mtm%)</b>													
2023	1	5,34	6,63	3,37	1,47	4,78	2,50	14,94	-0,03	5,22	3,77	3,24	6,33
	2	5,43	7,25	3,85	1,14	4,11	1,90	14,32	-0,04	5,23	3,93	3,62	6,74
	3	4,92	5,85	3,67	0,68	3,64	1,82	15,11	0,04	5,23	3,97	3,56	5,99
	4	4,27	4,04	3,30	0,55	2,83	1,76	15,48	0,11	4,78	3,97	3,50	5,22
	5	3,38	3,12	2,74	0,42	2,24	1,37	11,61	0,12	3,51	3,97	3,24	4,05
	6	2,86	1,76	2,73	0,35	1,99	1,87	11,68	0,12	2,67	3,97	2,93	3,34
	7	2,38	0,83	1,95	0,22	1,49	1,74	10,58	0,13	2,66	3,89	2,69	4,02
	8	3,19	3,04	1,83	0,20	1,32	1,80	11,59	0,13	2,12	5,48	2,13	3,87
	9	2,28	4,59	1,69	0,12	0,24	1,25	0,18	0,32	0,54	5,48	1,89	3,81
	10	2,90	6,45	1,61	1,83	0,38	1,21	-0,49	0,31	0,58	2,86	1,52	3,88
	11	3,52	8,43	1,42	1,75	0,43	1,26	-0,17	0,29	0,57	2,85	1,36	4,15
	12	3,17	7,22	1,42	1,77	0,44	1,34	0,07	0,39	0,53	2,85	1,28	3,74
2024	1	3,35	7,71	1,04	1,67	0,06	1,10	0,95	-0,13	2,35	2,18	2,17	3,52
	2	3,15	7,81	0,28	1,64	-0,01	1,30	0,91	-0,21	1,51	1,65	1,51	2,75
	3	3,24	8,13	-0,50	1,83	-0,24	1,34	0,75	-0,38	1,45	1,62	1,78	3,03
	4	9,00	7,61	-1,39	1,84	-0,44	1,19	0,80	-0,47	1,90	1,62	1,82	4,15
	5	2,98	6,64	-1,68	2,02	-1,31	1,24	1,64	-0,52	1,63	1,47	2,05	5,12
	6	2,48	4,44	-1,18	2,30	-1,30	1,26	1,91	-0,51	2,07	1,47	1,97	5,94
	7	1,87	2,02	-1,40	2,17	-0,86	1,92	2,04	-0,28	1,61	2,86	1,59	6,45
	8	1,80	1,72	-1,18	2,17	-0,78	1,65	2,02	-0,26	2,00	1,78	1,56	7,29
	9	1,40	0,47	-1,41	2,17	-0,61	1,73	1,81	-0,42	2,67	1,82	1,53	7,35
	10	1,09	0,20	-1,39	0,70	-0,54	1,71	1,13	-0,39	2,05	1,82	1,40	8,51
	11	0,73	-1,21	-1,17	0,68	-0,64	1,78	1,60	-0,37	1,55	1,87	1,40	1,50
	12	1,20	0,49	-0,48	0,61	-0,67	1,81	1,35	-0,37	1,27	1,87	1,52	8,09
2025	1	0,92	2,89	0,11	7,89	0,72	1,66	1,84	0,37	1,97	1,87	1,71	8,66
	2	0,49	1,87	0,48	-11,15	-0,51	1,66	2,47	-0,28	2,54	1,86	1,74	11,69
	3	1,77	2,50	2,05	-4,32	-0,34	1,88	2,17	-0,15	2,58	1,86	1,20	13,18
	4	2,74	2,60	1,41	1,48	-0,24	1,81	1,69	-0,48	1,98	1,86	1,12	16,44
	5	2,33	1,82	0,89	1,30	0,36	1,76	1,54	-0,38	2,02	1,86	1,31	14,28
	6	2,44	2,21	0,75	0,99	0,45	1,90	1,32	-0,37	2,28	1,86	1,21	15,02
	7	2,88	4,27	0,25	1,11	0,43	1,32	0,87	-0,41	1,47	0,80	1,26	14,55
	8	3,04	5,13	0,10	1,19	0,43	1,09	0,32	-0,47	1,41	0,84	1,30	14,10
	9	3,44	6,11	-0,07	1,10	0,22	1,11	0,46	-0,41	1,32	0,87	1,28	15,67

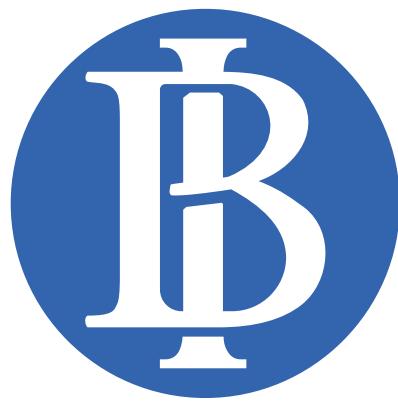
TAHUN /BULAN	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Palembang (mtm%)</b>													
2023	1	5,34	6,65	3,44	1,39	4,93	2,47	14,84	0,10	5,35	3,89	3,14	6,42
	2	5,44	7,26	3,97	1,03	4,26	1,84	14,20	0,10	5,33	4,04	3,59	6,93
	3	4,93	5,87	3,82	0,53	3,76	1,75	15,03	0,13	5,36	4,09	3,59	6,12
	4	4,28	3,98	3,43	0,41	2,94	1,70	15,50	0,17	4,93	4,09	3,55	5,38
	5	3,38	3,08	2,83	0,34	2,32	1,27	11,57	0,17	3,66	4,09	3,29	4,13
	6	2,87	1,74	2,82	0,23	2,11	1,86	11,64	0,15	2,82	4,09	3,03	3,34
	7	2,38	0,79	1,99	0,11	1,56	1,72	10,48	0,15	2,77	4,01	2,84	4,12
	8	3,21	3,09	1,85	0,07	1,39	1,83	11,59	0,15	2,18	5,65	2,25	3,94
	9	2,29	4,70	1,71	-0,03	0,20	1,25	0,05	0,33	0,44	5,65	2,01	3,86
	10	2,94	6,53	1,72	1,86	0,39	1,24	-0,61	0,33	0,45	2,90	1,63	4,01
	11	3,56	8,55	1,50	1,82	0,42	1,29	-0,25	0,33	0,45	2,90	1,46	4,29
	12	3,22	7,33	1,51	1,87	0,42	1,36	0,01	0,42	0,45	2,90	1,37	3,79
2024	1	2,54	6,21	1,07	1,95	0,12	0,92	0,57	0,27	0,31	2,13	1,10	3,04
	2	2,63	7,16	0,65	2,11	0,10	1,07	0,53	0,27	0,27	1,57	0,70	2,13
	3	2,90	8,54	-0,06	2,16	-0,20	0,98	0,32	0,23	0,23	1,53	0,87	2,02
	4	2,97	8,76	-0,16	2,16	-0,39	0,98	0,31	0,13	0,27	1,53	0,63	2,72
	5	3,03	8,10	-0,19	2,15	-1,34	1,06	1,62	0,14	0,27	1,53	0,71	3,68
	6	2,64	6,09	-0,07	2,16	-1,35	0,91	1,99	0,14	0,28	1,53	0,64	4,47
	7	2,09	3,07	-0,16	2,09	-0,97	1,28	2,28	0,19	0,73	3,21	0,64	5,18
	8	1,85	2,39	-0,14	2,10	-0,82	0,94	2,31	0,19	0,53	1,95	0,61	5,45
	9	1,41	0,73	-0,16	2,04	-0,58	0,93	2,10	0,01	0,60	1,95	0,74	5,56
	10	1,01	0,51	-0,16	0,02	-0,76	0,94	1,37	0,01	0,77	1,95	0,72	6,86
	11	0,95	-0,19	0,01	0,01	-0,94	1,26	1,98	0,01	0,34	2,00	0,78	7,35
	12	1,24	1,30	0,02	0,01	1,05	1,43	1,63	0,06	0,74	2,00	0,79	6,72
2025	1	0,78	3,59	0,00	0,00	-0,99	1,26	2,42	-0,06	0,89	2,00	0,88	7,46
	2	0,27	1,92	0,07	0,07	-0,77	1,25	3,16	-0,09	1,24	1,99	0,91	10,53
	3	1,32	1,45	1,13	1,13	-0,63	1,68	2,77	-0,09	1,30	1,99	0,70	12,44
	4	2,28	1,44	0,97	0,97	-0,46	1,65	2,37	-0,42	1,36	1,99	0,92	15,88
	5	1,98	0,81	0,96	0,96	0,28	1,54	2,07	-0,45	1,40	1,40	1,99	1,45
	6	2,14	1,39	0,73	0,73	0,39	1,90	1,77	-0,45	1,39	1,99	1,29	14,48
	7	2,63	4,02	0,49	0,49	0,41	1,54	1,09	-0,50	0,88	0,79	1,36	14,19
	8	2,83	5,07	0,53	0,84	0,43	1,18	0,59	0,58	0,94	0,82	1,45	14,09
	9	3,28	6,42	0,53	0,79	0,10	1,31	0,69	-0,53	0,88	0,82	1,32	15,71

TAHUN /BULAN	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Lubuklinggau (mtm%)</b>													
2023	1	5,31	6,34	2,63	2,45	3,24	2,86	16,29	-1,89	3,75	1,62	4,38	5,35
	2	5,40	7,15	2,53	2,44	2,70	2,85	15,81	-1,93	4,14	1,62	3,85	4,66
	3	4,82	5,62	2,18	2,18	2,41	2,77	16,07	-1,19	3,78	1,62	3,20	4,58
	4	4,27	4,74	1,89	1,95	1,57	2,67	15,46	-0,81	3,23	1,62	2,95	3,40
	5	3,40	3,59	1,79	1,44	1,39	2,76	12,11	-0,74	1,83	1,62	2,73	3,21
	6	2,78	1,98	1,70	1,67	0,75	1,91	12,27	-0,48	0,99	1,62	1,70	3,36
	7	2,39	1,27	1,63	1,51	0,78	1,98	11,74	-0,32	1,44	1,54	0,99	3,01
	8	2,86	2,57	1,62	1,64	0,60	1,26	11,74	-0,23	1,44	2,51	0,79	3,07
	9	2,15	3,38	1,62	1,70	0,58	1,26	1,68	0,24	1,71	2,51	0,49	3,30
	10	2,53	5,54	0,57	1,34	0,25	0,75	1,00	0,12	1,93	1,87	0,30	2,41
	11	2,95	7,23	0,41	0,96	0,55	0,73	0,76	-0,31	1,92	1,78	0,20	2,48
	12	2,61	6,06	0,39	0,68	0,64	1,13	0,93	-0,11	1,46	1,78	0,28	3,13
2024	1	2,01	4,29	0,31	0,45	0,75	0,96	1,06	0,01	1,58	1,77	0,52	3,66
	2	2,15	5,08	0,31	0,37	0,57	1,00	0,70	0,06	0,82	1,77	0,48	3,52
	3	2,36	5,59	0,46	0,47	0,56	1,00	0,59	-0,04	1,05	1,77	1,21	3,39
	4	2,45	5,36	0,85	0,39	0,53	0,96	0,80	-0,06	1,22	1,77	1,52	4,79
	5	2,51	4,98	0,93	0,60	0,78	0,98	1,37	-0,11	1,22	1,77	1,66	5,26
	6	2,16	3,71	0,93	0,78	0,82	1,03	1,61	-0,68	0,49	1,77	1,75	5,15
	7	1,45	1,42	1,01	0,75	0,58	0,87	1,10	-0,57	0,29	2,14	1,73	6,03
	8	1,31	0,80	1,02	0,77	0,68	1,00	0,94	-0,68	0,29	1,20	1,68	7,47
	9	1,11	-0,07	1,07	0,82	0,68	1,04	0,86	-0,81	-0,04	1,78	1,79	7,95
	10	0,89	-0,56	1,07	0,84	0,60	0,78	0,25	-0,71	-0,29	1,78	1,79	8,34
	11	0,68	-1,36	1,06	0,84	0,33	0,74	0,11	-0,37	-0,30	1,78	2,05	8,96
	12	1,02	-0,08	1,06	0,82	0,22	0,45	0,22	-0,38	0,25	1,78	1,82	8,23
2025	1	0,50	2,17	1,06	-7,92	0,58	1,18	0,35	-0,46	0,40	1,78	1,82	8,25
	2	0,16	1,92	1,06	-11,69	1,45	1,07	1,08	-0,51	0,42	1,78	1,78	10,21
	3	1,28	2,43	1,17	-4,96	1,36	1,15	0,44	-0,47	0,20	1,78	1,18	11,67
	4	2,22	2,11	0,50	1,92	1,28	1,15	-0,32	-0,93	0,04	1,78	1,09	14,07
	5	1,85	0,74	0,48	1,77	1,66	1,55	-0,15	-0,99	0,12	1,78	1,45	13,92
	6	2,07	1,29	0,48	1,55	1,63	1,83	-0,01	-0,55	0,89	1,78	1,36	14,50
	7	2,61	2,95	0,89	1,62	1,89	1,94	0,24	-0,64	2,26	1,23	1,36	13,67
	8	2,92	4,55	0,87	1,55	1,77	1,86	-0,28	-0,59	2,48	1,34	1,50	12,04
	9	3,26	5,40	0,82	1,47	1,82	1,92	0,05	-0,54	2,42	1,51	1,41	12,69

TAHUN /BULAN	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Ogan Komering Ilir (mtm%)</b>													
2024	1	4,92	9,80	-3,48	1,44	1,16	2,48	0,39	-0,37	6,52	5,77	2,59	5,28
	2	4,60	9,73	-4,18	-0,31	0,89	3,35	0,56	-0,18	2,32	4,57	2,30	5,40
	3	4,56	9,31	-5,89	0,74	0,65	3,75	0,58	-1,22	1,86	4,57	3,89	6,51
	4	3,54	7,49	10,04	0,79	0,15	2,02	0,51	-1,46	1,45	4,57	4,90	6,54
	5	2,81	5,83	11,46	2,47	-0,46	1,99	-0,22	-1,90	-0,51	2,23	5,49	7,50
	6	2,27	3,16	-9,44	5,33	-0,24	2,02	-0,17	-1,57	2,49	2,23	5,06	9,33
	7	1,78	1,67	-9,17	5,60	-0,06	4,97	-0,23	-1,55	5,64	1,61	4,18	10,42
	8	1,95	1,55	-8,43	5,44	-0,03	4,97	0,72	-1,55	5,73	1,61	4,18	11,65
	9	1,72	1,01	-8,22	5,30	-0,03	4,97	0,50	-1,66	5,80	1,77	4,18	11,82
	10	1,44	0,07	-8,11	6,30	-0,03	4,97	0,09	-1,55	6,00	1,77	4,18	12,73
	11	0,31	-2,68	-5,82	5,91	0,08	3,68	0,27	-1,58	5,25	1,77	4,52	11,46
	12	1,48	-0,65	-1,92	5,81	0,25	3,68	0,22	-1,26	5,68	1,77	4,59	11,83
2025	1	1,57	1,40	1,41	-7,45	-0,19	3,34	0,59	-1,26	6,26	1,77	5,44	12,45
	2	1,25	1,21	1,57	12,23	0,19	3,34	0,84	1,26	7,30	1,77	5,40	14,41
	3	2,91	2,77	6,68	-2,01	0,22	2,89	0,63	-0,28	7,48	1,77	3,16	13,91
	4	3,85	2,90	3,78	8,67	0,23	2,89	0,49	-0,43	6,47	1,77	1,91	18,19
	5	3,23	2,49	0,79	6,89	0,26	2,94	0,52	0,18	6,47	1,77	1,34	16,45
	6	3,13	2,63	0,88	3,93	0,23	3,04	0,38	-0,05	8,24	1,77	1,61	17,07
	7	3,60	4,47	-0,94	4,26	-0,02	0,29	0,58	-0,05	4,56	1,23	1,56	15,56
	8	3,67	4,99	-1,67	4,32	-0,02	0,16	-0,44	-0,05	3,82	1,23	1,56	15,63
	9	3,86	5,17	-2,60	4,22	0,06	-0,09	-0,21	0,06	3,57	1,42	1,88	17,39
<b>Muara Enim (mtm%)</b>													
2024	1	6,31	11,35	7,75	0,36	-2,31	0,72	4,34	-1,85	8,98	0,00	8,14	4,18
	2	4,63	8,53	4,73	0,49	-2,29	0,57	4,15	-2,64	7,49	0,00	5,16	2,90
	3	3,76	6,12	4,73	0,99	-2,24	1,01	4,15	-2,64	7,54	0,00	3,94	4,56
	4	3,70	4,71	4,73	1,21	-2,20	1,71	4,80	-2,57	11,24	0,00	4,05	8,75
	5	3,18	3,33	4,72	1,27	-3,67	1,71	4,21	-2,54	11,24	0,00	4,66	10,19
	6	2,17	0,82	4,77	1,31	-3,87	2,85	4,01	-2,57	11,60	0,00	4,92	10,29
	7	1,04	-0,79	2,98	0,21	-2,18	3,29	3,45	-1,22	2,41	0,59	3,00	8,89
	8	1,52	0,02	3,45	0,18	-2,49	2,92	1,96	-1,13	6,15	0,59	2,82	12,12
	9	1,08	-0,87	1,25	0,76	-2,51	3,60	1,75	-1,21	11,45	0,59	2,02	11,64
	10	1,13	-0,48	1,25	0,47	-0,64	3,60	1,10	-1,13	5,42	0,59	1,09	12,67
	11	0,08	-2,64	-1,42	0,79	-0,46	3,64	1,11	-1,15	4,56	0,59	1,09	12,56
	12	0,74	-0,54	-1,42	0,32	-0,30	2,93	1,17	-1,10	-0,28	0,59	1,09	11,08
2025	1	1,00	2,68	-1,42	-10,01	-0,65	2,56	-0,10	-1,06	3,50	0,59	0,99	10,93
	2	0,91	1,02	0,05	-1,53	-0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09	0,02	0,10	1,12
	3	3,03	5,80	0,88	-9,37	-0,50	2,38	0,63	-0,26	4,88	0,59	1,15	16,82
	4	4,04	6,38	0,88	-0,27	-0,54	1,87	-0,76	-0,71	1,39	0,59	1,05	18,39
	5	3,32	4,84	0,88	0,39	0,13	1,76	-0,24	-0,31	1,39	0,59	0,47	15,47
	6	3,31	4,79	0,83	0,56	0,33	0,58	-0,23	-0,26	1,06	0,59	0,22	15,70
	7	3,45	5,26	0,41	0,52	0,25	0,75	-0,13	-0,27	0,51	0,42	0,22	15,65
	8	3,42	5,76	0,01	0,52	0,21	1,15	-0,50	-0,28	0,51	0,42	0,16	13,28
	9	3,81	6,46	0,00	0,09	0,20	0,86	-0,15	-0,28	0,51	0,42	0,16	14,77

**C.Daftar KUPVA Bukan Bank Berizin di Sumatera Selatan**

Nama KUPVA BB	Alamat	Status Kantor	No. Telp/ Hp
PT Try Dharma Perdana	JL.Kol. Atmo No.446 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081377918991 / 0711-351786
PT Sinar Valuta Asing Palembang	JL.Sayangan No.164 RT 003/001 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081367727628
PT Berkat Sukses Bersama	JL. R. Sukamto, PTC Mall GF-A2.27-28, 8 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan 30114	Kantor Pusat	0811786128
PT Makmur Alam Jaya	JL.Beringin Janggut II No.6/351, 17 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081373088288 / 0711-317601
PT Ranting Emas Jaya Abadi	JL.Jend.Sudirman No.98/456, 20 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan 30126	Kantor Pusat	0711-354858
PT Mas Sriwijaya Abadi	JL.TP Rustam Effendi No.380 D RT 006 RW 003 Kel.17 Ilir Kec.Ilir Timur I, Palembang	Kantor Pusat	08127341808 / 0711351111
PT Sumber Daya Usaha	Internasional Plaza Jl. Jenderal Sudirman No.147 Blok B-3, Palembang	Kantor Pusat	08117892478 / 0711-365691
PT H. La Tunrung A.M.C	JL.R. Sukamto, No.79 RT 10/005 Kel.8 Ilir, Kec. Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan 30114	Kantor Cabang	082175059245/0711-5630188
PT Bhaktisakti Ganda Intiharmoni	Palembang Trade Center Mall (PTC) Lantai GF Blok A2, No.42-43 JL.R. Sukamto Palembang, Sumatera Selatan	Kantor Cabang	08558341789 / 0711-382418



# Daftar Istilah

<b>Mtm</b>	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
<b>Qtq</b>	Quarter to quarter perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan Sebelumnya
<b>Yoy</b>	Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya
<b>Share Of Growth</b>	Kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB
<b>Investasi</b>	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal
<b>Sektor ekonomi dominan</b>	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan
<b>Migas</b>	Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas
<b>Omzet</b>	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi
<b>Share effect</b>	Kontribusi pangsa sektor atau sub sektor terhadap total PDRB
<b>Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)</b>	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100
<b>Indeks Harga Konsumen (IHK)</b>	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu
<b>Indeks Kondisi Ekonomi</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
<b>Indeks Ekspektasi Konsumen</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
<b>Survei Konsumen</b>	Survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau indikator dini (prompt indicator) mengenai tendensi/arah konsumsi rumah tangga dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi stabilitas keuangan rumah tangga dan ekspektasi konsumen terhadap perkiraan inflasi kedepan untuk mendukung penyusunan kebijakan moneter Bank Indonesia.
<b>Weighted Net Balance</b>	Istilah lain dari Survei Bersih Tertimbang yang merupakan nilai share masing-masing sektor/subsektor terhadap total sektor PDB (atas dasar harga konstan tahun 2000) dengan total bobot sama dengan 1.
<b>Survei Kinerja Dunia Usaha</b>	Survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, yaitu triwulan yang sedang berjalan dan perkiraan pada triwulan yang akan datang guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, serta sebagai bahan informasi dalam penyusunan kajian ekonomi dan keuangan baik nasional maupun regional

<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
<b>Dana Perimbangan</b>	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli
<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
<b>Andil inflasi</b>	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan
<b>Bobot inflasi</b>	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut
<b>Ekspor</b>	Adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
<b>Impor</b>	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil
<b>PDRB atas dasar harga berlaku</b>	Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian
<b>PDRB atas dasar harga konstan</b>	Merupakan perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya
<b>Bank Pemerintah</b>	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI
<b>Dana Pihak Ketiga (DPK)</b>	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito
<b>Loan to Deposits Ratio (LDR)</b>	Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun
<b>Cash inflows</b>	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu
<b>Cash Outflows</b>	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu

<b>Net Cashflows</b>	Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>Netcash Outflows</i> bila terjadi <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan <i>cash inflows</i> , dan <i>Netcash inflows</i> bila terjadi sebaliknya
<b>Aktiva Produktif</b>	Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia(SBI), dan surat-surat berharga lainnya.
<b>Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan
<b>Kualitas Kredit</b>	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
<b>Capital Adequacy Ratio (CAR)</b>	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko(ATMR)
<b>Financing to Deposit Ratio (FDR)</b>	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional
<b>Inflasi</b>	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus ( <i>persistent</i> )
<b>Kliring</b>	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
<b>Kliring Debet</b>	Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional
<b>Non Performing Loans/Financing (NPLs/Ls)</b>	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
<b>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)</b>	Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk, misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15 % dari jumlah Kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan)
<b>Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)</b>	Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs, gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs.

<b>Rasio Non Performing Loans (NPLs) – NET</b>	Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit
<b>Sistem Bank Indonesia Realime Gross Settlement (BI RTGS)</b>	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (real time) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
<b>Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)</b>	Sistem kliring bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
<b>Industri</b>	Suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (assembling) dari bagian suatu industri.
<b>Pekerja</b>	Orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha tersebut.
<b>Pekerja Dibayar</b>	Orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha dengan mendapatkan upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang.
<b>Pekerja Tidak Dibayar</b>	Pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang ikut aktif dalam pengelolaan perusahaan tetapi tidak mendapatkan upah/gaji, tidak termasuk mereka yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja yang biasa di perusahaan.
<b>Input</b>	Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa bahan baku, bahan bakar, barang lainnya di luar bahan baku/penolong, jasa industri, sewa gedung dan biaya jasa non industri lainnya.
<b>Output</b>	Nilai keluaran yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa nilai barang yang dihasilkan, tenaga listrik yang dijual, jasa industri yang diterima, keuntungan jual beli, pertambahan stok barang setengah jadi dan penerimaan-penerimaan lainnya.
<b>Nilai Tambah/Value Added</b>	Selisih nilai <i>output</i> dengan nilai <i>input</i> atau biasa disebut dengan nilai tambah menurut harga pasar.
<b>Produktivitas</b>	Rasio antara nilai <i>output</i> dengan jumlah tenaga kerja baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar.
<b>Tingkat Efisiensi</b>	Ratio antara nilai tambah atas dasar harga pasar terhadap <i>output</i> produksi.
<b>Intensitas Tenaga Kerja</b>	Suatu rasio antara biaya upah/gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja terhadap nilai tambah.
<b>Gross Margin</b>	% <i>tase value added</i> dikurangi biaya tenaga kerja dibagi <i>output</i> .
<b>Usaha</b>	Kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan atau menunjang kehidupan dan menanggung risiko.
<b>Perusahaan</b>	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/ dikelola secara komersil yaitu yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada satu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.

## Tim Penyusun

### Penanggung Jawab

Bambang Pramono

### Koordinator Penyusun

Duddy Adiyatna

M.Ardian Dwinanto

### Tim Penulis

Komang Greggy Sridana

Aldi Pratama Sembiring

Putri Nurul Khasanah

Ihsan Bagus Atyantodito

Karina Nisa Aprilia

Theodora Stefany

Karina Qurrota Annida

Nasrullah

Xenaneira Shodrokova

### Kontributor

Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi

Fungsi Data, Statistik Ekonomi dan Keuangan

Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM

Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Unit Kehumasan

### Produksi dan Distribusi

Dewi Sinta P.S.



---

### Kantor Perwakilan Bank Indonesia

#### Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang

Telp. 0711-354188. Fax. 0711-312013

<https://www.bi.go.id>

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang  
Telp. 0711 - 354188 . Fax. 0711 - 312013  
<https://www.bi.go.id>

